



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, Salawat dan Salam kami sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari Alam Jahiliah ke Alam yang penuh dengan Ilmu Pengetahuan.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, Bupati/Walikota menyusun Profil Perkembangan Kependudukan berskala Kabupaten/Kota. Penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan antara lain untuk pemanfaatan pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Buku Profil Kependudukan Kota Sukabumi Tahun 2015 masih terdapat kekurangan dan kelemahan, maka kami sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang positif untuk kesempurnaan penyusunan pada waktu yang akan datang.

Sukabumi, 2016

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Sukabumi,**

ISKANDAR, S.IP., M.T.
Pembina Tk. I
NIP. 19700517 199003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	6
1.3 Landasan Hukum	7
1.4 Ruang Lingkup	9
1.5 Konsep dan Definisi	9
1.6 Sistematika Penulisan	15
BAB II GAMBARAN UMUM KOTA SUKABUMI	18
2.1 Peta Kota Sukabumi	18
2.2 Keadaan Geografis	18
2.3 Letak Geografis	21
2.4 Luas Wilayah	21
2.5 Visi dan Misi Kota Sukabumi	23
2.6 Visi dan Misi Kepala Daerah	23
2.7 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi	24
2.8 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi	28

BAB	III	KUANTITAS PENDUDUK	30
	3.1.	Persebaran Penduduk	30
	3.1.1	Jumlah dan Persebaran Penduduk	30
	3.1.2	Kepadatan Penduduk (<i>Population Density</i>)	38
	3.2.	Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografis.....	43
	3.2.1	Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin	43
	3.2.2	Rasio Jenis Kelamin (<i>Sex Ratio</i>)	67
	3.2.3	Rasio Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>)	69
	3.3.	Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial	74
	3.3.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama ...	74
	3.3.2	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	78
	3.4.	Kepemilikan Data Kependudukan	84
	3.4.1	Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	85
	3.4.2	Kepemilikan KTP	86
	3.4.3	Kepemilikan Akta Kelahiran	87
	3.4.4	Kepemilikan Akta Perkawinan	89
	3.4.5	Kepemilikan Akta Perceraian	90
BAB	IV	KUALITAS PENDUDUK	92
	4.1.	Indikator Kesehatan	92
	4.1.1	Kelahiran (<i>Fertilitas</i>)	92
	4.1.2	Kematian (<i>Mortalitas</i>)	95

4.2	Indikator Pendidikan.....	106
4.2.1	Angka Melek Huruf (AMH)	106
4.2.2	Angka Partisipasi Kasar (APK)	106
4.3	Indikator Keluarga Berencana	112
4.3.1	Pasangan Usia Subur (PUS)	112
4.3.2	Peserta KB Aktif	113
4.3.3	Peserta KB Aktif Menurut Jalur Pelayanan	115
4.3.4	Pasangan Usia Subur (PUS) Bukan Peserta KB	118
4.3.5	Tahapan Keluarga	121
4.4	Indikator Tenaga Kerja	125
4.4.1	Jumlah Pencari Kerja dan Lowongan Kerja	125
4.5	Indikator Sosial	130
4.5.1	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	130
4.6	Mobilitas Penduduk	119
4.6.1	Angka Migrasi Masuk	134
4.6.2	Angka Migrasi Keluar	135
4.6.3	Angka Migrasi Netto	135
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	137
5.1.	Kesimpulan	137
5.2	Saran	143

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Administrasi & Luas Wilayah Se-Kota Sukabumi	22
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2014	31
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2015	31
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014	33
Tabel 3.4	Jumlah Penduduk per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015	33
Tabel 3.5	Jumlah Penduduk per Kelurahan	36
Tabel 3.6	Kepadatan Penduduk Tahun 2014	39
Tabel 3.7	Kepadatan Penduduk Tahun 2015	40
Tabel 3.8	Komposisi Umur Berdasarkan Struktur Umur Tahun 2014	44
Tabel 3.9	Komposisi Umur Berdasarkan Struktur Umur Tahun 2015	45
Tabel 3.10	Jumlah dan Proporsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2014	48
Tabel 3.11	Jumlah dan Proporsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2015	49
Tabel 3.12	Jumlah Penduduk Kecamatan Gunung Puyuh Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	53
Tabel 3.13	Jumlah Penduduk Kecamatan Cikole Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	55
Tabel 3.14	Jumlah Penduduk Kecamatan Citamiang Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	57
Tabel 3.15	Jumlah Penduduk Kecamatan Warudoyong Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	59
Tabel 3.16	Jumlah Penduduk Kecamatan Baros Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	61

Tabel 3.17	Jumlah Penduduk Kecamatan Lembursitu Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	63
Tabel 3.18	Jumlah Penduduk Kecamatan Cibeureum Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	65
Tabel 3.19	Rasio Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>)	70
Tabel 3.20	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	74
Tabel 3.21	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama per Kecamatan	76
Tabel 3.22	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan per Kecamatan	79
Tabel 3.23	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	80
Tabel 3.24	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir Berdasarkan Usia	82
Tabel 3.25	Penduduk Usia Produktif (15-64 Tahun) dengan Pendidikan Rendah	83
Tabel 3.26	Penduduk Usia Produktif (15-64 Tahun) dengan Pendidikan Tinggi	83
Tabel 3.27	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	85
Tabel 3.28	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP-el	86
Tabel 3.29	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran	87
Tabel 3.30	Jumlah Penduduk Usia 0-18 Tahun Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran	88
Tabel 3.31	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akta Perkawinan per Kecamatan	89
Tabel 3.32	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akta Perkawinan Menurut Umur	90
Tabel 3.33	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akta Perceraian per Kecamatan	91
Tabel 3.34	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akta Perceraian Menurut Umur	91

Tabel 4.1	Jumlah Kematian Ibu per Kecamatan Di Kota Sukabumi Tahun 2015	96
Tabel 4.2	Jumlah Kematian Neonatal, Bayi dan Balita Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Di Kota Sukabumi Tahun 2015	98
Tabel 4.3	Cakupan Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> per Kecamatan Di Kota Sukabumi Tahun 2015	100
Tabel 4.4	Jumlah Balita Gizi Buruk yang Mendapatkan Perawatan Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Di Kota Sukabumi Tahun 2015	101
Tabel 4.5	Angka Partisipasi Kasar (APK/ <i>Gross Enrollment Ratio</i>) Jenjang PAUD per Kecamatan	108
Tabel 4.6	Angka Partisipasi Kasar (APK/ <i>Gross Enrollment Ratio</i>) Jenjang SD/Sederajat per Kecamatan	109
Tabel 4.7	Angka Partisipasi Kasar (APK/ <i>Gross Enrollment Ratio</i>) Jenjang SMP/Sederajat per Kecamatan	110
Tabel 4.8	Angka Partisipasi Kasar (APK/ <i>Gross Enrollment Ratio</i>) Jenjang SMA/Sederajat per Kecamatan	111
Tabel 4.9	Data Pasangan Usia Subur (PUS)	112
Tabel 4.10	Data Peserta KB Aktif (CU/PUS)	114
Tabel 4.11	Data Peserta KB Aktif Pelayanan KB Pemerintah	116
Tabel 4.12	Data Peserta KB Aktif Pelayanan KB Swasta	116
Tabel 4.13	Data PUS Bukan Peserta KB	119
Tabel 4.14	Data Tahapan Keluarga	123
Tabel 4.15	Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan Golongan Usia per Kecamatan menurut AK I Tahun 2015	126
Tabel 4.16	Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan Usia dan Tingkat Pendidikan menurut AK I Tahun 2015	127
Tabel 4.17	Ikhtisar AK I Tahun 2015 Penempatan, Penghapusan, dan yang Belum Ditempatkan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	128

Tabel 4.18	Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan menurut AK I Tahun 2015	129
Tabel 4.19	Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan per Kecamatan menurut AK I Tahun 2015	129
Tabel 4.20	Rekapitulasi Registrasi PPTKIS Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Sukabumi	130
Tabel 4.21	Rekapitulasasi Pendataan PMKS di Kota Sukabumi	131
Tabel 4.22	Penanganan PMKS di Kota Sukabumi	132
Tabel 4.23	Migrasi Penduduk Masuk Kota Sukabumi Tahun 2015	133
Tabel 4.24	Migrasi Penduduk Keluar Kota Sukabumi Tahun 2015	133

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2014	32
Grafik 3.2	Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2015	32
Grafik 3.3	Jumlah Penduduk per Kecamatan berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015	54
Grafik 3.4	Jumlah Penduduk per Kecamatan berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015	34
Grafik 3.5	Jumlah Penduduk per Kelurahan	37
Grafik 3.6	Kepadatan Penduduk Tahun 2014	42
Grafik 3.7	Kepadatan Penduduk Tahun 2015	42
Grafik 3.8	Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur umur Tahun 2014	46
Grafik 3.9	Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur umur Tahun 2015	46
Grafik 3.10	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	75
Grafik 3.11	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	80
Grafik 4.1	Persentase PUS per Kecamatan	113
Grafik 4.2	Peserta KB Aktif (CU/PUS)	114
Grafik 4.3	Peserta KB Aktif (CU/PUS) Menurut Jalur Pelayanan	117
Grafik 4.4	PUS Bukan Peserta KB	119
Grafik 4.5	Tahapan Keluarga Kota Sukabumi	124

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1	Piramida Penduduk Kota Sukabumi Tahun 2014	51
Diagram 3.2	Piramida Penduduk Kota Sukabumi Tahun 2015	51
Diagram 3.3	Piramida Penduduk Kecamatan Gunung Puyuh Tahun 2015	54
Diagram 3.4	Piramida Penduduk Kecamatan Cikole Tahun 2015	56
Diagram 3.5	Piramida Penduduk Kecamatan Citamiang Tahun 2015	58
Diagram 3.6	Piramida Penduduk Kecamatan Warudoyong Tahun 2015	60
Diagram 3.7	Piramida Penduduk Kecamatan Baros Tahun 2015	62
Diagram 3.8	Piramida Penduduk Kecamatan Lembursitu Tahun 2015	64
Diagram 3.9	Piramida Penduduk Kecamatan Cibeureum Tahun 2015	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hakikat pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Pembangunan Nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Data kependudukan memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan pembangunan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan, baik bagi pemerintah maupun pihak lain termasuk dunia usaha. Oleh karena itu ketersediaan data perkembangan

kependudukan sampai tingkat lapangan menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program-program kependudukan.

Untuk itu pengembangan sistem informasi kependudukan yang bisa diakses dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk tujuan intervensi yang berbeda-beda merupakan kebutuhan utama untuk segera diaplikasikan, sehingga makin lengkap dan akurat data kependudukan yang tersedia, maka akan semakin mudah dan tepat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilaksanakan.

Dalam upaya mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan, sebagai wujud dinamika penduduk dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar ke depan nanti pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kuantitas dan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas penduduk dan penataan persebarannya yang didukung oleh upaya-upaya perlindungan dan pemberdayaan penduduk dan peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang wawasan kependudukan bahkan sejak usia dini.

Isu kependudukan adalah isu yang sangat strategis dan bersifat lintas sektor. Oleh karena itu, pengintegrasian berbagai aspek kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan dan bagaimana pembangunan kependudukan itu sendiri akan dicapai, akan menjadi pekerjaan besar yang harus diwujudkan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bab VI Pasal 17 dinyatakan bahwa :

“Perkembangan kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan”.

Hadirnya Undang-Undang ini sebagai landasan dasar yang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan hidup seluruh manusia. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga tidak lagi dipahami secara sempit sebagai usaha untuk mempengaruhi pola dan arah demografi semata, tetapi sarannya jauh lebih luas, yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, baik dalam arti fisik maupun non fisik.

Lebih lanjut disebutkan dalam Bab VIII Pasal 49 :

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi kependudukan sebagai dasar kebijakan, penyelenggaraan pembangunan.”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, merupakan penjabaran amanat dari Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya *database* kependudukan secara Nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang mengamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan di dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pembangunan kependudukan merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, karena masalah kependudukan merupakan isu strategis dan bersifat lintas sektoral. Pengintegrasian berbagai aspek kependudukan kedalam perencanaan pembangunan perlu diwujudkan.

Upaya-upaya mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk.

Dalam hal ini, data kependudukan mempunyai peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan guna menentukan arah

kebijakan pembangunan, perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan, baik bagi pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, baik yang menyangkut masalah kependudukan, masalah potensi sumber daya daerah maupun informasi tentang kewilayahan lainnya.

Oleh karena itu ketersediaan data kependudukan disemua tingkatan administrasi pemerintahan (kota/kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan) menjadi faktor kunci keberhasilan program pembangunan.

Data dan informasi kependudukan yang diperlukan dalam penyusunan Profil Kependudukan bersumber dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang merupakan salah satu substansi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Variabel data yang dipergunakan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan meliputi data yang berhubungan dengan variabel kuantitas, kualitas, mobilitas penduduk, dan kepemilikan dokumen kependudukan.

Untuk memenuhi kebutuhan informasi kependudukan ini perlu disusun dalam bentuk Profil Perkembangan Kependudukan yang disajikan secara berkelanjutan. Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi kependudukan di Kota Sukabumi dan prediksi prospek kependudukan dimasa yang akan datang. Disisi lain penyusunan Profil Perkembangan

Kependudukan ini merupakan wujud pemanfaatan data kependudukan yang tersebar diberbagai instansi.

Kerangka pikir penyusunan profil perkembangan kependudukan mencakup 5 (lima) hal pokok bahasan, antara lain:

1. Menyajikan profil perkembangan kependudukan secara kuantitatif sehingga tampak tergambarkan kondisi yang sedang berlangsung;
2. Mengidentifikasi kelompok atau segmen kependudukan yang membutuhkan perhatian khusus dan upaya-upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas penduduk;
3. Teridentifikasinya potensi penduduk yang dapat dijadikan aset pembangunan daerah maupun nasional;
4. Mengkoordinasikan, mensosialisasikan, dan melakukan bimbingan teknis dengan instansi terkait untuk memperoleh kesepakatan, kesepahaman dalam penyusunan dan pemanfaatannya;
5. Mendorong terwujudnya *database* penduduk dan analisis *database* kependudukan sebagai rujukan perencanaan pembangunan daerah.

Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi kependudukan Kota Sukabumi secara transparan dan komprehensif.

1.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Profil Perkembangan Kependudukan Kota Sukabumi adalah :

1. Memberikan gambaran kondisi kependudukan Kota Sukabumi sebagai salah satu informasi untuk dijadikan bahan perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.
2. Sebagai bahan analisis dalam penyusunan program-program kependudukan.
3. Sebagai bahan evaluasi dan acuan pengambilan kebijakan bidang kependudukan.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Penduduk;
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
12. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 44 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi;
13. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Sukabumi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Sukabumi.

1.4. Ruang Lingkup

Profil Perkembangan Kependudukan mencakup gambaran tentang ciri-ciri kependudukan Kota Sukabumi dengan segala aspek yang terkait di dalamnya berdasarkan data yang dikumpulkan pada Tahun 2015, meliputi :

1. Kuantitas penduduk, meliputi komposisi dan persebaran penduduk.
2. Kualitas penduduk meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial.
3. Mobilitas penduduk meliputi mobilitas permanen, mobilitas non permanen, dan urbanisasi.
4. Kepemilikan dokumen kependudukan.

1.5. Konsep dan Definisi

Beberapa konsep dan definisi pokok yang digunakan dalam Profil Perkembangan Kependudukan adalah sebagai berikut :

1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009);
2. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hal lainnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);

3. Data Kependudukan adalah data perorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
4. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009);
5. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KartuKeluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjaditinggal tetap (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
6. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
7. Kematian atau mortalitas menurut WHO adalah suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup;

8. Rasio Jenis Kelamin adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan jenis kelamin antara banyaknya penduduk laki-laki dan penduduk perempuan disuatu daerah pada waktu tertentu;
9. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009);
10. Mobilitas penduduk permanen (migrasi) adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administrative (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional);
11. Mobilitas penduduk non permanen (*circualtion/sirkuler*) adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk tidak menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif. Mobilitas penduduk non permanen dibagi menjadi dua yaitu ulang-alik/nglaju (*commuting*) dan menginap/mondok.
12. Penduduk musiman merupakan salah satu jenis obilitas penduduk non permanen yang bekerja tidak pada daerah domisilinya dan menetap dalam kurun waktu lebih dari satu hari tetapi kurang dari satu tahun dan dilakukan secara berulang;
13. Mobilitas penduduk ulang-alik atau nglaju (*commuting*) adalah gerak penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari yang sama;

14. Migrasi kembali (*return migration*) adalah banyaknya penduduk yang pada waktu diadakan pendataan bertempat tinggal di daerah yang sama dengan tempat lahir dan pernah bertempat tinggal di daerah yang berbeda;
15. Migrasi semasa hidup (*life time migration*) adalah bentuk migrasi dimana pada waktu diadakan pendataan tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat kelahirannya;
16. Migrasi risen (*recent migration*) adalah bentuk migrasi melewati batas wilayah administrasi (desa/kec/kab/provinsi) dimana pada waktu diadakan pendataan bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan tempat tinggal lima tahun yang lalu.
17. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.
18. Urbanisasi adalah suatu proses bertambahnya konsentrasi penduduk di perkotaan dan atau proses perubahan suatu daerah perdesaan menjadi perkiraan, baik secara fisik maupun ukuran-ukuran spasial dan/atau bertambahnya fasilitas perkotaan, serta lembaga-lembaga sosial, maupun perilaku masyarakatnya.
19. Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun.
20. Angka Partisipasi Angkatan Kerja adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

-
21. Pengangguran adalah orang yang termasuk angkatan kerja, namun pada saat pendataan/survey atau sensus tidak berkerja dan sedang mencari kerja.
 22. Angka Pengangguran adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja.
 23. Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun kebawah dan penduduk berusia 64 tahun keatas.
 24. Lahir hidup adalah suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan, misatnya ada nafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusar atau gerakan otot. Banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa ketompok wanita selama masa reproduksinya;
 25. Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan.
 26. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) adalah rata-rata banyaknya anak yang akan dimiliki oleh seorang wanita pada masa reproduksinya jika mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung,
 27. Angka Kematian Bayi Baru Lahir adalah banyaknya kematian baru lahir, usia kurang dari satu bulan (0-28) hari pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama.

28. Angka Kematian Bayi Lepas Baru Lahir adalah Banyaknya kematian bayi lepas baru lahir (usia 1-11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama.
29. Angka Kematian Bayi/IMR adalah banyaknya kematian bayi usia kurang dari satu tahun (0-11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama.
30. Angka Kematian, Ibu/MMR adalah banyaknya kematian ibu pada waktu hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan per 100.000 kelahiran hidup, tanpa memandang lama dan tempat kelahiran yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya.
31. Angka Kematian Kasar adalah banyaknya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu untuk setiap 1000 penduduk.
32. Pengeluaran untuk makanan adalah proporsi pengeluaran yang dipergunakan untuk mengkonsumsi makanan dibandingkan dengan total pengeluaran (makanan dan bukan makanan).
33. Penduduk Melek Huruf adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang telah bebas dari tiga buta, yaitu buta aksara, buta latin, dan buta angka, buta bahasa Indonesia dan buta pengalaman dasar.
34. Buta Huruf adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang belum bebas dari tiga buta, yaitu buta aksara, latin dan angka, buta bahasa Indonesia dan buta pengamatan dasar.

35. Angka Partisipasi Total adalah proporsi penduduk bersekolah menurut golongan umur sekolah yaitu umur 7-12,13-15,16-18, dan 19-24 tahun.
36. Angka Partisipasi Murni/APM adalah presentase jumlah peserta didik SD usia 7-12 tahun, jumlah peserta didik SLTP usia 13-15 tahun, jumlah peserta didik SLTA usia 16-18 tahun dan jumlah peserta didik PTN/PTS usia 19-24 tahun dibagi jumlah penduduk kelompok usia dari masing-masing jenjang pendidikan.
37. Angka Partisipasi Kasar/APK adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

1.6. Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Ruang Lingkup
- 1.5. Konsep dan Definisi
- 1.6. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KOTA SUKABUMI

- 2.1. Peta Kota Sukabumi
- 2.2. Keadaan Geografis
- 2.3. Letak Geografis
- 2.4. Luas Wilayah

- 2.5. Visi dan Misi Kota Sukabumi
- 2.6. Visi dan Misi Kepala Daerah
- 2.7. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi
- 2.8. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi

BAB III KUANTITAS PENDUDUK

- 3.1. Persebaran Penduduk
 - 3.1.1 Jumlah dan Persebaran Penduduk
 - 3.1.2 Kepadatan Penduduk
- 3.2. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi
 - 3.2.1 Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
 - 3.2.2 Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)
 - 3.2.3 Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)
- 3.3. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial
 - 3.3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
 - 3.3.2 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
- 3.4. Kepemilikan Data Kependudukan
 - 3.4.1 Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)
 - 3.4.2 Kepemilikan KTP-el
 - 3.4.3 Kepemilikan Akta Kelahiran
 - 3.4.4 Kepemilikan Akta Perkawinan
 - 3.4.5 Kepemilikan Akta Perceraian

BAB IV KUALITAS PENDUDUK

4.1.Indikator Kesehatan

4.1.1 Kelahiran (*Fertilitas*)

4.1.2 Kematian (*Mortalitas*)

4.2.Indikator Pendidikan

4.2.1 Angka Melek Huruf (AMH)

4.2.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

4.2.3 Angka Partisipasi Murni (APM)

4.3.Indikator Keluarga Berencana (KB)

4.3.1 Pasangan Usia Subur (PUS)

4.3.2 Peserta KB Aktif

4.3.3 Peserta KB Aktif Jalur Pelayanan

4.3.4 Pasangan Usia Subur (PUS) Bukan
Peserta KB

4.3.5 Tahapan Keluarga

4.4.Indikator Tenaga Kerja

4.4.1 Jumlah Pencari Kerja

4.5.Indikator Sosial

4.5.1 Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS)

4.6.Mobilitas Penduduk

4.6.1 Angka Migrasi Masuk

4.6.2 Angka Migrasi Keluar

4.6.3 Angka Migrasi Netto

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

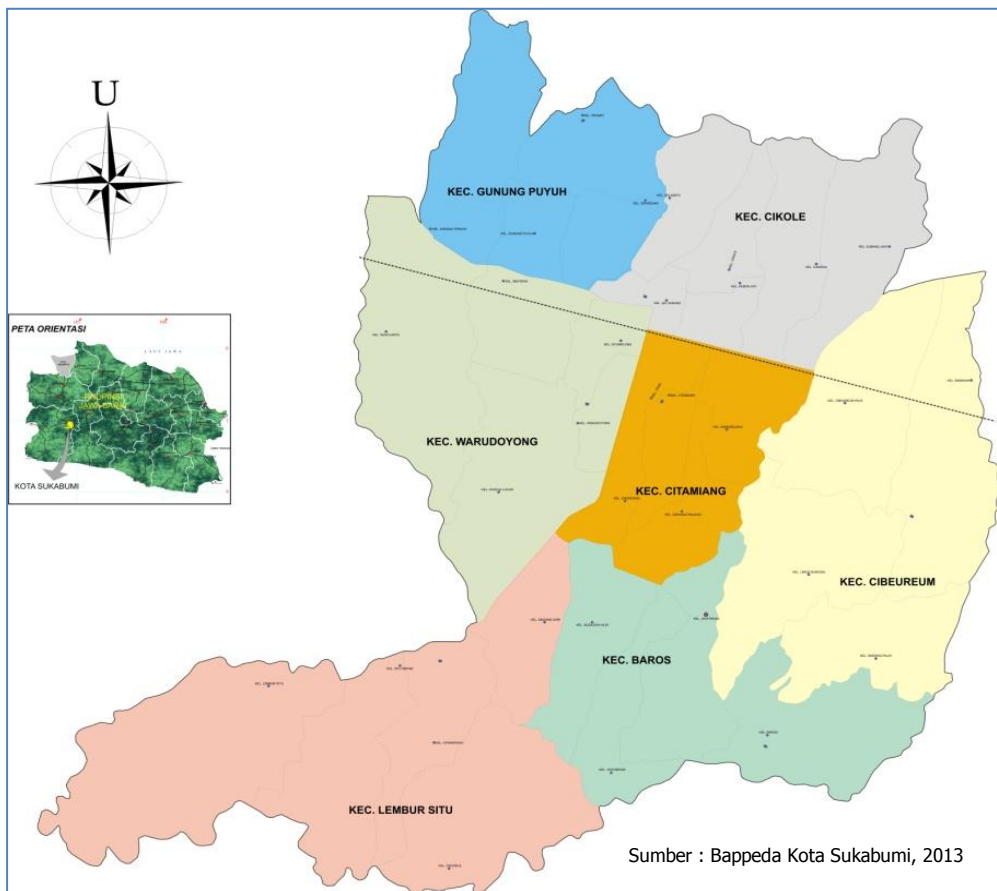
5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Peta Kota Sukabumi



2.2. Keadaan Geografis

Secara historis Kota Sukabumi dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai *Burgerlijk Bestuur* (1914) dengan status *Gemeenteraad Van Sukabumi* yang bertujuan untuk memberikan

pelayanan kepada orang-orang Belanda dan Eropa sebagai pengelola perkebunan di wilayah Kabupaten Sukabumi, Cianjur dan Lebak. Dalam konteks perekonomian regional kala itu Kota Sukabumi sudah dilengkapi dengan fasilitas pergudangan, fasilitas perbengkelan, dan jaringan transportasi seperti kereta api dan jalan raya yang berakses langsung ke pelabuhan samudera di Jakarta sehingga terjadi kegiatan ekspor-impor. Namun demikian dalam perjalanan sejarah kejayaan itu menyurut dikarenakan kesinambungan pengelolaan dan pemeliharaan asset-asset yang berbasis perkebunan tidak lagi menguntungkan akibat semakin ketatnya persaingan dengan negara-negara produsen sejenis.

Memasuki era kemerdekaan dengan dibentuknya sistem pemerintahan daerah, Kota Sukabumi termasuk kedalam kategori kota kecil yang disebut sebagai Kotapraja, Kotamadya dan terakhir menjadi Kota yang memiliki areal 1.215 Ha yang terdiri dari 2 (dua) kecamatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 Kota Sukabumi mengalami perluasan menjadi 4.800,23 Ha, sehingga ada penambahan desa-desa dan kecamatan yang kemudian dimekarkan menjadi 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Cikole, Cibeureum, Citamiang, Lembursitu, Warudoyong, Baros dan Gunung Puyuh yang terdiri dari 33 kelurahan dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Sukabumi (Kabupaten Sukabumi)
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Nyalindung (Kabupaten Sukabumi)
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Cisaat (Kabupaten Sukabumi)
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Sukaraja (Kabupaten Sukabumi)

Batas wilayah administrasi dan posisi Kota Sukabumi dalam Konstelasi Regional Jawa Barat berada pada posisi strategis karena berada diantara pusat pertumbuhan megaurban Jabodetabek dan Bandung Raya ini, merupakan salah satu kawasan andalan dari 8 kawasan andalan di Jawa Barat (RTRW Jawa Barat) yang berpotensi untuk mengembangkan agribisnis, pariwisata dan bisnis kelautan yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan modal investasi untuk menghasilkan daya saing global, serta menjadi motivator untuk memacu perkembangan wilayahnya juga mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah disekitarnya (*hinterland*).

Sesuai dengan kondisi obyektif yang terus berkembang, pertumbuhan kota mengarah kepada kegiatan perekonomian yang berbasis pada jasa meliputi perdagangan, perhotelan, perbankan, kesehatan, pendidikan, pertanian, hal inilah yang mendasari pemikiran untuk menetapkan visi kedepan keberadaan Kota Sukabumi **”Terwujudnya Kota Sukabumi Sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Perdagangan di Jawa Barat Berlandaskan Iman Dan Takwa”** yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12).

Visi kota tersebut sejalan dengan komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditetapkan oleh UNDP yang terdiri dari komponen peningkatan kemampuan daya beli, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang akan menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3. Letak Geografis

Wilayah Kota Sukabumi terletak pada bagian selatan tengah Jawa Barat pada titik koordinat $106^{\circ} 45' 50''$ BT dan $106^{\circ} 45' 10''$ Bujur Timur, $6^{\circ} 50' 44''$ Lintang Selatan, terletak di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang ketinggiannya 584 m di atas permukaan laut, dengan kemiringan $0^{\circ} - 3^{\circ}$ dan $3^{\circ} - 8^{\circ}$ di bagian utara. Secara geografis Kota Sukabumi terletak diantara pusat pertumbuhan megaurban Jabodetabek dan Bandung Raya. Jarak dari Ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) ± 92 Km dan Jarak dari Ibukota Negara (Jakarta) ± 120 Km. Cukup dekatnya jarak membuat tingginya pergerakan orang dan barang dari kota-kota tersebut. Hal ini juga membuka kesempatan kepada Kota Sukabumi untuk mengembangkan diri sebagai pusat pelayanan berkualitas di bidang perdagangan, pendidikan dan kesehatan yang merupakan visi Kota Sukabumi dengan didukung oleh tenaga profesional, kelengkapan sarana dan prasarana perekonomian, jasa pendidikan dan kesehatan berskala pelayanan regional.

2.4. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kota Sukabumi adalah ± 48 Km² dengan jarak terjauh dari Utara ke Selatan $\pm 7,5$ Km dan dari Barat ke Timur ± 6 Km yang terdiri dari 7 Kecamatan, 33 Kelurahan, 355 Rukun Warga (RW) dan 1.548 Rukun Tetangga (RT). Penggunaan tanah paling banyak dipergunakan untuk pertanian yaitu seluas 2.316 Ha dan yang paling kecil adalah penggunaan lahan untuk lain-lain seluas 300 Ha. Kecamatan Lembursitu merupakan kecamatan paling luas yaitu 8,89 Km² atau sebesar 18,52% dari luas Kota Sukabumi, sedangkan

Kecamatan yang paling kecil adalah Kecamatan Citamiang dengan luas 4,04 Km². Adapun luas masing- masing kecamatan di Kota Sukabumi dapat di lihat pada Table 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Pembagian Administrasi & Luas Wilayah se-Kota Sukabumi

NO	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah RT	Jumlah RW	Kepadatan (jiwa/Km2)
1	GUNUNG PUYUH	Gunung Puyuh	0.94	44	12	8.737
		Karamat	1.11	37	9	8.849
		Sriwidari	0.95	58	14	11.602
		KarangTengah	2.50	74	16	7.655
2	CIKOLE	Cikole	0.79	36	7	7.659
		Selabatu	0.97	60	9	10.538
		Gn. Parang	0.64	35	9	7.089
		Kebonjati	0.48	55	10	16.752
		Cisarua	2.00	75	19	9.658
	Subangjaya	2.20	76	14	7.488	
3	CITAMIANG	Citamiang	0.73	42	7	13.349
		Tipar	0.46	49	8	21.520
		Nanggaleng	1.20	65	13	13.732
		Gedong Pnjng	1.00	30	6	8.389
		Cikondang	0.65	41	9	13.538
4	WARU DOYONG	Warudoyong	0.43	32	5	15.512
		Nyomplong	0.52	49	9	15.623
		Dayeuhluhur	2.33	76	21	6.914
		Sukakarya	3.04	47	13	5.196
		Benteng	1.28	60	10	10.635
5	BAROS	Baros	1.79	62	18	8.960
		Jayaraksa	1.45	32	7	5.095
		Jayamekar	1.59	27	7	3.228
		SudajayaHilir	1.29	31	8	5.234
6	LEMBURSITU	Cipanengah	1.53	34	8	5.353
		Situmekar	1.54	30	8	3.853
		Lembursitu	3.22	67	21	3.476
		Cikundul	1.58	32	10	4.457
		Sindangsari	1.02	21	6	5.689

7	CIBEUREUM	Cibeureum Hilir	1.84	53	12	7.368
		Babakan	2.65	41	10	3.312
		Sindangpalay	1.65	34	7	4.410
		Limusnunggal	2.63	43	13	4.251
JUMLAH		33	48.00	1548	355	

2.5. VISI DAN MISI KOTA SUKABUMI

Visi Kota Sukabumi :

Terwujudnya Kota Sukabumi Sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perdagangan di Jawa Barat Berlandaskan Iman dan Taqwa.

Misi Kota Sukabumi :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Bertaqwa, dan Berbudaya;
2. Mewujudkan Pelayanan Pendidikan Yang Berkualitas;
3. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas;
4. Mewujudkan Pengembangan Perdagangan dan Sektor Usaha Lainnya Yang Berdaya Saing Tinggi;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dengan Aparatur Pemerintah Daerah Yang Profesional dan Amanah;
6. Mewujudkan Kota Sukabumi Yang Nyaman dan Indah.

2.6. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Visi Kepala Daerah :

”Dengan Iman dan Taqwa Mewujudkan Pemerintahan Rahmatan Lil A’lamin”

Misi Kepala Daerah :

1. Mewujudkan reformasi birokrasi menuju sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, dan berilmu;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, jujur, adil, profesional, mendengar, dan melayani masyarakat dengan ikhlas;
3. Mewujudkan pelayanan dasar yang lebih baik dan berkualitas;
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah;
5. Meningkatkan keamanan, ketertiban, keindahan, dan kebersihan kota.

2.7. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi

Visi :

“Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan Yang Tertib, Akurat, dan Dinamis”

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi masuk kedalam misi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi pada Point 2 (dua) yaitu **”Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Berwibawa, Jujur, Adil, Profesional, Mendengar, dan Melayani Masyarakat Dengan Ikhlas”**. Misi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintah yang baik dan pemerintahan yang bersih serta berwibawa yang ditandai dengan menurunnya kasus penyalahgunaan wewenang dan KKN, tidak adanya pengaduan masyarakat atas kinerja pemerintahan yang tidak ditindaklanjuti dan

meningkatnya kemampuan keuangan daerah dimana PAD meningkat pada setiap tahun yang diarahkan pada ***"Peningkatan Kualitas Pendataan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi"***.

Sedangkan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diuraikan secara ringkas seperti berikut ini :

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pengertian dari :

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan pendataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam registrasi pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.

Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan yang ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas tersebut tentu ada harapan yang ingin diwujudkan yaitu :

1. Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertib yaitu dalam melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil selalu menjalankan tahapan atau prosedur yang berlaku, tidak melewati tahapan yang sudah ditentukan, dan tidak menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku. Misalnya dalam pendaftaran penduduk harus berjenjang dimulai

dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, baru ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akurat yaitu : dalam melaksanakan kegiatan pencatatan administrasi kependudukan dan catatan sipil, data yang ada dan yang diberikan itu harus benar, tidak memberikan data palsu dan tidak memanipulasi data, sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
3. Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dinamis yaitu : dalam melaksanakan sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil data yang ada itu harus mengikuti perkembangan waktu terakhir, sehingga perubahannya kelihatan setiap waktu, apakah data yang ada itu statis atau tidak, atau misalkan dokumen yang dimiliki masih berlaku atau tidak.

Apabila sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tertib, akurat dan dinamis, maka dalam penyusunan rencana pembangunan dan dalam menentukan kebijakan pembangunan akan berjalan dengan baik dan lancar.

Guna mewujudkan Visi tersebut terdapat Misi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat;
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK);
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur Dinas;

Untuk mewujudkan Misi tersebut ada beberapa faktor pendukung yang perlu dilakukan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan aparatur terhadap tuntutan masyarakat dalam pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Aparatur yang terlibat dalam pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan aparatur yang mampu dan konsisten dalam penanganan Dokumen Kependudukan karena dengan kualitas aparatur yang baik, maka kegiatan pelayanan akan berjalan dengan lancar;
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Program SIAK merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk melaksanakan penanganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia secara bersamaan dan dimanfaatkan oleh seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, walaupun belum seluruhnya memanfaatkan teknologi tersebut karena satu dan lain hal;
3. Meningkatkan penyebarluasan informasi, kepedulian, dan peran serta masyarakat dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karena itu perlu diadakan penyebarluasan informasi tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di setiap kesempatan, agar pengetahuan dan wawasan masyarakat meningkat dan menindaklanjutinya. Selanjutnya warga masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan peran sertanya dalam penanganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena tanpa kepedulian dan

peran serta masyarakat tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu harus diupayakan bagaimana agar masyarakat mau peduli dan berperan serta dalam penanganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

4. Meningkatkan kerjasama dengan pihak yang berwenang. Administarsi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan program yang harus ditangani oleh berbagai pihak. Oleh sebab itu perlu adanya kerjasama dengan pihak yang berwenang dan terkait dengan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi berusaha seoptimal mungkin dalam memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan dalam pembuatan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi memiliki motto pelayanan : **“Cermat, Tepat, Bersahabat”**.

2.8. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 44 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi menjabarkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi sebagai berikut:

1. Kedudukan

Dinas adalah merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah yang mendukung tugas Kepala Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi merupakan salah satu lembaga teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

BAB III

KUANTITAS PENDUDUK

3.1. Persebaran Penduduk

Kota Sukabumi dengan luas wilayah 48 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 321.328 jiwa berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan yaitu Gunung Puyuh, Cikole, Citamiang, Warudoyong, Baros, Lembursitu, dan Cibeureum.

Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri yaitu sebanyak 320.572 jiwa, sehingga dapat dihitung Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 0,99%.

3.1.1 Jumlah dan Persebaran Penduduk

Jumlah dan persebaran penduduk Kota Sukabumi Tahun 2015 yang terbanyak berada di wilayah Kecamatan Cikole (18,82%) dan yang terkecil berada di wilayah Kecamatan Baros (10,43%), persebaran penduduk tersebut masih sama keadaannya dengan Tahun 2014 dimana terbanyak di wilayah Kecamatan Cikole (18,95%) dan yang terkecil di wilayah Kecamatan Baros (10,45%).

Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 serta Grafik 3.1 dan Grafik 3.2, di bawah ini :

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2014

KECAMATAN	JUMLAH (JIWA)	%
GUNUNG PUYUH	45.234	14,11
CIKOLE	60.760	18,95
CITAMIANG	50.612	15,79
WARUDOYONG	56.047	17,48
BAROS	33.501	10,45
LEMBURSITU	36.371	11,35
CIBEUREUM	38.047	11,87
JUMLAH	320.572	

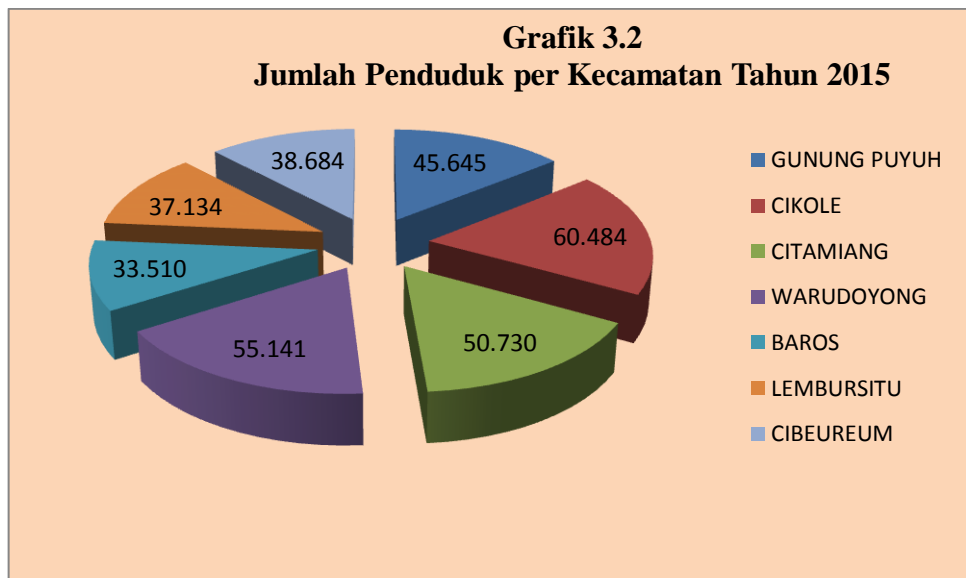
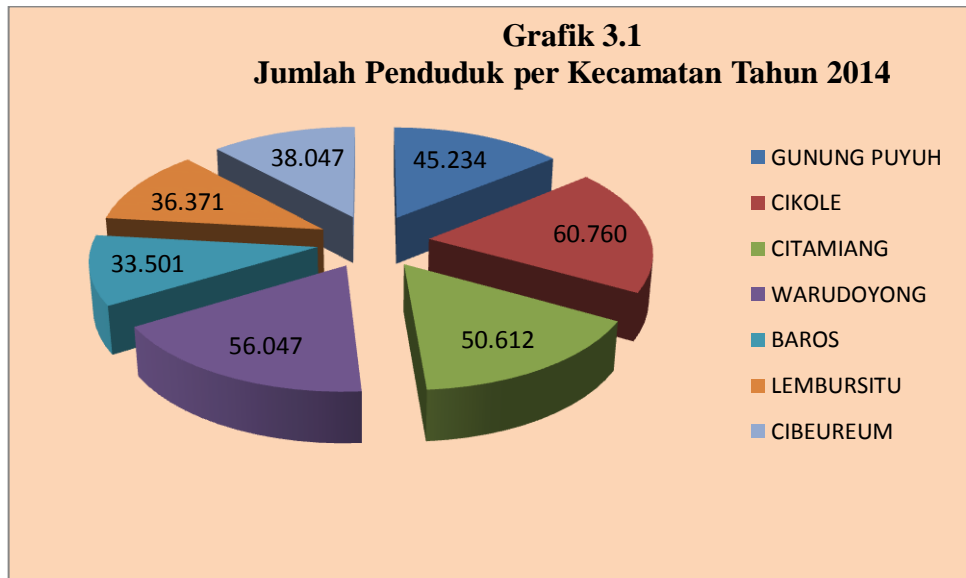
Sumber : DKB Semester I Tahun 2014.

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2015

KECAMATAN	JUMLAH (JIWA)	%
GUNUNG PUYUH	45.645	14,21
CIKOLE	60.484	18,82
CITAMIANG	50.730	15,79
WARUDOYONG	55.141	17,16
BAROS	33.510	10,43
LEMBURSITU	37.134	11,56
CIBEUREUM	38.684	12,04
JUMLAH	321.328	

Sumber : DKB Semester II Tahun 2015



Jumlah Penduduk per Kecamatan berdasarkan Jenis Kelamin, disajikan pada Tabel 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk per Kecamatan berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014

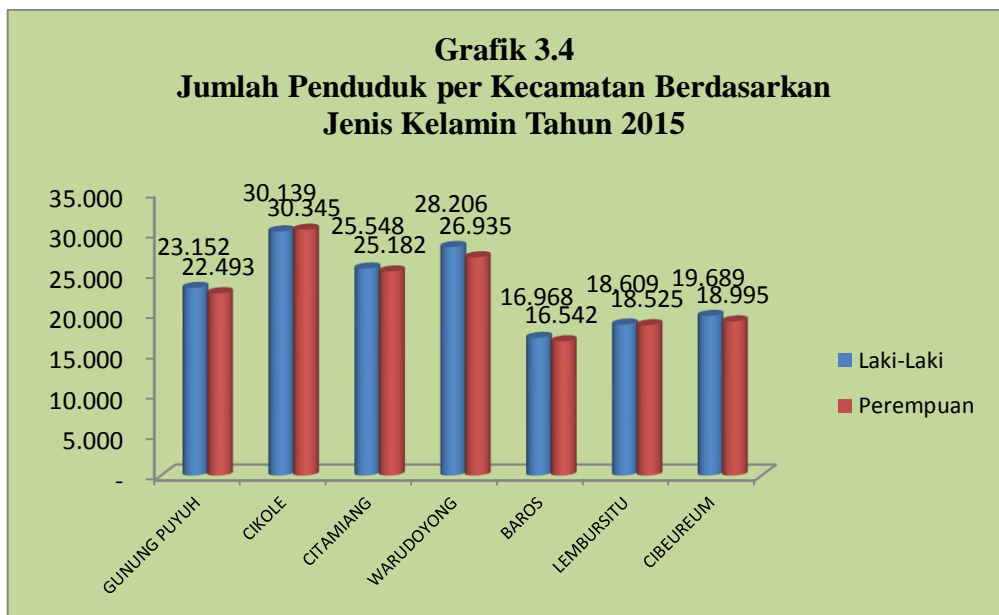
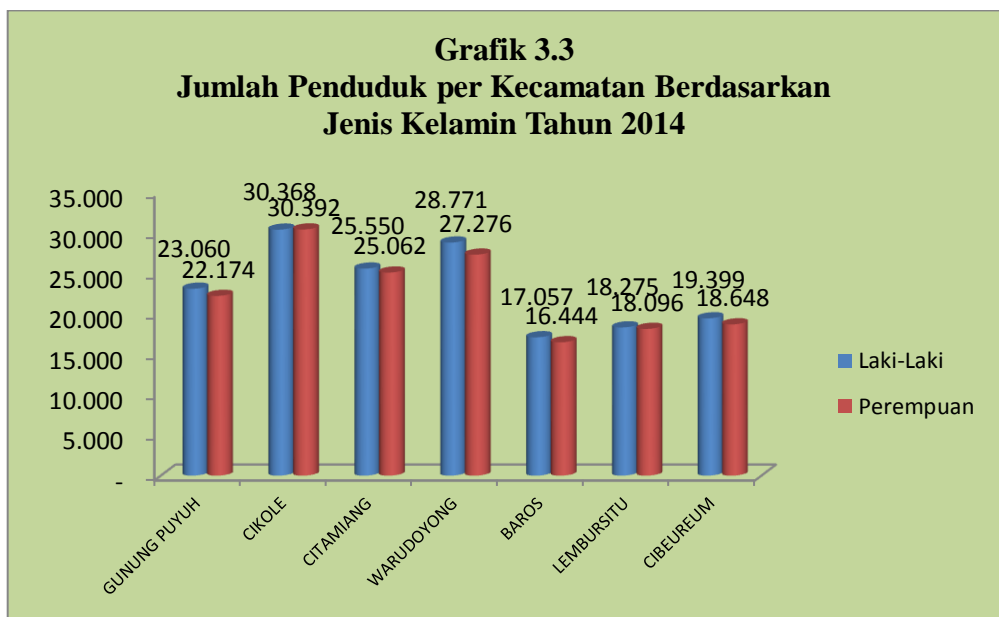
KECAMATAN	Jenis Kelamin (Jiwa)				Total Jiwa	% Jiwa	Jenis Kelamin Terbanyak	% Jiwa
	Laki-Laki	% Jiwa	Perempuan	% Jiwa				
GUNUNG PUYUH	23.060	50,52	22.174	48,58	45.234	14,11	Laki-Laki	50,52
CIKOLE	30.368	50,21	30.392	50,25	60.760	18,95	Perempuan	50,25
CITAMIANG	25.550	50,36	25.062	49,40	50.612	15,79	Laki-Laki	50,36
WARU DOYONG	28.771	52,18	27.276	49,47	56.047	17,48	Laki-Laki	52,18
BAROS	17.057	50,90	16.444	49,07	33.501	10,45	Laki-Laki	50,90
LEMBUR SITU	18.275	49,21	18.096	48,73	36.371	11,35	Laki-Laki	49,21
CIBEUREUM	19.399	50,15	18.648	48,21	38.047	11,87	Laki-Laki	50,15
JUMLAH	162.480	50,68	158.092	49,32	320.572	100		

Sumber : DKB Semester I Tahun 2014

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk per Kecamatan berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015

KECAMATAN	Jenis Kelamin (Jiwa)				Total Jiwa	% Jiwa	Jenis Kelamin Terbanyak	% Jiwa
	Laki-Laki	% Jiwa	Perempuan	% Jiwa				
GUNUNG PUYUH	23.152	50,72	22.493	49,28	45.645	14,21	Laki-Laki	50,72
CIKOLE	30.139	49,83	30.345	50,17	60.484	18,82	Perempuan	50,17
CITAMIANG	25.548	50,36	25.182	49,64	50.730	15,79	Laki-Laki	50,36
WARU DOYONG	28.206	51,15	26.935	48,85	55.141	17,16	Laki-Laki	51,15
BAROS	16.968	50,64	16.542	49,36	33.510	10,43	Laki-Laki	50,64
LEMBUR SITU	18.609	50,11	18.525	49,89	37.134	11,56	Laki-Laki	50,11
CIBEUREUM	19.689	50,90	18.995	49,10	38.684	12,04	Laki-Laki	50,90
JUMLAH	162.311	50,51	159.017	49,49	321.328	100		

Sumber : DKB Semester II Tahun 2015



Dari Tabel 3.4 terlihat bahwa jumlah penduduk Kota Sukabumi Tahun 2015 sebanyak 321.328 jiwa terdiri dari 162.311 jiwa laki-laki (50,51%) dan 159.017 jiwa perempuan (49,49%). Apabila dilihat jumlah penduduk Kota Sukabumi Tahun 2014 sebanyak 320.572 jiwa terdiri dari 162.480 jiwa laki-laki (50,68%) dan 158.092 jiwa perempuan (49,32%). Hal ini berarti bahwa penduduk Kota Sukabumi lebih banyak berjenis kelamin laki-laki (50,51%).

Sedangkan jika kita lihat Grafik 3.4 per kecamatan menunjukkan jumlah yang bervariasi, yaitu :

- ❖ Jumlah penduduk Kecamatan Gunung Puyuh lebih banyak berjenis kelamin laki-laki (50,72%)
- ❖ Jumlah penduduk Kecamatan Cikole lebih banyak berjenis kelamin perempuan (50,17%)
- ❖ Jumlah penduduk Kecamatan Citamiang lebih banyak berjenis kelamin laki-laki (50,36%)
- ❖ Jumlah penduduk Kecamatan Warudoyong lebih banyak berjenis kelamin laki-laki (51,15%)
- ❖ Jumlah penduduk Kecamatan Baros lebih banyak berjenis kelamin laki-laki (50,64%)
- ❖ Jumlah penduduk Kecamatan Lembursitu lebih banyak berjenis kelamin laki-laki (50,11%)
- ❖ Jumlah penduduk Kecamatan Cibeureum lebih banyak berjenis kelamin laki-laki (50,90%)

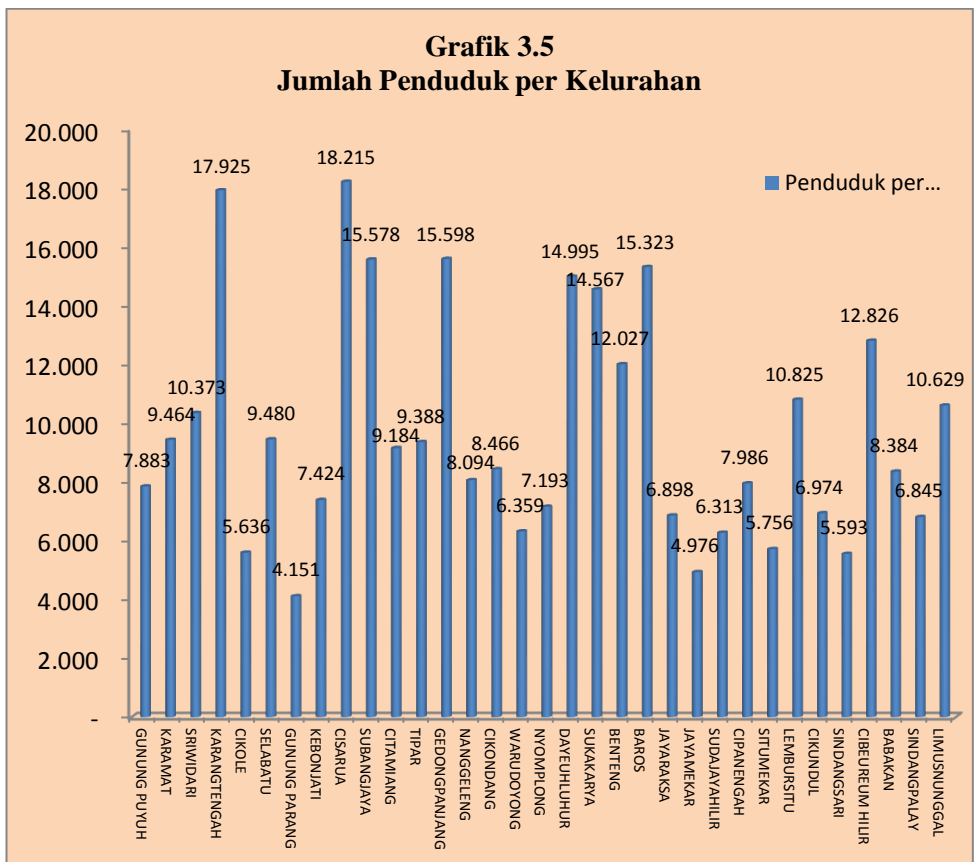
Jumlah Penduduk per kelurahan disajikan pada Tabel 3.5 di bawah ini :

Tabel 3.5
Jumlah Penduduk per Kelurahan

KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK			%
	L	P	L+P	
GUNUNG PUYUH				
GUNUNG PUYUH	3.935	3.948	7.883	2,45
KARAMAT	4.824	4.640	9.464	2,95
SRIWIDARI	5.142	5.231	10.373	3,23
KARANGTENGAH	9.251	8.674	17.925	5,58
CIKOLE				
CIKOLE	2.745	2.891	5.636	1,75
SELABATU	4.696	4.784	9.480	2,95
GUNUNG PARANG	2.023	2.128	4.151	1,29
KEBONJATI	3.672	3.752	7.424	2,31
CISARUA	9.209	9.006	18.215	5,67
SUBANGJAYA	7.794	7.784	15.578	4,85
CITAMIANG				
CITAMIANG	4.617	4.567	9.184	2,86
TIPAR	4.722	4.666	9.388	2,92
GEDONGPANJANG	7.942	7.656	15.598	4,85
NANGGELENG	4.047	4.047	8.094	2,52
CIKONDANG	4.220	4.246	8.466	2,63
WARUDOYONG				
WARUDOYONG	3.240	3.119	6.359	1,98
NYOMPLONG	3.618	3.575	7.193	2,24
DAYEUHLUHUR	7.683	7.312	14.995	4,67
SUKAKARYA	7.534	7.033	14.567	4,53
BENTENG	6.131	5.896	12.027	3,74
BAROS				
BAROS	7.823	7.500	15.323	4,77
JAYARAKSA	3.474	3.424	6.898	2,15
JAYAMEKAR	2.480	2.496	4.976	1,55
SUDAJAYAHILIR	3.191	3.122	6.313	1,96
LEMBURSITU				
CIPANENGAH	3.998	3.988	7.986	2,49
SITUMEKAR	2.865	2.891	5.756	1,79
LEMBURSITU	5.399	5.426	10.825	3,37
CIKUNDUL	3.556	3.418	6.974	2,17
SINDANGSARI	2.791	2.802	5.593	1,74

CIBEUREUM				
CIBEUREUM HILIR	6.513	6.313	12.826	3,99
BABAKAN	4.263	4.121	8.384	2,61
SINDANGPALAY	3.559	3.286	6.845	2,13
LIMUSNUNGGAL	5.354	5.275	10.629	3,31
JUMLAH	162.311	159.017	321.328	100

Sumber : DKB Semester II Tahun 2015.



Dari Tabel 3.5 dan Grafik 3.5, terlihat bahwa Penduduk Kota Sukabumi per 31 Desember 2015 yang terbanyak berada di wilayah Kelurahan Cisarua 18.215 (5,67%), disusul Kelurahan Karang Tengah sebanyak 17.925 (5,58%), sedangkan yang terkecil berada di wilayah Kelurahan Gunung Parang sebanyak 4.151 (1,29%), disusul Kelurahan Jayamekar sebanyak 4.976 (1,55%).

3.1.2 Kepadatan Penduduk (*Population Density*)

Kepadatan penduduk disuatu daerah menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk dengan luas daerah yang dinyatakan dengan banyaknya penduduk per km². Kepadatan penduduk berkaitan erat dengan daya dukung (*carrying capacity*) suatu wilayah.

Rasio kepadatan penduduk ini dapat menggambarkan distribusi penduduk yang terkonsentrasi di suatu tempat dan memungkinkan pemerintah mengatasi kepadatan ini misalnya dengan membuat program untuk mengurangi beban kepadatan penduduk.

Kepadatan Penduduk Kota Sukabumi Tahun 2015 dengan jumlah sebanyak 321.328 jiwa dibandingkan Luas Wilayah 48 km² adalah 6.694 artinya tiap 1 km² dihuni oleh penduduk sebanyak 6.693 s.d 6.694 jiwa. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2014 dengan jumlah sebanyak 320.572 jiwa dibandingkan Luas Wilayah 48 km² adalah 6.679 artinya tiap 1 km² dihuni oleh penduduk sebanyak 6.679 s.d 6.680 jiwa, terjadi peningkatan jumlah penduduk sebanyak 15 jiwa yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 dan Tabel 3.6 serta Grafik 3.5 dan Grafik 3.6 di bahwa ini :

Tabel 3.6
Kepadatan Penduduk
Tahun 2014

KECAMATAN/ KELURAHAN	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (jiwa/Km ²)	Rangking
GUNUNG PUYUH	45.234	5,5	8.224	
GUNUNG PUYUH	7.875	0,94	8.378	13
KARAMAT	9.232	1,11	8.317	14
SRIWIDARI	10.568	0,95	11.124	8
KARANGTENGAH	17.559	2,5	7.024	16
CIKOLE	60.760	7,08	8.582	
CIKOLE	5.767	0,79	7.300	17
SELABATU	9.639	0,97	9.937	9
GUNUNG PARANG	4.358	0,64	6.809	20
KEBONJATI	7.702	0,48	16.046	2
CISARUA	17.954	2	8.977	11
SUBANGJAYA	15.340	2,2	6.973	18
CITAMIANG	50.612	4,04	12.528	
CITAMIANG	9.221	0,73	12.632	7
TIPAR	9.542	0,46	20.743	1
GEDONGPANJANG	15.518	1,2	12.932	5
NANGGELENG	7.971	1	7.971	15
CIKONDANG	8.360	0,65	12.862	6
WARUDOYONG	56.047	7,6	7.375	
WARUDOYONG	6.283	0,43	14.612	4
NYOMPLONG	7.674	0,52	14.758	3
DAYEUHLUHUR	14.962	2,33	6.421	21
SUKAKARYA	14.548	3,04	4.786	25
BENTENG	12.580	1,28	9.828	10
BAROS	33.501	6,12	5.474	
BAROS	15.258	1,79	8.524	12
JAYARAKSA	7.072	1,45	4.877	26
JAYAMEKAR	4.849	1,59	3.050	33
SUDAJAYAHILIR	6.322	1,29	4.901	24

LEMBURSITU	36.371	8,89	4.091	
CIPANENGAH	7.926	1,53	5.180	23
SITUMEKAR	5.668	1,54	3.681	30
LEMBURSITU	10.702	3,22	3.324	31
CIKUNDUL	6.611	1,58	4.184	27
SINDANGSARI	5.464	1,02	5.357	22
CIBEUREUM	38.047	8,77	4.338	
CIBEUREUM HILIR	12.805	1,84	6.959	19
BABAKAN	8.163	2,65	3.080	32
SINDANGPALAY	6.659	1,65	4.036	28
LIMUSNUNGGAL	10.420	2,63	3.962	29
JUMLAH	320.572	48	6.679	

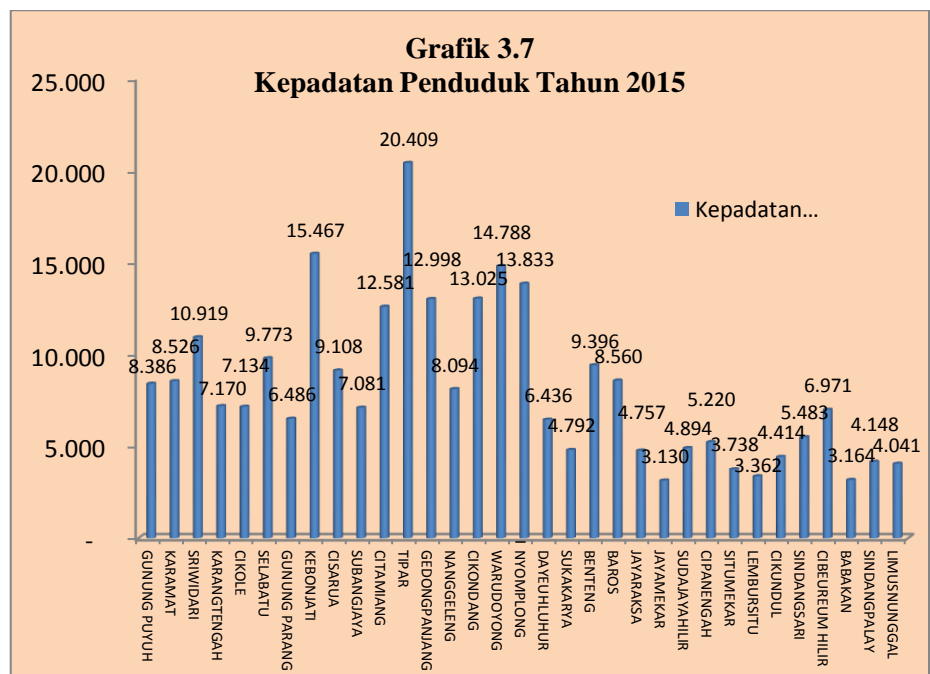
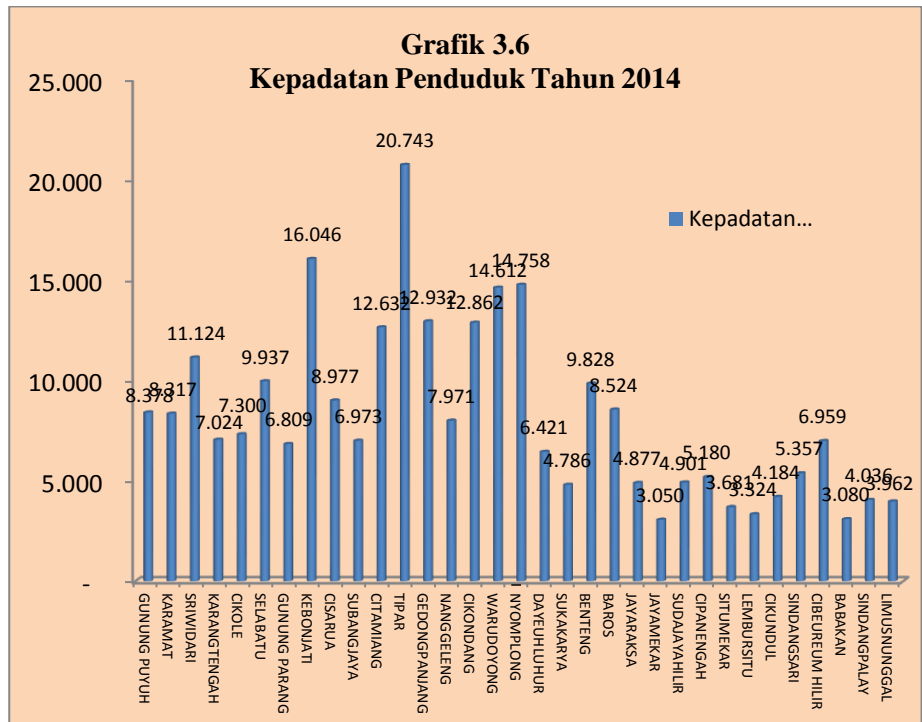
Sumber : DKB Semester I Tahun 2014.

Tabel 3.7
Kepadatan Penduduk Tahun 2015

KECAMATAN/ KELURAHAN	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km²)	Kepadatan (jiwa/Km²)	Rangking
GUNUNG PUYUH	45.645	5,5	8.299	
GUNUNG PUYUH	7.883	0,94	8.386	14
KARAMAT	9.464	1,11	8.526	13
SRIWIDARI	10.373	0,95	10.919	8
KARANGTENGAH	17.925	2,5	7.170	16
CIKOLE	60.484	7,08	8.543	
CIKOLE	5.636	0,79	7.134	17
SELABATU	9.480	0,97	9.773	9
GUNUNG PARANG	4.151	0,64	6.486	20
KEBONJATI	7.424	0,48	15.467	2
CISARUA	18.215	2	9.108	11
SUBANGJAYA	15.578	2,2	7.081	18
CITAMIANG	50.730	4,04	12.557	
CITAMIANG	9.184	0,73	12.581	7
TIPAR	9.388	0,46	20.409	1
GEDONGPANJANG	15.598	1,2	12.998	6
NANGGELENG	8.094	1	8.094	15
CIKONDANG	8.466	0,65	13.025	5

WARUDOYONG	55.141	7,6	7.255	
WARUDOYONG	6.359	0,43	14.788	3
NYOMPLONG	7.193	0,52	13.833	4
DAYEUHLUHUR	14.995	2,33	6.436	21
SUKAKARYA	14.567	3,04	4.792	25
BENTENG	12.027	1,28	9.396	10
BAROS	33.510	6,12	5.475	
BAROS	15.323	1,79	8.560	12
JAYARAKSA	6.898	1,45	4.757	26
JAYAMEKAR	4.976	1,59	3.130	33
SUDAJAYAHILIR	6.313	1,29	4.894	24
LEMBURSITU	37.134	8,89	4.177	
CIPANENGAH	7.986	1,53	5.220	23
SITUMEKAR	5.756	1,54	3.738	30
LEMBURSITU	10.825	3,22	3.362	31
CIKUNDUL	6.974	1,58	4.414	27
SINDANGSARI	5.593	1,02	5.483	22
CIBEUREUM	38.684	8,77	4.411	
CIBEUREUM HILIR	12.826	1,84	6.971	19
BABAKAN	8.384	2,65	3.164	32
SINDANGPALAY	6.845	1,65	4.148	28
LIMUSNUNGGAL	10.629	2,63	4.041	29
JUMLAH	321.328	48	6.694	

Sumber : DKB Semester II Tahun 2015.



Kemudian apabila dilihat kepadatan wilayah per kecamatan, maka kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Citamiang yaitu 12.557, disusul Kecamatan Cikole yaitu 8.543, lalu Kecamatan Gunung Puyuh yaitu 8.299, dan Kecamatan Warudoyong yaitu 7.255. Sedangkan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Lembursitu yaitu 4.177, disusul dengan Kecamatan Cibereum yaitu 4.411, dan Kecamatan Baros yaitu 5.475.

Untuk kelurahan yang paling padat adalah Kelurahan Tipar yaitu 20.409, kemudian Kelurahan Kebonjati yaitu 15.467, lalu Kelurahan Nyomplong yaitu 13.833, sedangkan yang paling jarang penduduknya adalah Kelurahan Jayamekar yaitu 3.130, dan Kelurahan Babakan yaitu 3.164.

3.2. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

3.2.1. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Karakteristik penduduk sangat berpengaruh terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. seperti misalnya masalah angkatan kerja, penyediaan sarana pendidikan dan lain sebagainya. Karakteristik penduduk paling penting adalah umur dan jenis kelamin, atau sering disebut dengan struktur umur dan jenis kelamin. Indikator karakteristik penduduk adalah Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*), Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk.

a. Jumlah Penduduk menurut Struktur Umur.

Penduduk di negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya tergolong ke dalam kategori penduduk “Muda”. Sebaliknya sebagian besar negara-negara maju mempunyai penduduk “Tua”. Dibanyak negara berkembang hampir separuh dari penduduknya adalah di bawah 15 tahun dan kurang dari 3% yang berumur 65 tahun atau lebih. Dibanyak negara maju, kurang dari 30% penduduknya berumur kurang dari 15 tahun dan kurang dari 15% berumur 65 tahun atau lebih.

Tabel 3.8
Komposisi Umur Berdasarkan Struktur Umur Tahun 2014

Golongan Umur	Total (Jiwa)	Keterangan	Komposisi Total	%
0-4	11.806	PENDUDUK MUDA	64.777	20,21
5-9	25.650			
10-14	27.321			
15-19	26.259	PENDUDUK PRODUKTIF	232.879	72,64
20-24	27.786			
25-29	28.182			
30-34	30.611			
35-39	27.008			
40-44	23.923			
45-49	22.288			
50-54	18.941			
55-59	15.932			
60-64	11.949			
65-69	7.840	PENDUDUK TUA	22.916	7,15
70-74	7.697			
>75	7.379			
JUMLAH			320.572	100

Sumber : DKB Semester I Tahun 2014

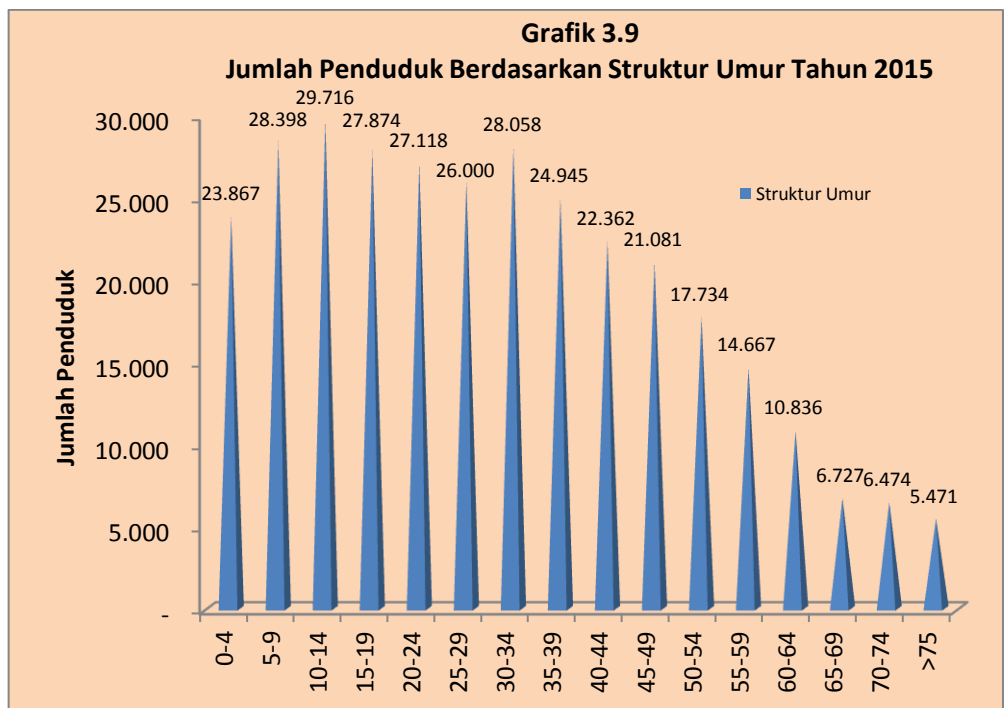
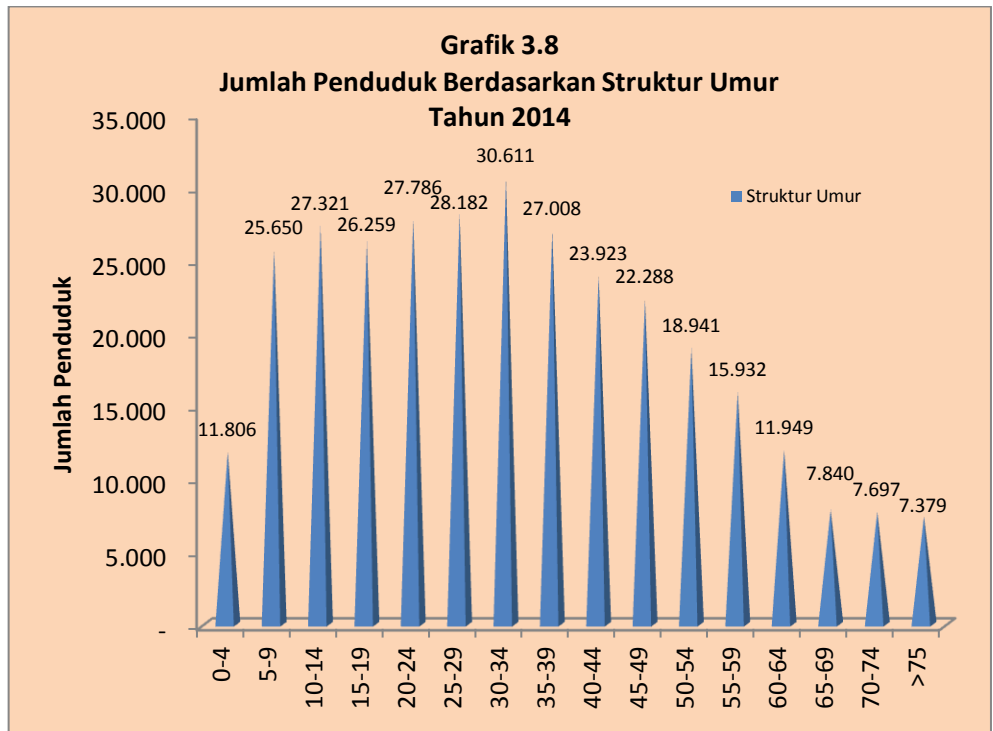
Tabel 3.9
Komposisi Umur Berdasarkan Struktur Umur Tahun 2015

Golongan Umur	Total (Jiwa)	Keterangan	Komposisi Total	%
0-4	23.867	PENDUDUK MUDA	81.981	25,51
5-9	28.398			
10-14	29.716			
15-19	27.874	PENDUDUK PRODUKTIF	220.675	68,68
20-24	27.118			
25-29	26.000			
30-34	28.058			
35-39	24.945			
40-44	22.362			
45-49	21.081			
50-54	17.734			
55-59	14.667			
60-64	10.836			
65-69	6.727	PENDUDUK TUA	18.672	5,81
70-74	6.474			
>75	5.471			
JUMLAH			321.328	100

Sumber : DKB Semester II Tahun 2015

Kalau kita lihat Tabel 3.8 dan Tabel 3.9 di atas menunjukkan bahwa struktur umur penduduk Kota Sukabumi tergolong Penduduk Produktif. Data Tahun 2015 menunjukkan sebesar 68,68% (Kota Maju bukan Kota Berkembang) karena kurang dari 30% penduduk Kota Sukabumi berumur <15 tahun (Penduduk Muda) yaitu 25,51% dan kurang dari 15% berumur 65 tahun atau lebih yaitu 5,81%.

Struktur Umur Penduduk Kota Sukabumi lebih jelas dapat dilihat dalam Grafik 3.8 dan Grafik 3.9.



Jika dilihat Grafik 3.9, maka jumlah penduduk tertinggi Kota Sukabumi berada pada kelompok umur 10-14 tahun yaitu sebanyak 29.716 jiwa, disusul kelompok umur 5-9 tahun yaitu sebanyak 28.398 jiwa. Jumlah penduduk terkecil berada pada kelompok umur 75 tahun ke atas yaitu sebanyak 5.471 jiwa, disusul kelompok umur 70 – 74 tahun sebanyak 6.474 jiwa.

b. Jumlah dan Proporsi Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

Jumlah dan Proporsi Penduduk berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin menggambarkan jumlah penduduk untuk kelompok umur tertentu dan jenis kelamin yang dikaitkan dengan perencanaan pembangunan yang diarahkan sesuai dengan kebutuhan penduduk sebagai pelaku dan sasaran pembangunan (subyek dan obyek pembangunan).

Informasi penduduk berdasarkan umur yang terbagi dalam kelompok umur lima tahunan, sangat penting dan dibutuhkan berkaitan dengan pengembangan kebijakan kependudukan terutama yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar dapat dipandang sebagai beban sekaligus juga modal dalam pembangunan.

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 3.9 di bawah ini.

Tabel 3.10
Jumlah dan Proporsi Penduduk
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Golongan Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)				L & P		Rasio Jenis Kelamin
	L	%	P	%	Jumlah	%	
0-4	6.925	4,26	6.145	3,89	13.070	4,08	112,69
5-9	13.398	8,25	12.294	7,78	25.692	8,01	108,98
10-14	14.275	8,79	13.072	8,27	27.347	8,53	109,20
15-19	13.563	8,35	12.705	8,04	26.268	8,19	106,75
20-24	13.914	8,56	13.994	8,85	27.908	8,71	99,43
25-29	14.496	8,92	13.882	8,78	28.378	8,85	104,42
30-34	15.691	9,66	15.184	9,60	30.875	9,63	103,34
35-39	13.777	8,48	13.245	8,38	27.022	8,43	104,02
40-44	11.939	7,35	11.760	7,44	23.699	7,39	101,52
45-49	10.877	6,69	10.889	6,89	21.766	6,79	99,89
50-54	9.285	5,71	9.255	5,85	18.540	5,78	100,32
55-59	7.977	4,91	7.665	4,85	15.642	4,88	104,07
60-64	6.051	3,72	5.882	3,72	11.933	3,72	102,87
65-69	3.619	2,23	3.983	2,52	7.602	2,37	90,86
70-75	3.587	2,21	4.109	2,60	7.696	2,40	87,30
>75	3.106	1,91	4.028	2,55	7.134	2,23	77,11
JUMLAH	162.480	50,68	158.092	49,32	320.572	100	102,78

Sumber : DKB Semester I Tahun 2014

Tabel 3.11
Jumlah dan Proporsi Penduduk
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Golongan Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)				L & P		Rasio Jenis Kelamin
	L	%	P	%	Jumlah	%	
0-4	12.329	7,60	11.538	7,26	23.867	7,43	106,86
5-9	14.701	9,06	13.697	8,61	28.398	8,84	107,33
10-14	15.339	9,45	14.377	9,04	29.716	9,25	106,69
15-19	14.293	8,81	13.581	8,54	27.874	8,67	105,24
20-24	13.670	8,42	13.448	8,46	27.118	8,44	101,65
25-29	13.332	8,21	12.668	7,97	26.000	8,09	105,24
30-34	14.220	8,76	13.838	8,70	28.058	8,73	102,76
35-39	12.558	7,74	12.387	7,79	24.945	7,76	101,38
40-44	11.179	6,89	11.183	7,03	22.362	6,96	99,96
45-49	10.434	6,43	10.647	6,70	21.081	6,56	98,00
50-54	8.789	5,41	8.945	5,63	17.734	5,52	98,26
55-59	7.425	4,57	7.242	4,55	14.667	4,56	102,53
60-64	5.465	3,37	5.371	3,38	10.836	3,37	101,75
65-69	3.214	1,98	3.513	2,21	6.727	2,09	91,49
70-75	2.989	1,84	3.485	2,19	6.474	2,01	85,77
>75	2.374	1,46	3.097	1,95	5.471	1,70	76,65
JUMLAH	162.311	100	159.017	100	321.328	100	102,07

Sumber : DKB Semester II Tahun 2015.

Dari Tabel 3.11 di atas, dilihat dari struktur umur penduduk Kota Sukabumi per 31 Desember 2015, pada struktur umur muda (0-14 tahun), proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 10-14 tahun yaitu 29.716 jiwa (9,25%) diikuti kelompok umur 5-9 tahun sebanyak 28.398 jiwa (8,84%). Informasi ini dapat menjadi perhatian pemerintah Kota Sukabumi dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan bidang pendidikan yaitu penyediaan sarana dan prasarana pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Dasar (SD).

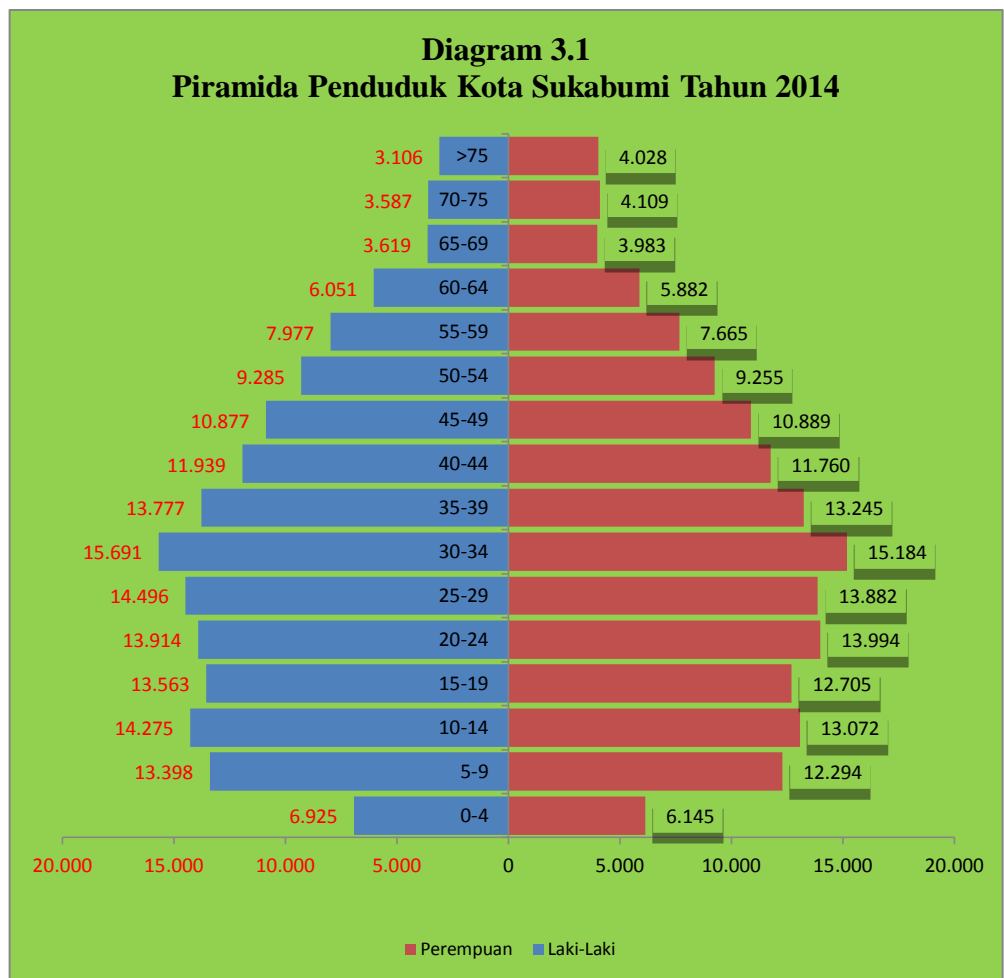
Pada Kelompok Umur Produktif (15-64 tahun), proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 30-34 tahun sebanyak 28.058 jiwa (8,73%), diikuti kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 27.874 jiwa (8,67%). Data ini memberikan informasi kepada pemerintah Kota Sukabumi dalam kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja.

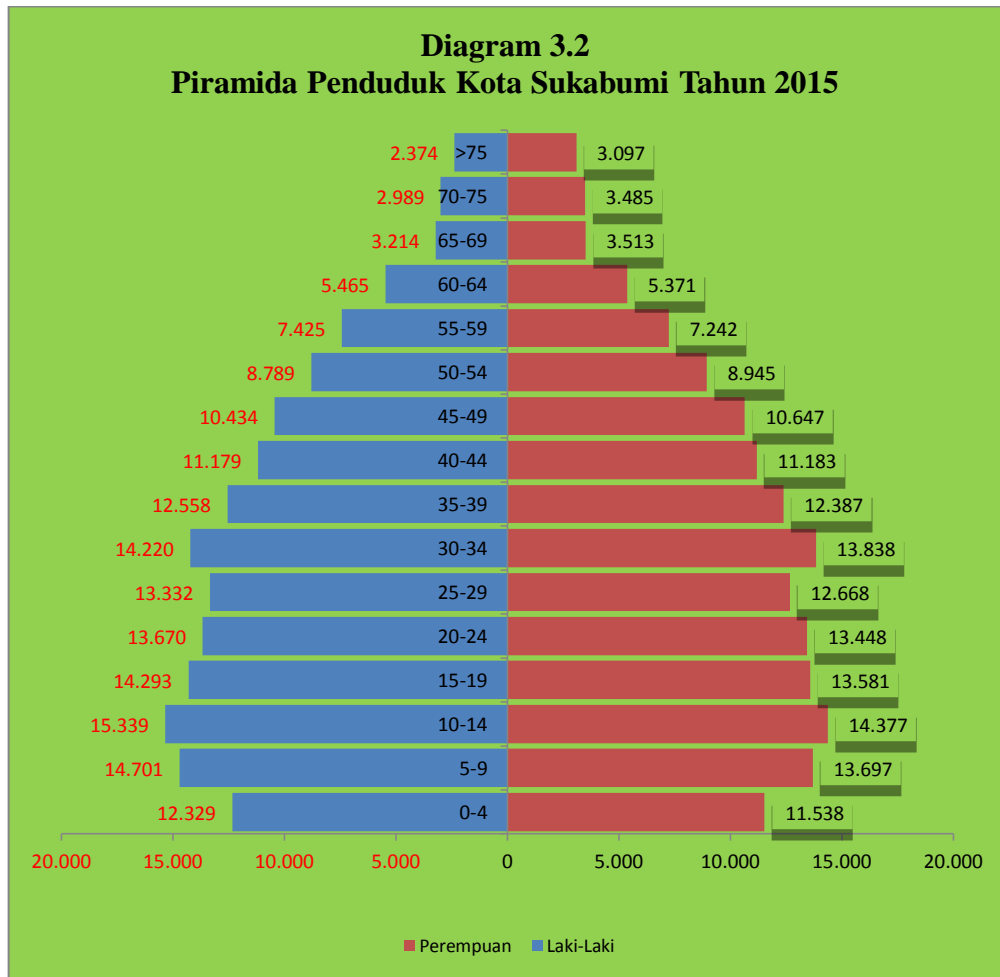
Pemerintah Kota Sukabumi akan memperoleh keuntungan yang besar, jika penduduk usia produktif ini semuanya bisa memperoleh pekerjaan.

Pada Kelompok Umur Tua (65 tahun ke atas), proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 65-69 tahun sebanyak 6.727 jiwa (2,09%).

c. Piramida Penduduk

Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin secara grafik dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Dasar piramida penduduk menunjukkan jumlah penduduk. Badan piramida sebelah kiri menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki, sedangkan badan piramida sebelah kanan menunjukkan banyaknya penduduk perempuan.





Dengan melihat proporsi penduduk laki-laki dan perempuan dalam tiap kelompok umur pada piramida tersebut dapat diperoleh gambaran mengenai sejarah perkembangan penduduk masa lalu dan penduduk masa yang akan datang. Struktur umur penduduk saat ini merupakan hasil kelahiran, kematian, dan migrasi masa lalu dan selanjutnya. Struktur umur penduduk saat ini menentukan perkembangan penduduk masa yang akan datang.

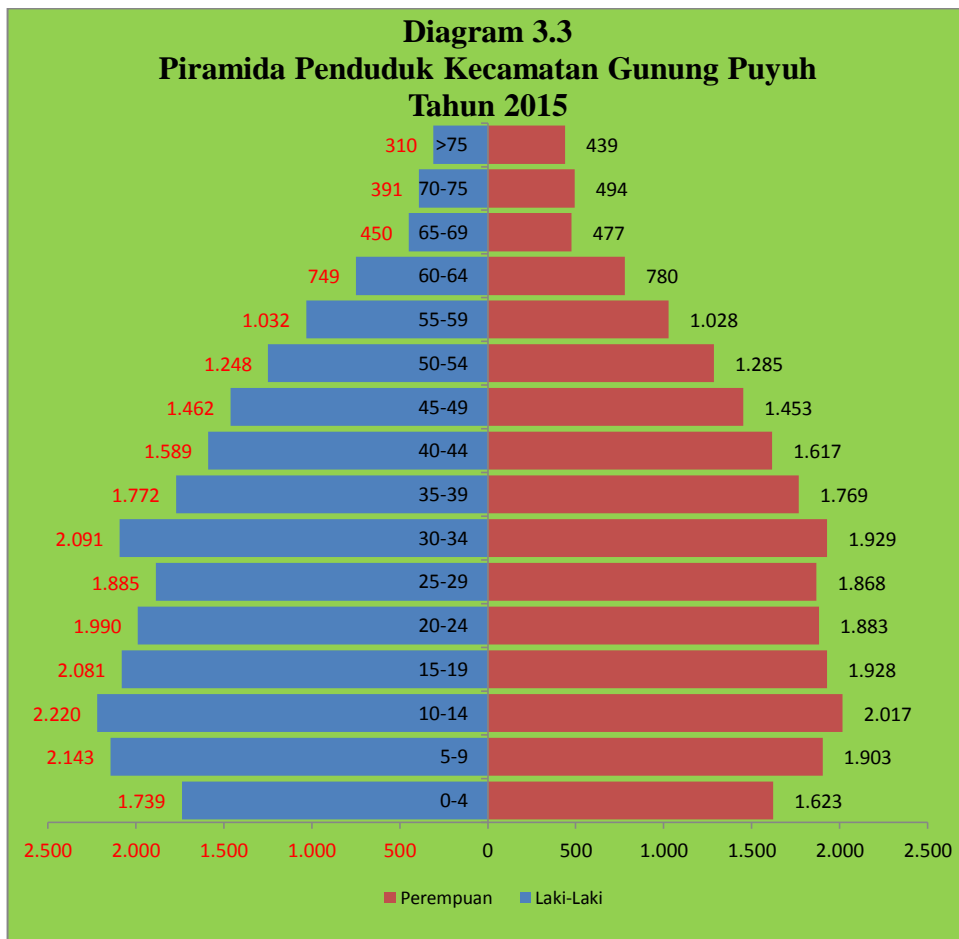
Dengan piramida ini, nampak jelas badan piramida menggelembung di tengah yang berarti bahwa penduduk Kota Sukabumi adalah penduduk produktif.

Untuk memberikan gambaran lebih rinci per kecamatan, akan disajikan tabel dan piramidanya.

Tabel 3.12
Jumlah Penduduk Kecamatan Gunung Puyuh
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Golongan Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)				L & P		Rasio Jenis Kelamin
	L	%	P	%	Jumlah	%	
0-4	1.739	7,51	1.623	7,22	3.362	7,37	107,15
5-9	2.143	9,26	1.903	8,46	4.046	8,86	112,61
10-14	2.220	9,59	2.017	8,97	4.237	9,28	110,06
15-19	2.081	8,99	1.928	8,57	4.009	8,78	107,94
20-24	1.990	8,60	1.883	8,37	3.873	8,49	105,68
25-29	1.885	8,14	1.868	8,30	3.753	8,22	100,91
30-34	2.091	9,03	1.929	8,58	4.020	8,81	108,40
35-39	1.772	7,65	1.769	7,86	3.541	7,76	100,17
40-44	1.589	6,86	1.617	7,19	3.206	7,02	98,27
45-49	1.462	6,31	1.453	6,46	2.915	6,39	100,62
50-54	1.248	5,39	1.285	5,71	2.533	5,55	97,12
55-59	1.032	4,46	1.028	4,57	2.060	4,51	100,39
60-64	749	3,24	780	3,47	1.529	3,35	96,03
65-69	450	1,94	477	2,12	927	2,03	94,34
70-75	391	1,69	494	2,20	885	1,94	79,15
>75	310	1,34	439	1,95	749	1,64	70,62
JUMLAH	23.152	50,72	22.493	49,28	45.645	100	102,93

Sumber : DKB Semester II Tahun 2015



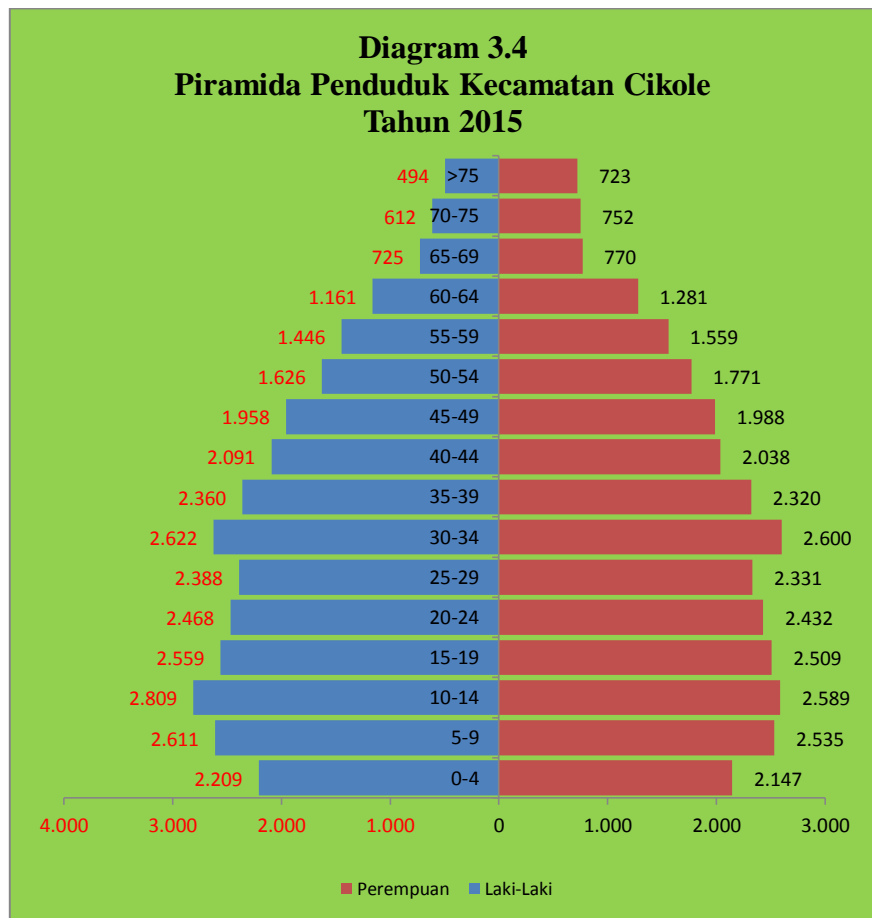
Jika kita lihat Tabel 3.12 dan Diagram 3.3 tergambar bahwa penduduk Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi Tahun 2015, proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 10-14 tahun yaitu 4.237 jiwa (9,78%) terdiri dari laki-laki sebanyak 2.220 jiwa (9,59%) dan perempuan 2.017 jiwa (8,97%) sedangkan proporsi terkecil berada pada kelompok umur di atas 75 tahun yaitu 749 jiwa (1,64%) terdiri dari laki-laki sejumlah 310 jiwa (1,34%) dan perempuan 439 jiwa (1,95%).

Secara keseluruhan penduduk Kecamatan Gunung Puyuh lebih banyak laki-laki dibanding perempuan. Baru pada umur 60 tahun ke atas jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki.

Tabel 3.13
Jumlah Penduduk Kecamatan Cikole
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Golongan Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)				L & P		Rasio Jenis Kelamin
	L	%	P	%	Jumlah	%	
0-4	2.209	7,33	2.147	7,08	4.356	7,20	102,89
5-9	2.611	8,66	2.535	8,35	5.146	8,51	103,00
10-14	2.809	9,32	2.589	8,53	5.398	8,92	108,50
15-19	2.559	8,49	2.509	8,27	5.068	8,38	101,99
20-24	2.468	8,19	2.432	8,01	4.900	8,10	101,48
25-29	2.388	7,92	2.331	7,68	4.719	7,80	102,45
30-34	2.622	8,70	2.600	8,57	5.222	8,63	100,85
35-39	2.360	7,83	2.320	7,65	4.680	7,74	101,72
40-44	2.091	6,94	2.038	6,72	4.129	6,83	102,60
45-49	1.958	6,50	1.988	6,55	3.946	6,52	98,49
50-54	1.626	5,40	1.771	5,84	3.397	5,62	91,81
55-59	1.446	4,80	1.559	5,14	3.005	4,97	92,75
60-64	1.161	3,85	1.281	4,22	2.442	4,04	90,63
65-69	725	2,41	770	2,54	1.495	2,47	94,16
70-75	612	2,03	752	2,48	1.364	2,26	81,38
>75	494	1,64	723	2,38	1.217	2,01	68,33
JUMLAH	30.139	49,83	30.345	50,17	60.484	100	99,32

Sumber : DKB Semester II Tahun 2015.



Jika kita lihat Tabel 3.13 dan Diagram 3.4, tergambar bahwa penduduk Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Tahun 2015, proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 30-34 tahun yaitu 5.222 jiwa (8,63%) terdiri dari laki-laki sebanyak 2.622 jiwa (8,70%) dan perempuan 2.600 jiwa (8,57%) sedangkan proporsi terkecil berada pada kelompok umur di atas 75 tahun yaitu 1.217 jiwa (2,01%) terdiri dari laki-laki 494 jiwa (1,64%) dan perempuan 723 jiwa (2,38%).

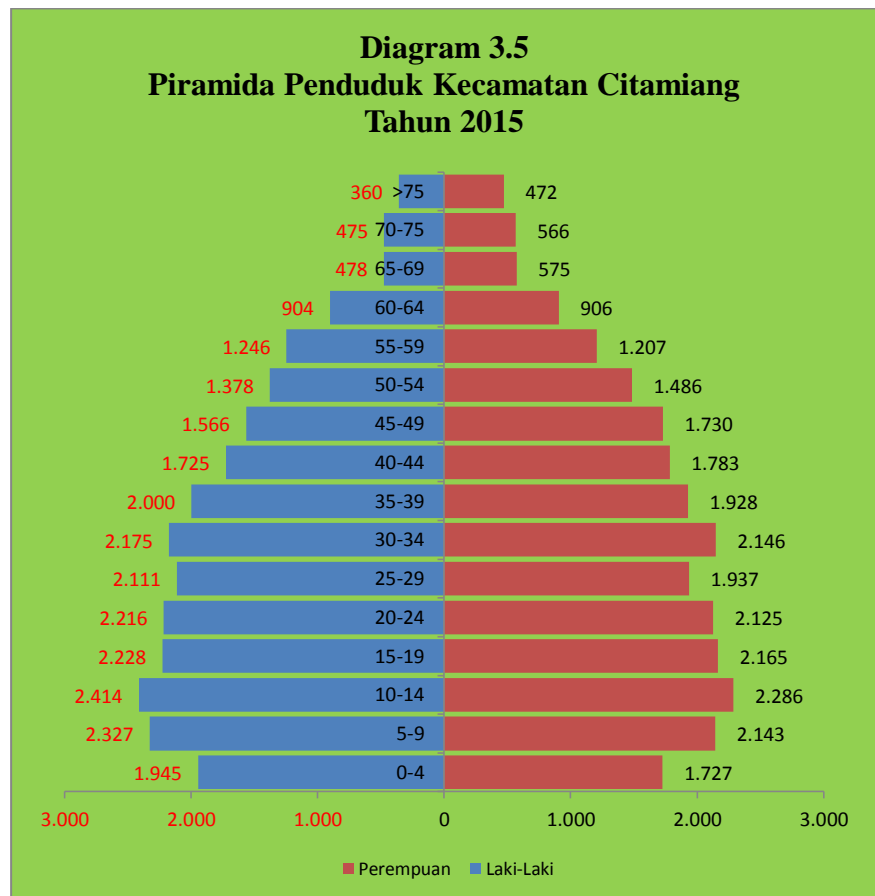
Di Kecamatan Cikole ini adalah satu-satunya kecamatan yang jumlah penduduk perempuannya lebih banyak dibanding laki-laki, yaitu total jumlah penduduk laki-laki sebanyak 30.139 jiwa (49,83%) dan perempuan sebanyak 32.345 jiwa (50,17%).

Tabel 3.14

**Jumlah Penduduk Kecamatan Citamiang
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**

Golongan Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)				L & P		Rasio Jenis Kelamin
	L	%	P	%	Jumlah	%	
0-4	1.945	7,61	1.727	6,86	3.672	7,24	112,62
5-9	2.327	9,11	2.143	8,51	4.470	8,81	108,59
10-14	2.414	9,45	2.286	9,08	4.700	9,26	105,60
15-19	2.228	8,72	2.165	8,60	4.393	8,66	102,91
20-24	2.216	8,67	2.125	8,44	4.341	8,56	104,28
25-29	2.111	8,26	1.937	7,69	4.048	7,98	108,98
30-34	2.175	8,51	2.146	8,52	4.321	8,52	101,35
35-39	2.000	7,83	1.928	7,66	3.928	7,74	103,73
40-44	1.725	6,75	1.783	7,08	3.508	6,92	96,75
45-49	1.566	6,13	1.730	6,87	3.296	6,50	90,52
50-54	1.378	5,39	1.486	5,90	2.864	5,65	92,73
55-59	1.246	4,88	1.207	4,79	2.453	4,84	103,23
60-64	904	3,54	906	3,60	1.810	3,57	99,78
65-69	478	1,87	575	2,28	1.053	2,08	83,13
70-75	475	1,86	566	2,25	1.041	2,05	83,92
>75	360	1,41	472	1,87	832	1,64	76,27
JUMLAH	25.548	50,36	25.182	49,64	50.730	100	101,45

Sumber : DKB Semester II Tahun 2015



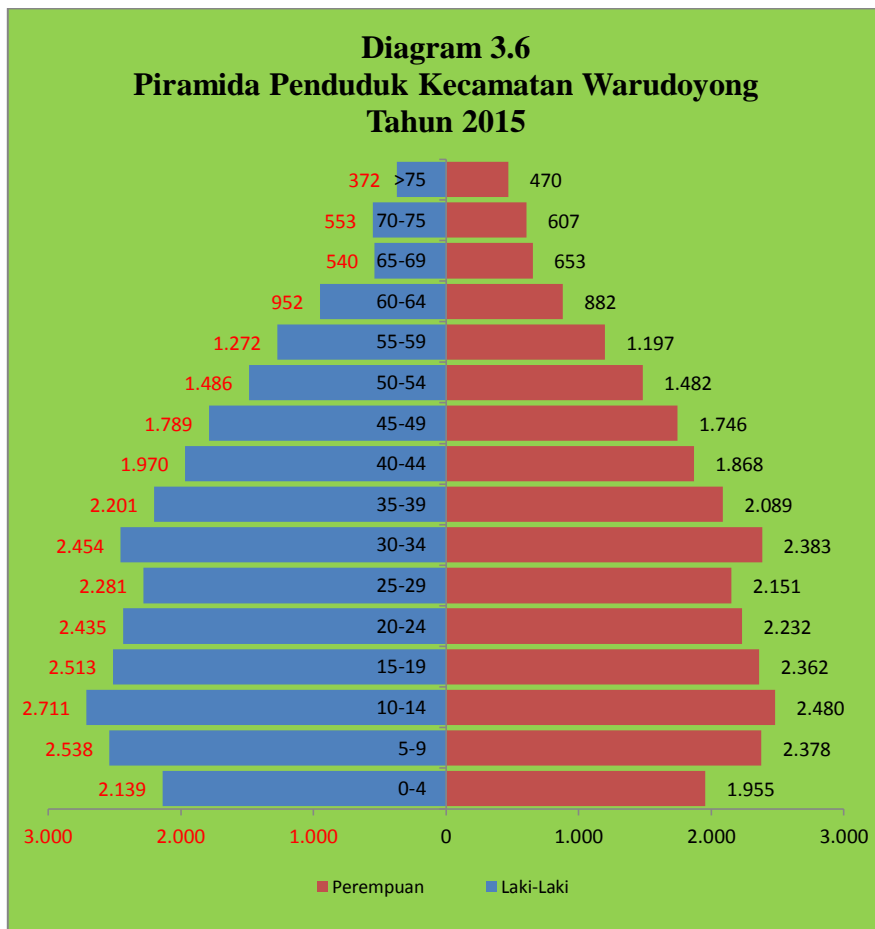
Jika kita lihat Tabel 3.14 dan Diagram 3.5, bahwa penduduk Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi Tahun 2015, proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 10-14 tahun yaitu 4.700 jiwa (9,23%) terdiri dari laki-laki sebanyak 2.414 jiwa (9,45%) dan perempuan 2.286 jiwa (9,08%), sedangkan proporsi terkecil berada pada kelompok umur di atas 75 tahun yaitu 832 jiwa (1,64%) terdiri dari laki-laki 360 jiwa (1,41%) dan perempuan 472 jiwa (1,87%).

Tabel 3.15

**Jumlah Penduduk Kecamatan Warudoyong
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**

Golongan Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)				L & P		Rasio Jenis Kelamin
	L	%	P	%	Jumlah	%	
0-4	2.139	7,58	1.955	7,26	4.094	7,42	109,41
5-9	2.538	9,00	2.378	8,83	4.916	8,92	106,73
10-14	2.711	9,61	2.480	9,21	5.191	9,41	109,31
15-19	2.513	8,91	2.362	8,77	4.875	8,84	106,39
20-24	2.435	8,63	2.232	8,29	4.667	8,46	109,09
25-29	2.281	8,09	2.151	7,99	4.432	8,04	106,04
30-34	2.454	8,70	2.383	8,85	4.837	8,77	102,98
35-39	2.201	7,80	2.089	7,76	4.290	7,78	105,36
40-44	1.970	6,98	1.868	6,94	3.838	6,96	105,46
45-49	1.789	6,34	1.746	6,48	3.535	6,41	102,46
50-54	1.486	5,27	1.482	5,50	2.968	5,38	100,27
55-59	1.272	4,51	1.197	4,44	2.469	4,48	106,27
60-64	952	3,38	882	3,27	1.834	3,33	107,94
65-69	540	1,91	653	2,42	1.193	2,16	82,70
70-75	553	1,96	607	2,25	1.160	2,10	91,10
>75	372	1,32	470	1,74	842	1,53	79,15
JUMLAH	28.206	51,15	26.935	48,85	55.141	100	104,72

Sumber : DKB Semester II Tahun 2015



Jika kita lihat Tabel 3.15 dan Diagram 3.6, tergambar bahwa penduduk Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2015, proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 10-14 tahun yaitu 5.191 jiwa (9,41%) terdiri dari laki-laki sebanyak 2.711 jiwa (9,61%) dan perempuan 2.480 jiwa (9,21%), sedangkan proporsi terkecil berada pada kelompok umur di atas 75 tahun yaitu 842 jiwa (1,53%) terdiri dari laki-laki 372 jiwa (1,32%) dan perempuan 470 jiwa (1,74%).

Tabel 3.16

**Jumlah Penduduk Kecamatan Baros
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**

Golongan Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)				L & P		Rasio Jenis Kelamin
	L	%	P	%	Jumlah	%	
0-4	1.302	7,67	1.229	7,43	2.531	7,55	105,94
5-9	1.528	9,01	1.403	8,48	2.931	8,75	108,91
10-14	1.537	9,06	1.593	9,63	3.130	9,34	96,48
15-19	1.543	9,09	1.396	8,44	2.939	8,77	110,53
20-24	1.505	8,87	1.491	9,01	2.996	8,94	100,94
25-29	1.452	8,56	1.364	8,25	2.816	8,40	106,45
30-34	1.540	9,08	1.500	9,07	3.040	9,07	102,67
35-39	1.268	7,47	1.231	7,44	2.499	7,46	103,01
40-44	1.106	6,52	1.162	7,02	2.268	6,77	95,18
45-49	1.125	6,63	1.193	7,21	2.318	6,92	94,30
50-54	996	5,87	963	5,82	1.959	5,85	103,43
55-59	767	4,52	719	4,35	1.486	4,43	106,68
60-64	505	2,98	414	2,50	919	2,74	121,98
65-69	284	1,67	270	1,63	554	1,65	105,19
70-75	284	1,67	314	1,90	598	1,78	90,45
>75	226	1,33	300	1,81	526	1,57	75,33
JUMLAH	16.968	50,64	16.542	49,36	33.510	100	102,58

Sumber : DKB Semester II Tahun 2015

Diagram 3.7
Piramida Penduduk Kecamatan Baros Tahun 2015



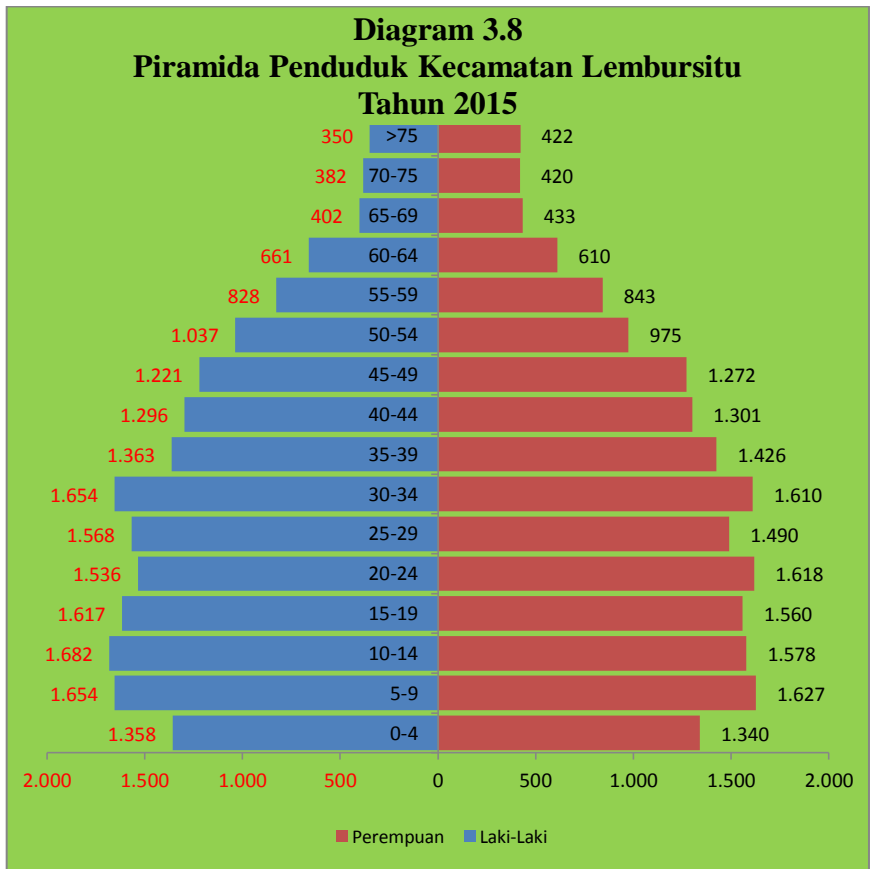
Jika kita lihat Tabel 3.16 dan Diagram 3.7, tergambar bahwa penduduk Kecamatan Baros Kota Sukabumi Tahun 2015, proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 10-14 tahun yaitu 3.130 jiwa (9,34%) terdiri dari laki-laki sebanyak 1.537 jiwa (9,06%) dan perempuan 1.593 jiwa (9,63%), sedangkan proporsi terkecil berada pada kelompok umur di atas 75 tahun yaitu 526 jiwa (1,57%) terdiri dari laki-laki 226 jiwa (1,33%) dan perempuan 300 jiwa (1,81%).

Tabel 3.17

**Jumlah Penduduk Kecamatan Lembursitu
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**

Golongan Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)				L & P		Rasio Jenis Kelamin
	L	%	P	%	Jumlah	%	
0-4	1.358	7,30	1.340	7,23	2.698	7,27	101,34
5-9	1.654	8,89	1.627	8,78	3.281	8,84	101,66
10-14	1.682	9,04	1.578	8,52	3.260	8,78	106,59
15-19	1.617	8,69	1.560	8,42	3.177	8,56	103,65
20-24	1.536	8,25	1.618	8,73	3.154	8,49	94,93
25-29	1.568	8,43	1.490	8,04	3.058	8,24	105,23
30-34	1.654	8,89	1.610	8,69	3.264	8,79	102,73
35-39	1.363	7,32	1.426	7,70	2.789	7,51	95,58
40-44	1.296	6,96	1.301	7,02	2.597	6,99	99,62
45-49	1.221	6,56	1.272	6,87	2.493	6,71	95,99
50-54	1.037	5,57	975	5,26	2.012	5,42	106,36
55-59	828	4,45	843	4,55	1.671	4,50	98,22
60-64	661	3,55	610	3,29	1.271	3,42	108,36
65-69	402	2,16	433	2,34	835	2,25	92,84
70-75	382	2,05	420	2,27	802	2,16	90,95
>75	350	1,88	422	2,28	772	2,08	82,94
JUMLAH	18.609	50,11	18.525	49,89	37.134	100	100,45

Sumber : DKB Semester II Tahun 2015



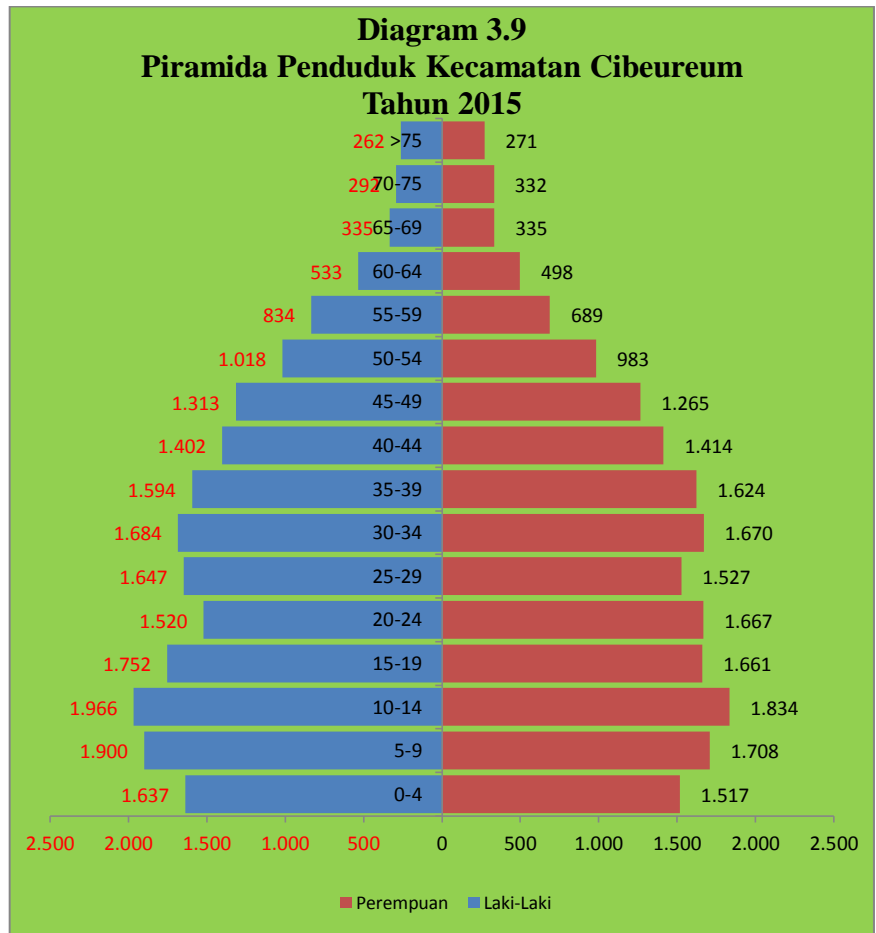
Jika kita lihat Tabel 3.17 dan Diagram 3.8, tergambar bahwa penduduk Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi Tahun 2015, proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 30-34 tahun yaitu 3.264 jiwa (8,79%) terdiri dari laki-laki sebanyak 1.654 jiwa (8,89%) dan perempuan 1.610 jiwa (8,69%), sedangkan proporsi terkecil berada pada kelompok umur di atas 75 tahun yaitu 772 jiwa (2,08%) terdiri dari laki-laki 350 jiwa (1,88%) dan perempuan 422 jiwa (2,28%).

Tabel 3.18

**Jumlah Penduduk Kecamatan Cibureum
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**

Golongan Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)				L & P		Rasio Jenis Kelamin
	L	%	P	%	Jumlah	%	
0-4	1.637	8,31	1.517	7,99	3.154	8,15	107,91
5-9	1.900	9,65	1.708	8,99	3.608	9,33	111,24
10-14	1.966	9,99	1.834	9,66	3.800	9,82	107,20
15-19	1.752	8,90	1.661	8,74	3.413	8,82	105,48
20-24	1.520	7,72	1.667	8,78	3.187	8,24	91,18
25-29	1.647	8,37	1.527	8,04	3.174	8,20	107,86
30-34	1.684	8,55	1.670	8,79	3.354	8,67	100,84
35-39	1.594	8,10	1.624	8,55	3.218	8,32	98,15
40-44	1.402	7,12	1.414	7,44	2.816	7,28	99,15
45-49	1.313	6,67	1.265	6,66	2.578	6,66	103,79
50-54	1.018	5,17	983	5,18	2.001	5,17	103,56
55-59	834	4,24	689	3,63	1.523	3,94	121,04
60-64	533	2,71	498	2,62	1.031	2,67	107,03
65-69	335	1,70	335	1,76	670	1,73	100,00
70-75	292	1,48	332	1,75	624	1,61	87,95
>75	262	1,33	271	1,43	533	1,38	96,68
JUMLAH	19.689	50,90	18.995	49,10	38.684	100	103,65

Sumber : DKB Semester II Tahun 2015



Jika kita lihat Tabel 3.18 dan Diagram 3.9, tergambar bahwa penduduk Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi Tahun 2015, proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 10-14 tahun yaitu 3.800 jiwa (9,82%) terdiri dari laki-laki sebanyak 1.966 jiwa (9,99%) dan perempuan 1.834 jiwa (9,66%), sedangkan proporsi terkecil berada pada kelompok umur di atas 75 tahun yaitu 533 jiwa (1,38%) terdiri dari laki-laki 262 jiwa (1,33%) dan perempuan 271 jiwa (1,43%).

3.2.2 Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)

Rasio Jenis Kelamin menggambarkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk. Data dan informasi rasio jenis kelamin ini berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan berwawasan gender, khususnya yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Selain itu informasi rasio jenis kelamin ini juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam legislatif.

Rasio Jenis Kelamin dinyatakan dalam rumus :

$$\text{Sex Ratio} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Laki-laki}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan}} \times 100$$

Sex Ratio Kota Sukabumi Tahun 2015 dapat kita lihat dalam Tabel 3.11 yaitu 102,07 artinya bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 s.d 103 penduduk laki-laki. Keadaan tersebut masih dalam posisi yang sama dengan *Sex Ratio* Kota Sukabumi Tahun 2014 (Tabel 3.10).

Lebih lanjut kita lihat per kecamatan sesuai dengan Tabel 3.12 s.d Tabel 3.18 sebagai berikut :

- ❖ *Sex Ratio* Penduduk Kecamatan Gunung Puyuh adalah 103,93

Hal ini berarti untuk tiap 100 penduduk perempuan di Kecamatan Gunung Puyuh terdapat 103 s.d 104 penduduk laki-laki.

- ❖ *Sex Ratio* penduduk Kecamatan Cikole adalah 99,32
Hal ini berarti untuk tiap 100 penduduk perempuan di Kecamatan Cikole terdapat 99 s.d 100 penduduk laki-laki.
- ❖ *Sex Ratio* penduduk Kecamatan Citamiang adalah 101,45
Hal ini berarti untuk tiap 100 penduduk perempuan di Kecamatan Citamiang terdapat 101 s.d 102 penduduk laki-laki.
- ❖ *Sex Ratio* penduduk Kecamatan Warudoyong adalah 104,72
Hal ini berarti untuk tiap 100 penduduk perempuan di Kecamatan Warudoyong terdapat 104 s.d 105 penduduk laki-laki
- ❖ *Sex Ratio* penduduk Kecamatan Baros adalah 102,58
Hal ini berarti untuk tiap 100 penduduk perempuan di Kecamatan Baros terdapat 102 s.d 103 penduduk laki-laki.
- ❖ *Sex Ratio* penduduk Kecamatan Lembursitu adalah 100,45
Hal ini berarti untuk tiap 100 penduduk perempuan di Kecamatan Lembursitu terdapat 100 s.d 101 penduduk laki-laki.
- ❖ *Sex Ratio* penduduk Kecamatan Cibeureum adalah 103,65
Hal ini berarti untuk tiap 100 penduduk perempuan di Kecamatan Cibeureum terdapat 103 s.d 104 penduduk laki-laki.

3.2.3. Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Untuk mengetahui rasio ketergantungan, jumlah penduduk yang ada dikelompokkan kedalam 3 (tiga) kelompok umur yaitu :

1. Penduduk Muda (0-14 Tahun), dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomi masih bergantung kepada orang tua atau orang lain.
2. Penduduk Tua (65 tahun ke atas), dianggap sudah tidak produktif lagi.
3. Penduduk Usia Kerja/Produktif adalah penduduk usia 15-64 tahun.

Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun (muda), ditambah dengan penduduk berumur 65 tahun keatas (tua) dibandingkan dengan jumlah penduduk berumur 15 -64 tahun. Rasio ini dapat dilihat berdasarkan umur yakni rasio ketergantungan tua. Rasio ketergantungan ini dapat menggambarkan keadaan ekonomi suatu wilayah secara kasar.

Negara-negara yang sedang berkembang dengan angka fertilitas tinggi akan mempunyai angka beban tanggungan yang tinggi pula, dikarenakan besarnya proporsi anak-anak di dalam penduduk tersebut.

Berdasarkan DKB Semester II Tahun 2015 dapat disajikan rasio ketergantungan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.19

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN (JIWA)		TOTAL (JIWA)	DR
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	GUNUNG PUYUH				45.19
	0 - 14 (Muda)	6.102	5.543	11.645	
	15 - 64 (Produktif)	15.899	15.540	31.439	
	>65 (Tua)	1.151	1.410	2.561	
2	CIKOLE				45.72
	0 - 14 (Muda)	7.629	7.271	14.900	
	15 - 64 (Produktif)	20.679	20.829	41.508	
	>65 (Tua)	1.831	2.245	4.076	
3	CITAMIANG				45.10
	0 - 14 (Muda)	6.686	6.156	12.842	
	15 - 64 (Produktif)	17.549	17.413	34.962	
	>65 (Tua)	1.313	1.613	2.926	
4	WARUDYOYONG				46.09
	0 - 14 (Muda)	7.388	6.813	14.201	
	15 - 64 (Produktif)	19.353	18.392	37.745	
	>65 (Tua)	1.465	1.730	3.195	
5	BAROS				44.19
	0 - 14 (Muda)	4.367	4.225	8.592	
	15 - 64 (Produktif)	11.807	11.433	23.240	
	>65 (Tua)	794	884	1.678	
6	LEMBURSITU				45.70
	0 - 14 (Muda)	4.694	4.545	9.239	
	15 - 64 (Produktif)	12.781	12.705	25.486	
	>65 (Tua)	1.134	1.275	2.409	
7	CIBEUREUM				47.12
	0 - 14 (Muda)	5.503	5.059	10.562	
	15 - 64 (Produktif)	13.297	12.998	26.295	
	>65 (Tua)	889	938	1.827	
KOTA SUKABUMI					45.61
0 - 14 (Muda)		42.369	39.612	81.981	
15 - 64 (Produktif)		111.365	109.310	220.675	
>65 (Tua)		8.577	10.095	18.672	

Rumus Depedensi Ratio :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Muda} + \text{Jumlah Penduduk Tua}}{\text{Jumlah Penduduk PProduktif}} \times k$$

Dari Tabel 3.14 di atas bisa kita lihat angka ketergantungan penduduk Kota Sukabumi sebesar :

$$\begin{aligned} \text{DR} &= \frac{\text{JumlahPendudukMuda} + \text{JumlahPendudukTua}}{\text{JumlahPendudukProduktif}} \times k \\ &= \frac{81.981 + 18.672}{220.675} \times 100 \\ &= 45,61 \end{aligned}$$

Ini berarti bahwa tiap 100 orang produktif harus menanggung 45 s.d 46 orang yang tidak produktif.

Angka Ketergantungan Penduduk (DR) per Kecamatan :

❖ Kecamatan Gunung Puyuh

$$\begin{aligned} &\frac{\text{JumlahPendudukMuda} + \text{JumlahPendudukTua}}{\text{JumlahPendudukProduktif}} \times k \\ &= \frac{11.645 + 2.561}{31.439} \times 100 \\ &= 45.19 \end{aligned}$$

Artinya bahwa tiap 100 orang produktif menanggung 45 s.d 46 orang yang tidak produktif.

❖ Kecamatan Cikole

$$\frac{\text{JumlahPendudukMuda} + \text{JumlahPendudukTua}}{\text{JumlahPendudukProduktif}} \times k$$

$$= \frac{14.900 + 4.076}{41.508} \times 100$$

$$= 45,72$$

Artinya bahwa tiap 100 orang produktif menanggung 45 s.d 46 orang yang tidak produktif.

❖ Kecamatan Citamiang

$$\frac{\text{JumlahPendudukMuda} + \text{JumlahPendudukTua}}{\text{JumlahPendudukProduktif}} \times k$$

$$= \frac{12.842 + 2.926}{34.962} \times 100$$

$$= 45.10$$

Artinya bahwa tiap 100 orang produktif menanggung 45 s.d 46 orang yang tidak produktif.

❖ Kecamatan Warudoyong

$$\frac{\text{JumlahPendudukMuda} + \text{JumlahPendudukTua}}{\text{JumlahPendudukProduktif}} \times k$$

$$= \frac{14.201 + 3.195}{37.745} \times 100$$

$$= 46.09$$

Artinya bahwa tiap 100 orang produktif menanggung 46 s.d 47 orang yang tidak produktif.

❖ Kecamatan Baros

$$\frac{\text{JumlahPendudukMuda} + \text{JumlahPendudukTua}}{\text{JumlahPendudukProduktif}} \times k$$

$$= \frac{8.592 + 1.678}{23.240} \times 100$$

$$= 44,19$$

Artinya bahwa tiap 100 orang produktif menanggung 44 s.d 45 orang yang tidak produktif.

❖ Kecamatan Lembursitu

$$\frac{\text{JumlahPendudukMuda} + \text{JumlahPendudukTua}}{\text{JumlahPendudukProduktif}} \times k$$

$$= \frac{9.239 + 2.409}{25.486} \times 100$$

$$= 45,70$$

Artinya bahwa tiap 100 orang produktif menanggung 45 s.d 46 orang yang tidak produktif.

❖ Kecamatan Cibeureum

$$\frac{\text{JumlahPendudukMuda} + \text{JumlahPendudukTua}}{\text{JumlahPendudukProduktif}} \times k$$

$$= \frac{10.562 + 1.827}{26.295} \times 100$$

$$= 47,12$$

Artinya bahwa tiap 100 orang produktif menanggung 47 s.d 48 orang yang tidak produktif.

Kecamatan yang mempunyai angka ketergantungan paling tinggi adalah Kecamatan Cibeureum. Hal ini disebabkan karena Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) di Kecamatan Cibeureum cukup tinggi dibanding jumlah penduduk Kota Sukabumi yaitu 47,12% dan yang paling kecil rasio ketergantungannya adalah Kecamatan Baros yaitu 44,19%. Namun demikian angka ketergantungan penduduk Kota Sukabumi dari masing-masing kecamatan masih di bawah 50%.

3.3. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

3.3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

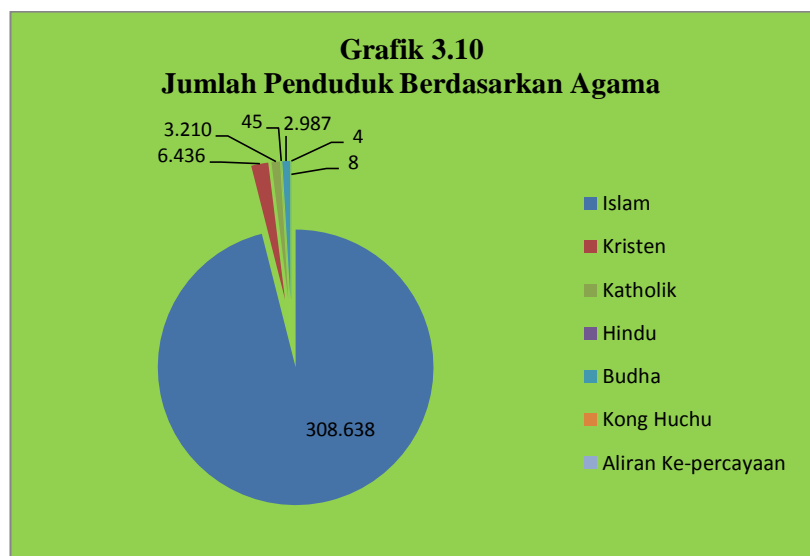
Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama menunjukkan karakteristik penduduk berdasarkan pemeluk agama. Pemerintah Kota Sukabumi dapat menyusun atau merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan fasilitas ibadah, atau program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan beragama.

Tabel 3.20
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

NO	AGAMA	JUMLAH	%
1	Islam	308.638	96,05
2	Kristen	6.436	2
3	Katholik	3.210	1
4	Hindu	45	0,01
5	Budha	2.987	0,93
6	Kong Huchu	4	0
7	Aliran Ke-percayaan	8	0
	JUMLAH	321.328	100

Sumber : DKB Semester II Tahun 2015 Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Pada Tabel 3.20, nampak bahwa dari jumlah penduduk Kota Sukabumi sebesar 321.328, sebanyak 308.638 atau 96,05% beragama Islam, selanjutnya Agama Kristen sebesar 2%, Agama Katholik sebesar 1%, Agama Budha 0,01%, disusul Agama Hindu sebesar 0,93%, Khonghucu dan Kepercayaan sebesar 0%.



Komposisi penduduk berdasarkan agama pada Tahun 2015 tidak jauh berbeda dengan komposisi penduduk berdasarkan agama pada Tahun 2014 yaitu sebanyak 307.046 atau 95,78% beragama Islam, selanjutnya Agama Kristen sebesar 2,12%, Agama Katholik sebesar 1,07%, Agama Budha 0,02%, disusul Agama Hindu sebesar 1%, Khonghucu dan Kepercayaan sebesar 0%.

Tabel 3.21
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama per Kecamatan

NO	KECAMATAN	PERSENTASI AGAMA (JIWA)											JUMLAH PENDUDUK (JIWA)			
		ISLAM %	KRISTEN %	KATHOLIK	HINDU %	BUDHA %	KONG HUCU %	KEPER CAYAAN %	KONG HUCU %	KEPER CAYAAN %	KEPER CAYAAN %	KEPER CAYAAN %				
1	GUNUNG PUYUH	43.850	96,07	2,18	614	1,35	28	0,06	157	0,34		0	0	0	45.645	
2	CIKOLE	55.599	91,92	1,981	1.366	2,26	10	0,02	1.517	2,51	3	0,005	8	0,01	60.484	
3	CITAMIANG	49.147	96,88	862	1,70	366	0,72	0	355	0,70		0	0	50.730		
4	WARUDAYONG	52.876	95,89	986	1,79	413	0,75	1	0,002	864	1,57	1	0,002	0	55.141	
5	BAROS	32.620	97,34	698	2,08	183	0,55	0	9	0,03		0	0	33.510		
6	LEMBURSIJU	36.925	95,44	174	0,47	33	0,09	0	2	0,01		0	0	37.134		
7	CIBEUREUM	37.621	97,25	739	1,91	235	0,61	6	0,02	83	0,21		0	38.684		
	JUMLAH	308.638	96,05	6.436	2,00	3.210	1,00	45	0,01	2.987	0,93	4	0,001	8	0,002	321.328

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DXB) Semester II Tahun 2015 Ditjen Dukcapil Kemendagri

Pada Tabel 3.21 di atas, nampak bahwa :

- ❖ Penduduk yang beragama Islam prosentasi paling banyak berada di Kecamatan Lembursitu (99,40%), baru disusul Kecamatan Baros (97,36%), lalu Kecamatan Cibereum (97,12%).
- ❖ Penduduk yang beragama Kristen prosentasi paling banyak berada di Kecamatan Cikole (3,44%), baru disusul Kecamatan Gunung Puyuh (2,23%), lalu Kecamatan Baros (2,08%).
- ❖ Penduduk yang beragama Khatolik prosentasi paling banyak berada di Kecamatan Cikole (2,35%), baru disusul Kecamatan Gunung Puyuh (1,38%), lalu Kecamatan Warudoyong (0,81%).
- ❖ Penduduk yang beragama Hindu prosentasi paling banyak berada di Kecamatan Gunung Puyuh (0,06%), baru disusul Kecamatan Cikole (0,22%), lalu Kecamatan Warudoyong (0,02%).
- ❖ Penduduk yang beragama Budha prosentasi paling banyak berada di Kecamatan Cikole (2,48%), baru disusul Kecamatan Warudoyong (1,61%), lalu Kecamatan Citamiang (0,77%).

3.3.2 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia serta menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai seseorang diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan orang yang bersangkutan.

Jenjang pendidikan yang digambarkan dalam tabel dibawah ini dapat menggambarkan secara kasar tingkat pendidikan penduduk Kota Sukabumi, namun belum bisa menggambarkan secara jelas dan akurat mengenai jenjang pendidikan penduduk di Kota Sukabumi, karena jumlah yang digambarkan belum bisa diperinci per kelompok umur.

Jumlah penduduk menurut pendidikan akhir disajikan dalam Tabel 3.22 di bawah ini :

Tabel 3.22
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir per Kecamatan

NO	KECAMATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR (JIWA)										JUMLAH PENDUDUK (JIWA)
		Tidak/ Belum Sekolah	Tidak Tamam SD/ Sederajat	Tamat SD/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat	Diploma I/II	Akademi/ Diploma III/S. Muda	Diploma IV/Strata I	Strata II	Strata III	
1	GUNUNG PUYUH	8.505	5.037	8.436	7.272	12.282	589	1.096	2.219	204	5	45.645
2	CIKOLE	10.685	5.799	11.818	9.189	17.091	696	1.654	3.261	279	12	60.484
3	CITAMIANG	10.056	5.309	10.693	8.085	12.914	520	948	2.007	188	10	50.730
4	WARUDONG	9.017	6.070	13.910	8.736	14.334	403	893	1.657	115	6	55.141
5	BAROS	5.648	3.793	9.525	4.854	7.412	296	560	1.270	148	4	33.510
6	LEMBURITU	6.573	4.126	12.729	5.104	6.808	274	379	1.059	80	2	37.134
7	CIBUREUM	6.889	4.384	12.101	5.262	7.327	324	702	1.554	132	9	38.684
JUMLAH		57.373	34.518	79.212	48.502	78.168	3.102	6.232	13.027	1.146	48	321.328

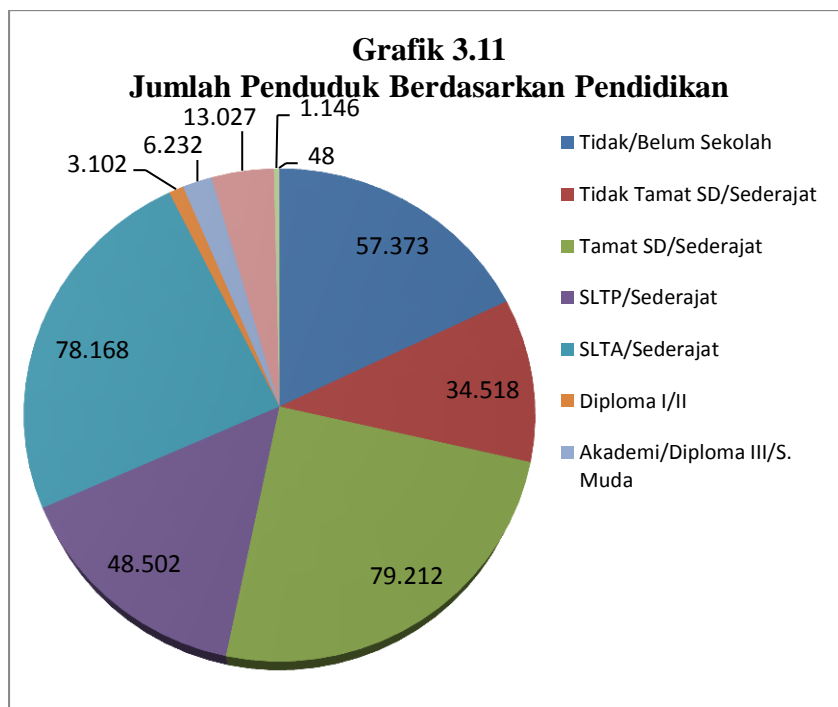
Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2015 Ditjen Dukcapil Kemendagri

Tabel 3.23

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	JIWA	%
1	Tidak/Belum Sekolah	57.373	17,85
2	Tidak Tamat SD/Sederajat	34.518	10,74
3	Tamat SD/Sederajat	79.212	24,65
4	SLTP/Sederajat	48.502	15,09
5	SLTA/Sederajat	78.168	24,33
6	Diploma I/II	3.102	0,97
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	6.232	1,94
8	Diploma IV/Strata I	13.027	4,05
9	Strata II	1.146	0,36
10	Strata III	48	0,01
JUMLAH		321.328	100

Sumber : DKB Semester II Tahun 2015 Ditjen Dukcapil Kemendagri.



Jika kita lihat Tabel 3.22, nampak bahwa penduduk per kecamatan yang tidak/belum sekolah s.d jenjang pendidikan Strata III, terkonsentrasi di Kecamatan Cikole dan disusul Kecamatan Warudoyong menduduki rangking kedua dibanding dengan kecamatan lain.

Dari Tabel 3.23 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Sukabumi yang tidak/belum sekolah sebesar 57.373 jiwa (17,85%) dari 321.328 jiwa penduduk Kota Sukabumi. Angka yang tidak/belum sekolah ini termasuk di dalamnya anak-anak yang belum berusia sekolah maupun penduduk yang memang benar-benar tidak pernah sekolah.

Penduduk Kota Sukabumi yang tidak tamat SD/ sederajat sejumlah 34.518 jiwa (10,74%) dari 321.328 jiwa penduduk Kota Sukabumi, jumlah tersebut termasuk di dalamnya orang-orang/anak-anak yang putus sekolah/drop out SD maupun anak-anak yang berusia SD tapi belum lulus/tamat.

Proporsi terbesar berada pada tingkat pendidikan Tamat SD/ sederajat yaitu 79.212 jiwa (24,65%), lalu tingkat pendidikan SLTA/ sederajat yaitu 78.168 jiwa (24,33%), kemudian tingkat pendidikan SLTP/ sederajat yaitu 48.502 jiwa (15,09%). Selanjutnya proporsi terkecil pada jenjang Strata III sebanyak 48 jiwa (0,01%).

Untuk menggambarkan secara jelas dan akurat mengenai jenjang pendidikan penduduk di Kota Sukabumi, dapat dilihat pada Tabel 3.24 di bawah ini.

Tabel 3.24
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir berdasarkan Usia

NO	USIA	PENDIDIKAN TERAKHIR (JAWA)									
		Tidak Belum Selesai	%	Tidak Tamat SD/ Sederajat	%	Tamat SD/ Sederajat	%	SLTP/ Sederajat	%	SLTA/ Sederajat	%
1	0-14	53540	17,28	21607	6,72	4705	1,46	119	0,04	-	-
2	15-64	1421	0,46	11703	3,64	65429	19,74	46013	14,32	75132	23,41
3	>64	352	0,12	1208	0,38	11078	3,46	2550	0,79	29233	9,91
Jumlah		57.373	17,85	34.518	10,74	79.212	24,65	48.502	15,09	78.168	24,33

NO	USIA	PENDIDIKAN TERAKHIR (JAWA)										JUMLAH PENDUDUK (JAWA)
		Diploma I/II	%	Akademik/ Diploma III/S. Muda	%	Diploma IV/Strata I	%	Strata II	%	Strata III	%	
1	0-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.981
2	15-64	2973	0,93	2681	1,86	12756	3,96	1101	0,34	43	0,01	210.675
3	>64	129	0,04	251	0,08	291	0,09	45	0,01	3	0,00	18.672
Jumlah		3.102	0,97	6.232	1,94	13.027	4,05	1.146	0,36	48	0,01	321.328

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2015 Ditjen Dukcapil Kemendagri

Tabel 3.25
Penduduk Usia Produktif (15-64 Tahun) dengan Pendidikan Rendah

NO	USIA	PENDIDIKAN TERAKHIR (JIWA)							
		Tidak/ Belum Sekolah	%	Tidak Tamat SD/ Sederajat	%	Tamat SD/ Sederajat	%	SLTP/ Sederajat	%
1	15-19	896	0,28	8.324	2,59	6.004	1,87	8.801	2,74
2	20-24	128	0,04	1.238	0,39	3.012	1,36	7.922	2,47
3	25-29	42	0,01	134	0,03	4.320	1,41	3.313	1,63
4	30-34	46	0,01	161	0,03	3.932	1,83	3.469	1,70
5	35-39	51	0,02	183	0,06	6.803	2,12	4.369	1,36
6	40-44	44	0,01	210	0,07	7.068	2,20	4.303	1,34
7	45-49	49	0,02	238	0,08	7.367	2,29	3.417	1,06
8	50-54	60	0,02	384	0,12	7.723	2,40	2.551	0,79
9	55-59	62	0,02	424	0,13	7.328	2,28	2.203	0,69
10	60-64	73	0,02	343	0,11	3.668	1,76	1.671	0,32
JUMLAH		1.451	0,45	1.451	3,64	1.451	19,74	1.451	14,32

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2015 Ditjen Dukcapil Kemendagri

Tabel 3.26
Penduduk Usia Produktif (15-64 Tahun) dengan Pendidikan Tinggi

NO	USIA	PENDIDIKAN TERAKHIR (JIWA)					
		Diploma IV/Strata I	%	Strata II	%	Strata III	%
1	15-19		0,00		0,00		0,00
2	20-24	340	0,17	6	0,00		0,00
3	25-29	1928	0,60	47	0,01	2	0,00
4	30-34	2642	0,82	89	0,03	3	0,00
5	35-39	2173	0,68	144	0,04	3	0,00
6	40-44	1643	0,51	138	0,05	1	0,00
7	45-49	1313	0,47	214	0,07	2	0,00
8	50-54	1268	0,39	210	0,07	7	0,00
9	55-59	743	0,23	177	0,06	20	0,01
10	60-64	282	0,09	36	0,02	1	0,00
JUMLAH		12.736	3,96	1.101	0,34	43	0,01

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2015 Ditjen Dukcapil Kemendagri

3.4 Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dokumen kependudukan sebagai alat bukti autentik seseorang atau pemiliknya yang dapat dipergunakan untuk memperoleh pelayanan publik baik pemerintahan atau swasta seperti pendidikan, kesehatan, perbankan, pertanahan, program bantuan pemerintah, dan lain sebagainya.

Dokumen kependudukan merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap penduduk sesuai dengan domisilinya dan merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan status sipil sebagai warga negara yang juga merupakan penertiban administrasi kependudukan sebagai bahan updating database kependudukan yang valid, akurat dan dinamis untuk digunakan sebagai bahan dalam perencanaan pembangunan.

Adapun dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain : Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Surat Keterangan Pindah/Pindah Datang, dan Akta-Akta Pencatatan Sipil (seperti: Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan lain-lain).

3.4.1 Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga merupakan salah satu dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga, dan merupakan dokumen awal yang harus dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu Keluarga (KK) adalah Kartu Identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Tabel 3.27
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KK

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KEPALA KELUARGA	RASIO	KEPEMILIKAN KK	
					ADA	%
1	GUNUNG PUYUH	45.645	12.914	3,53	12.289	95,16
2	CIKOLE	60.484	17.757	3,41	16.850	94,89
3	CITAMIANG	50.730	14.631	3,47	13.840	94,59
4	WARUDOYONG	55.141	15.961	3,45	15.090	94,54
5	BAROS	33.510	9.662	3,47	9.135	94,55
6	LEMBURSITU	37.134	11.254	3,30	10.580	94,01
7	CIBEUREUM	38.684	10.961	3,53	10.271	93,70
	JUMLAH	321.328	93.140	3,45	88.055	94,54

Sumber : DKB Semester II Tahun 2015 Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Dari Tabel 3.27 terlihat bahwa kepemilikan KK di Kota Sukabumi sebanyak 88.055 (94,55%). Ratio atau perbandingan KK dengan jumlah penduduk sebesar 3,45. Hal ini berarti rata-rata KK berisi 3-4 jiwa. Secara kasar data ini bisa menggambarkan kondisi kepemilikan KK di Kota Sukabumi pada umumnya setiap Kepala Keluarga sudah mempunyai KK.

3.4.2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el merupakan salah satu identitas resmi penduduk dan sebagai identitas diri. KTP-el ini wajib dimiliki oleh semua penduduk yang telah berumur 17 tahun ke atas atau sudah menikah. KTP berfungsi untuk semua urusan yang berkaitan dengan legalitas, misalnya urusan dengan bank, mengurus perkawinan, mengurus sertifikat tanah, mengurus bantuan-bantuan dari pemerintah, dan lain-lain.

Tabel 3.28
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP-el

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KEPALA KELUARGA	RASIO	KEPEMILIKAN KTP-el		
					WAJIB KTP-el	ADA	%
1	GUNUNG PUYUH	45.645	12.914	3,53	32.401	31.042	95,81
2	CIKOLE	60.484	17.757	3,41	43.537	43.267	99,38
3	CITAMIANG	50.730	14.631	3,47	36.117	33.787	93,55
4	WARUDOYONG	55.141	15.961	3,45	38.989	35.150	90,15
5	BAROS	33.510	9.662	3,47	23.798	21.965	92,30
6	LEMBURSITU	37.134	11.254	3,30	26.643	23.623	88,66
7	CIBEUREUM	38.684	10.961	3,53	26.720	23.654	88,53
	JUMLAH	321.328	93.140	3,45	228.205	212.488	93,11

Sumber : DKB Semester II Tahun 2015 Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Tabel 3.28 menunjukkan bahwa prosentasi kepemilikan KTP Tahun 2015 sebesar 93,11% dari wajib KTP sebanyak 228.205 orang, sedangkan prosentasi kepemilikan KTP pada tahun 2014 sebesar 89,93%, berarti terjadi kenaikan sebesar 4,08%.

Peningkatan tersebut merupakan upaya petugas dalam melaksanakan stelsel aktif pelayanan dokumen kependudukan melalui pelayanan keliling/jemput bola (jempol) pemukiman/anak sekolah/aki nini/perusahaan.

Dengan adanya perekaman KTP-el diharapkan data kependudukan akan lebih akurat dan terjamin ketunggalannya, sehingga tidak terjadi lagi penduduk memiliki KTP diberbagai tempat atau lebih dari satu KTP.

3.4.3 Kepemilikan Akta Kelahiran

Akta Kelahiran merupakan salah satu dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh setiap penduduk. Akta Kelahiran ini merupakan bukti status keperdataan seseorang berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan asal-usul seseorang, kapan dan dimana seseorang dilahirkan.

Tabel 3.29
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	
			ADA	%
1	GUNUNG PUYUH	45.645	42.120	92,28
2	CIKOLE	60.484	55.910	92,44
3	CITAMIANG	50.730	46.812	92,28
4	WARUDOYONG	55.141	50.947	92,39
5	BAROS	33.510	30.949	92,36
6	LEMBURSITU	37.134	34.159	91,99
7	CIBEUREUM	38.684	35.549	91,90
JUMLAH		340.719	321.328	92,26

Sumber : DKB Semester II Tahun 2015 Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Kepemilikan Akta Kelahiran Kota Sukabumi Tahun 2015 sebanyak 92,26% dari jumlah penduduk sebanyak 321.328 jiwa. Kepemilikan Akta Kelahiran tertinggi berada di Kecamatan Cikole sebesar 55.910 jiwa (92,44%), sedangkan kepemilikan Akta Kelahiran terendah berada di Kecamatan Cibeureum sebesar 35.549 jiwa (91,90%).

Tabel 3.30
Jumlah Penduduk Usia 0-18 Tahun
Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran

NO	KECAMATAN	PENDUDUK USIA 0-18 Thn (JIWA)	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	
			ADA	%
1	GUNUNG PUYUH	14.842	9.599	64,67
2	CIKOLE	18.943	11.040	58,28
3	CITAMIANG	16.353	11.076	67,73
4	WARUDOYONG	18.089	9.556	52,83
5	BAROS	10.898	5.420	49,73
6	LEMBURSITU	11.747	6.303	53,66
7	CIBEUREUM	13.282	7.950	59,86
JUMLAH		104.154	60.944	58,51

Sumber : DKB Semester II Tahun 2015 Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Namun apabila dilihat pada Tabel 3.30 kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-18 tahun masih terlihat rendah yaitu sebesar 58,51%. Hal tersebut dikarenakan pencatatan akta kelahiran yang diterbitkan sebelum tahun 2013 tidak menggunakan aplikasi SIAK, sehingga datanya tidak terekam dalam database kependudukan. Untuk itu dibutuhkan updating/konversi data guna melengkapi biodata penduduk yang sudah ada dalam *Dabase* SIAK.

3.4.4 Kepemilikan Akta Perkawinan

Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya perkawinan, khusus untuk penduduk yang beragama Islam wajib dilaporkan kepada KUA Kecamatan.

Akta perkawinan atau surat nikah merupakan legalitas hukum status perkawinan seseorang, apakah yang bersangkutan berstatus kawin, belum kawin, cerai mati, atau cerai hidup.

Tabel 3.31
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan
Akta Perkawinan menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	STATUS PERKAWINAN	MEMILIKI AKTA	TIDAK MEMILIKI AKTA	%
1	GUNUNGPUYUH	21.034	12.173	8.635	57,87
2	CIKOLE	27.693	13.052	14.631	47,13
3	CITAMIANG	22.956	15.037	7.915	65,50
4	WARUDOYONG	25.162	9.950	15.200	39,54
5	BAROS	15.628	5.283	10.342	33,80
6	LEMBURSIU	18.262	7.008	11.250	38,37
7	CIBEUREUM	18.057	7.597	10.451	42,07
	JUMLAH	148.792	70.100	78.424	47,11

Sumber : DKB Semester II Tahun 2015 Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Tabel 3.32
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan
Akta Perkawinan menurut Umur

KELOMPOK UMUR	STATUS PERKAWINAN	MEMILIKI AKTA	TIDAK MEMILIKI AKTA	%
15-19	307	153	154	49,84
20-24	5.042	2.279	2.758	45,20
25-29	13.693	6.343	7.317	46,32
30-34	21.023	10.170	10.796	48,38
35-39	21.537	10.877	10.620	50,50
40-44	19.924	10.040	9.841	50,39
45-49	18.621	9.451	9.149	50,75
50-54	15.767	7.611	8.126	48,27
55-59	12.461	5.764	6.683	46,26
60-64	8.819	3.744	5.063	42,45
65-69	4.974	1.849	3.122	37,17
70-74	3.426	1.048	2.372	30,59
>=75	3.198	771	2.423	24,11
JUMLAH	148.792	70.100	78.424	47,11

Sumber : DKB Semester II Tahun 2015 Ditjen Dukcapil Kemendagri.

3.4.5 Kepemilikan Akta Perceraian

Akta perceraian atau surat cerai merupakan legalitas hukum status perkawinan seseorang yang telah berpisah dengan pasangan perkawinan/pernikahannya.

Apabila kita cermati pada Tabel 3.33 di bawah ini, 856 (4,29%) dari sejumlah 19.967 penduduk Kota Sukabumi yang status perkawinannya cerai yang memiliki Akta Perceraian atau surat cerai. Hal tersebut dikarenakan banyak penduduk yang sudah bercerai/berpisah dengan pasangan hidupnya, akan tetapi tidak melaporkan peristiwa kependudukannya.

Tabel 3.33
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan
Akta Perceraian menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	STATUS CERAI	MEMILIKI AKTA	TIDAK MEMILIKI AKTA	%
1	GUNUNGPUYUH	2.562	242	2.317	9,45
2	CIKOLE	4.119	173	3.942	4,20
3	CITAMIANG	3.488	147	3.340	4,21
4	WARUDOYONG	3.355	80	3.272	2,38
5	BAROS	2.026	71	1.955	3,50
6	LEMBURSITU	2.338	69	2.267	2,95
7	CIBEUREUM	2.079	74	2.002	3,56
		19.967	856	19.095	4,29

Sumber : DKB Semester II Tahun 2015 Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Tabel 3.34
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan
Akta Perceraian menurut Umur

KELOMPOK UMUR	STATUS CERAI	MEMILIKI AKTA	TIDAK MEMILIKI AKTA	%
15-19	3	2	1	66,67
20-24	52	8	44	15,38
25-29	283	49	234	17,31
30-34	750	111	638	14,80
35-39	1.103	115	986	10,43
40-44	1.418	138	1.280	9,73
45-49	1.798	115	1.682	6,40
50-54	2.051	88	1.962	4,29
55-59	2.324	74	2.247	3,18
60-64	2.370	61	2.304	2,57
65-69	2.019	35	1.983	1,73
70-74	2.113	30	2.082	1,42
>=75	3.683	30	3.652	0,81
	19.967	856	19.095	4,29

Sumber : DKB Semester II Tahun 2015 Ditjen Dukcapil Kemendagri.

BAB IV

KUALITAS PENDUDUK

4.1 Indikator Kesehatan

4.1.1 Kelahiran (*Fertilitas*)

Kelahiran (*Fertilitas*) merupakan salah satu indikator kualitas penduduk, karena indikator kelahiran ini berguna untuk menentukan kebijakan dan perencanaan program pembangunan sosial terutama kesejahteraan ibu dan anak.

Tinggi rendahnya kelahiran dalam suatu penduduk erat hubungannya dan tergantung pada struktur umur, banyaknya perkawinan, umur pada waktu kawin, penggunaan alat kontrasepsi, pengangguran, tingkat pendidikan, status pekerjaan wanita serta pembangunan ekonomi. Kelahiran yang dimaksud di sini termasuk di dalamnya adalah Lahir Mati.

Lahir Mati adalah kematian yang terjadi pada bayi yg dilahirkan (setelah cukup masanya umur kandungan 7 bulan atau lebih) tanpa ada tanda-tanda kehidupan.

Pada Tahun 2015 di Kota Sukabumi terdapat 6.292 Ibu Bersalin. Dari data tersebut dapat dihitung Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate*) dan Angka Fertilitas Umum (*General Fertility Rate/GFR*).

a. Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate*)

Angka Kelahiran Kasar (*CBR*) menunjukkan jumlah kelahiran per 1000 penduduk dalam suatu periode tertentu (biasanya satu tahun).

Angka ini diperoleh dengan membagi jumlah kelahiran yang terjadi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.

Rumusnya :

$$CBR = \frac{B}{P} \times k$$

Keterangan :

B = Jumlah kelahiran pada tahun tertentu

(Berdasarkan data Dinkes, Jumlah Kelahiran tahun 2013 adalah 7.304)

P = Jumlah penduduk pada pertengahan tahun

(Berdasarkan SIAK, Jumlah Penduduk Bulan Desember 2013 adalah 342.086)

k = 1000

CBR Kota Sukabumi Tahun 2015 adalah :

$$6.929 / 321.328 \times 1000 = 21,56$$

Angka ini mengandung arti bahwa dari 1000 penduduk terjadi kelahiran 22 kelahiran.

b. Angka Fertilitas Umum (*General Fertility Rate/GFR*)

Angka Fertilitas Umum (*General Fertility Rate/GFR*) menunjukkan jumlah kelahiran per 1000 perempuan dalam usia reproduksi (15 - 49 tahun) dalam suatu periode tertentu.

Rumusnya :

$$GFR = \frac{B}{Pf (15 - 49)} \times k$$

Keterangan:

B = Jumlah Kelahiran

Pf (15-49) = Jumlah Wanita umur 15 – 49 Tahun

k = 1000

GFR Kota Sukabumi pada Tahun 2014 adalah :

$$\frac{6.929}{87.702} \times 1000 = 79$$

Angka ini menunjukkan bahwa dari 1000 wanita usia 15 - 49 tahun terdapat 79 kelahiran.

c. Angka Fertilitas Total (*Total Fertility Rate/TFR*)

Yang dimaksud Angka Fertilitas Total (*Total Fertility Rate/TFR*) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sampai dengan akhir masa reproduksinya.

Angka ini diperoleh dengan menjumlahkan angka fertilitas menurut umur (*ASFR*). Dalam buku ini *TFR* belum bisa disajikan karena data banyaknya kelahiran menurut umur dari wanita yang berada dalam kelompok umur belum bisa diketahui.

4.1.2 Kematian (*Mortalitas*)

Kematian (*Mortalitas*) merupakan salah satu komponen demografi yang dapat mempengaruhi perubahan jumlah penduduk.

Kematian seseorang dalam suatu penduduk dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Tinggi rendahnya angka kematian akan dipengaruhi oleh struktur umur, jenis kelamin, jenis pekerjaan, status sosial ekonomi serta keadaan lingkungan dimana mereka berada (misalnya taraf hidup dan perawatan kesehatan).

a. Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate*)

Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate*) adalah angka yang menunjukkan jumlah kematian per 1000 penduduk dalam periode tertentu.

b. Angka Kematian menurut Umur (*Age Specific Death Rate*)

Angka Kematian menurut Umur (*Age Specific Death Rate*) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian pada kelompok umur tertentu per 1000 penduduk dalam kelompok umur yang sama.

Angka ini sebenarnya bisa menunjukkan hasil yang lebih teliti dibandingkan kematian kasar, akan tetapi di dalam buku ini belum bisa disajikan karena data banyaknya kematian menurut umur yang berada dalam kelompok umur belum ada.

c. Angka Kematian Ibu/AKI (*Maternal Mortality Rate*)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator yang menentukan Indeks Kesehatan dalam

menghasilkan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Indeks*). Kematian ibu pada tahun 2015 berjumlah 8 (delapan) orang. 7 (tujuh) kasus kematian diantaranya terjadi di fasilitas rujukan (Rumah Sakit) dan 1 (satu) kasus kematian terjadi di rumah (pasca rawat). Capaian ini termasuk kedalam kategori baik, mengingat Angka Kematian Ibu tahun 2015 ini masih di bawah target Nasional. Target kematian ibu Nasional (2019) adalah sebesar 306/100.000 Kelahiran Hidup. Apabila dikonversikan ke dalam Angka Kematian Ibu dengan jumlah Kelahiran Hidup sebanyak 6284, maka Angka Kematian Ibu di Kota Sukabumi adalah sebesar 127/100.000 Kelahiran Hidup.

Berdasarkan wilayah kerja Kecamatan, kematian ibu menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Jumlah Kematian Ibu Menurut Kelompok Umur per Kecamatan di Kota Sukabumi Tahun 2015

No	Kecamatan	Lahir Hidup	Kematian Ibu									
			Ibu Hamil			Ibu Bersalin			Ibu Nifas			
			< 20 thn	20-34 thn	≥35 thn	< 20 thn	20-34 thn	≥35 thn	< 20 thn	20-34 thn	≥35 thn	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Baros	646	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2	Lembursitu	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cibeureum	743	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
4	Citamiang	1,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	Warudoyong	1,147	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
6	Gunungpuyuh	855	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
7	Cikole	1,147	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Jumlah (Kota)		6,284	0	0	0	0	2	0	0	0	3	3

Sumber : Bidang Kesga Dinas Kesehatan Kota Sukabumi

d. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi adalah jumlah kematian bayi sebelum mencapai usia tepat satu tahun per 1.000 Kelahiran Hidup. Dengan 50 kasus kematian dari 6.284 Kelahiran Hidup, maka Angka Kematian Bayi tahun 2015 adalah sebesar 7,96/1000 Kelahiran Hidup.

Kematian bayi pada masa neonatal (usia 0-28 hari) sebanyak 37 kasus, sedangkan kematian pada masa usia 29 hari s.d. 11 bulan sebanyak 13 kasus. Asfiksia menjadi penyebab kematian terbesar pada masa neonatal yaitu sebesar 16 kasus (43,2%), kemudian Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 11 kasus (29,7%), Sepsis 6 kasus (16,2%), Pneumonia 2 kasus (5,4%). Kelainan Kongenital, Dehidrasi, Icterus, dan Kelainan Saluran Cerna masing-masing 1 kasus.

Sementara Diare Dehidrasi Berat menjadi penyebab kematian terbanyak pada kasus kematian usia 29 hari – 11 bulan dengan 4 kasus kematian, kemudian Pneumonia sebanyak 3 kasus, dan Gizi Buruk, Meningitis, Sepsis, Aspirasi ASI, Kelainan Kongenital, Kelainan Kulit masing-masing 1 kasus.

Dari 50 kasus kematian, 46 kasus terjadi di Fasilitas Kesehatan Rujukan (Rumah Sakit), 3 kasus terjadi di rumah dan 1 kasus terjadi dalam perjalanan menuju Rumah Sakit.

Kasus kematian neonatal, bayi dan balita menurut jenis kelamin dan kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Jumlah Kematian Neonatal, Bayi & Balita
Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan
di Kota Sukabumi Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Kematian											
		Laki-laki				Perempuan				Laki-laki + Perempuan			
		Neo natal	Bayi ^a	Anak Balita	Balita	Neo natal	Bayi ^a	Anak Balita	Balita	Neo natal	Bayi ^a	Anak Balita	Balita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Baros	0	0	1	1	1	2	0	2	1	2	1	3
2	Lembursitu	3	4	0	4	2	4	0	4	5	8	0	8
3	Cibeureum	5	5	0	5	2	2	0	2	7	7	0	7
4	Citamiang	0	0	0	0	3	3	1	4	3	3	1	4
5	Warudoyong	4	5	0	5	4	6	0	6	8	11	0	11
6	Gunungpuyuh	1	4	0	4	3	3	1	4	4	7	1	8
7	Cikole	6	7	1	8	3	5	0	5	9	12	1	13
Jumlah (Kota)		19	25	2	27	18	25	2	27	37	50	4	54

Sumber : Bidang Kesga Dinas Kesehatan Kota Sukabumi

e. Cakupan Kunjungan Bayi

Kunjungan Bayi adalah cakupan kunjungan bayi yang mendapat pelayanan paripurna minimal 4 kali yaitu 1 kali pada usia 29 hari - 2 bulan, 1 kali pada usia 3-5 bulan, 1 kali pada usia 6-8 bulan, dan 1 kali pada usia 9-11 bulan sesuai standar. Cakupan ini untuk mengetahui efektifitas, continuum of care dan kualitas pelayanan kesehatan bayi. Dihitung dengan membandingkan jumlah bayi yang mendapat pelayanan minimal 4 kali dengan jumlah seluruh sasaran bayi di suatu wilayah dalam waktu tertentu.

Cakupan kunjungan bayi tahun 2015 sebesar 96.95 % atau 5.819 bayi dari 6.002 bayi lahir hidup, dengan demikian telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 86%. Capaian ini telah mengalami peningkatan jika dibandingkan capaian tahun 2014 yaitu sebesar 92.16% dan tahun 2013 sebesar 88.05 %. Peningkatan pencapaian ini disebabkan oleh sinergitas, koordinasi dan pencapaian program yang sudah semakin baik sehingga berpengaruh terhadap pencapaian peningkatan kunjungan bayi.

f. **Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)**

Dari 33 kelurahan yang ada, seluruhnya termasuk kategori UCI artinya bahwa kelurahan tersebut telah melaksanakan imunisasi kepada 80% sasaran imunisasi. Indikator yang digunakan adalah Imunisasi BCG, DPT-Hb3, Polio 4 dan Campak. Imunisasi merupakan langkah preventif untuk meminimalisasi terjadinya kondisi sakit pada anak. Semakin banyak kelurahan yang masuk kategori UCI maka akan semakin besar perlindungan terhadap balita dari penyakit. Tahun sebelumnya terdapat satu kelurahan yaitu Subangjaya yang belum UCI, sehingga realisasi hanya 97%. Pada tahun 2015, Kelurahan tersebut termasuk kedalam kategori UCI. Strategi yang dilakukan petugas diantaranya adalah sweeping langsung terhadap anak bayi dan balita yang menjadi sasaran imunisasi, digerakannya kembali masyarakat peduli imunisasi juga optimalisasi peran pengawas/wakil supervisor (wasor) imunisasi yang terus memantau dan mengevaluasi capaian program secara rutin.

Cakupan Kelurahan UCI menurut Kecamatan Tahun 2015, dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization*
per Kecamatan di Kota Sukabumi Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Kelurahan UCI	% Kelurahan UCI
1	2	3	4	5
1	Baros	4	4	100.0
2	Lembursitu	5	5	100.0
3	Cibeureum	4	4	100.0
4	Citamiang	5	5	100.0
5	Warudoyong	5	5	100.0
6	Gunungpuyuh	4	4	100.0
7	Cikole	6	6	100.0
Jumlah (Kota)		33	33	100.0

Sumber : Bidang P2PL Dinas Kesehatan Kota Sukabumi

g. **Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan**

Selama tahun 2015, jumlah balita gizi buruk sebanyak 29 balita yang keseluruhannya mendapatkan penanganan sesuai standar (100%).

Dari jumlah 29 balita gizi buruk tersebut, sebanyak 11 balita masih mengalami gizi buruk sampai akhir desember 2015. 17 balita meningkat statusnya menjadi balita gizi kurang dan 1 balita meninggal dengan penyakit penyerta yaitu Pneumonia.

Kasus balita gizi buruk ini tersebar di 10 wilayah kerja Puskesmas. Jumlah terbanyak terdapat di wilayah kerja Puskesmas Sukabumi dengan 9 kasus. Sementara di wilayah kerja Puskesmas Cibereum Hilir, Karang Tengah dan Gedongpanjang masing-masing 1 kasus. Sedangkan di 5 Puskesmas lainnya tidak terdapat kasus balita gizi buruk.

Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan berdasarkan jenis kelamin dan kecamatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.4
Jumlah Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan
Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan
di Kota Sukabumi Tahun 2015

No	Kecamatan	Kasus Balita Gizi Buruk					
		Ditemukan			Mendapat Perawatan		
		L	P	JML	L	P	JML
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Baros	1	1	2	1	1	2
2	Lembursitu	2	2	4	2	2	4
3	Cibereum	0	1	1	0	1	1
4	Citamiang	4	1	5	4	1	5
5	Warudoyong	1	1	2	1	1	2
6	Gunungpuyuh	1	2	3	1	2	3
7	Cikole	2	10	12	2	10	12
Jumlah (Kota)		11	18	29	11	18	29

Sumber : Bidang Kesga Dinas Kesehatan Kota Sukabumi

h. Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+)

Penemuan dan penanganan kasus TB terus dilakukan secara konsisten oleh Dinas Kesehatan bersama Rumah Sakit, dengan melakukan strategi pengobatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Penanganan pada kasus TB terus dikembangkan sampai pada penanganan pasien yang resisten terhadap obat TB golongan 1 atau yang lebih dikenal dengan istilah MDR (Multi Drug Resisten).

Saat ini pengobatan kasus TB mulai dikembangkan pula pada kasus-kasus yang resisten terhadap obat TB golongan 1 atau pada pasien MDR (Multi Drug Resisten). Pada Tahun 2015 ditemukan 4 kasus MDR dan hanya 3 orang yang diobati karena 1 orang pindah domisili ke luar kota. Karena pengobatan TD MDR memerlukan waktu 2 Tahun, total kasus TB MDR yang masih diobati sejak Tahun 2013 sampai Tahun 2015 adalah 9 orang dan seluruhnya masih ditangani oleh Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.

Berbagai upaya terus ditingkatkan dalam penanganan kasus TB, diantaranya dengan meningkatkan kerja sama dengan Rumah Sakit Pemerintah maupun Rumah Sakit Swasta serta kerja sama dengan negara lain dalam hal bantuan keuangan. Selain itu pelatihan untuk petugas dan koordinasi lintas sektor terus dilakukan agar terjadi sinkronisasi dari seluruh lintas sektor yang terkait.

i. Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Jumlah kasus DBD pada Tahun 2015 sebanyak 793 kasus. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 506 kasus. Sementara dengan melihat tingginya Angka Bebas Jentik di Kota Sukabumi yang mencapai 93.65%, salah satu faktor peningkatan kasus DBD ini disebabkan oleh mobilitas masyarakat kota sukabumi yang cukup tinggi. Dengan jarak terbang nyamuk penular penyakit DBD yang berkisar radius 2 km, hal ini memungkinkan terjadinya penularan dari wilayah kabupaten ke daerah kota yang berbatasan dengan wilayah kabupaten.

Dari seluruh kasus yang ditemukan, seluruhnya ditangani sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan. Tindakan pencegahan harus tetap dilakukan dengan tetap meningkatkan kembali peran serta masyarakat melalui penggerakan POKJANAL DBD dalam sosialisasi PSN di setiap wilayah Kelurahan.

j. Pelayanan Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM)

Posbindu PTM adalah Pos Pembinaan Terpadu yang menyelenggarakan pemeriksaan/pelayanan penyakit tidak menular. Termasuk kedalam penyakit tidak menular seperti cacat fisik, gangguan mental, kanker, penyakit degeneratif, penyakit gangguan metabolisme, kelainan-kelainan organ tubuh lain, penyakit jantung, pembuluh darah, penyakit tekanan darah tinggi, penyakit kencing manis, berat badan lebih, osteoporosis, kanker usus, depresi dan kecemasan.

Penyakit tidak menular sering dianggap tidak berbahaya dibanding penyakit menular. Sementara penyakit tidak menular ini masih menjadi penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Keadaan dimana penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan penting dan dalam waktu bersamaan morbiditas dan mortalitas penyakit tidak menular meningkat, merupakan beban ganda dalam pelayanan dibidang kesehatan.

Sampai dengan Tahun 2015, sudah terbentuk 15 Posbindu PTM, hal ini disebabkan karena antusiasnya para kader Posbindu dalam pembentukan Posbindu Penyakit Tidak Menular dan semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan. Langkah kedepan yang perlu dilaksanakan adalah pelatihan bagi kader-kader Posbindu untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Posbindu Penyakit Tidak Menular.

Beberapa kendala terkait Posbindu Penyakit Tidak Menular ini diantaranya masih kurangnya sarana prasarana bagi Posbindu PTM, terbatasnya alat kesehatan bagi pemeriksaan penyakit tidak menular dan juga masih kurangnya keterampilan kader dan petugas dalam penanganan penyakit tidak menular.

- k. Peningkatan Jaminan Kesehatan Bagi Seluruh Masyarakat, terutama Masyarakat Miskin

Pada Tahun 2014 Pemerintah telah mencanangkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan tujuan agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki jaminan kesehatan.

Di Kota Sukabumi, penduduk miskin yang mendapat Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) sebanyak 89.890 jiwa. Sedangkan 27.751 penduduk miskin mendapat Jaminan Kesehatan Daerah melalui Program Kartu Sehat. Dengan demikian, angka tersebut menunjukkan bahwa masyarakat miskin di Kota Sukabumi telah mendapatkan jaminan kesehatan dari Pemerintah, sebagai salah satu bentuk tanggung jawab seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Mulai tahun 2015, peserta Kartu Sehat secara bertahap mulai diintegrasikan menjadi peserta Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS). Masyarakat Kota Sukabumi yang telah memiliki Jaminan Kesehatan tersebut terdiri dari masyarakat miskin yang dijamin pelayanan kesehatannya oleh Program JKN yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) bersumber APBN sebanyak 89.890 jiwa, masyarakat yang dijamin oleh anggaran APBD sesuai dengan SK Walikota No. 173 Tahun 2014 tentang Masyarakat Penerima Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kota Sukabumi sebanyak 27.751 jiwa yang terbagi menjadi peserta integrasi Jamkesda/Kartu Sehat dengan BPJS sebanyak 9.641 jiwa dan peserta program Jamkesda/Kartu Sehat bersumber APBD sebanyak 18.110 jiwa.

4.2 Indikator Pendidikan

4.2.1 Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) adalah prosentasi penduduk umur 10 tahun ke atas atau 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis serta mengikuti kalimat sederhana dalam kehidupannya sehari-hari. Angka Melek huruf (AMH) berguna untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf dan menunjukkan kemampuan penduduk berkomunikasi secara lisan dan tertulis serta menunjukkan pula kemampuan penduduk untuk menyerap informasi dari berbagai media, sehingga Angka Melek Huruf (AMH) ini dapat mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap perkembangan daerah.

Angka Melek Huruf (AMH) Kota Sukabumi sebesar 99,99% dari jumlah penduduk yang ada, berdasarkan indikator penelitian angka ini sudah tinggi sedangkan yang belum melek huruf sebesar 0,001% berdasarkan data bahwa penduduk tersebut yang sudah berusia lanjut namun mereka melek huruf arab dan dapat membaca angka, serta sudah tidak memungkinkan melaksanakan kegiatan belajar baik di lembaga formal maupun informal dikarenakan usia yang sudah lanjut.

4.2.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai pada wilayah tertentu dan dinyatakan

dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak pada daerah perbatasan.

Rumus :

$$\text{APK} = \frac{\text{Jumlah murid ditingkat pendidikan tertentu}^*}{\text{Jumlah penduduk usia tertentu}} \times 100\%$$

* Keterangan

$$\text{APK Paud} = \frac{\text{Jumlah murid Paud}}{\text{Jumlah penduduk usia 4-6 Tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APK SD} = \frac{\text{Jumlah murid SD/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APK SMP} = \frac{\text{Jumlah murid SMP/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APK SM} = \frac{\text{Jumlah murid SM/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APK PT} = \frac{\text{Jumlah murid PT/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 19 – 24 tahun}} \times 100\%$$

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang PAUD

Tabel 4.5
Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang PAUD per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Siswa Paud Seluruhnya			Jumlah Penduduk 4-6 Tahun			APK		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Baros	497	472	969	951	813	1.764	52,26	58,06	54,93
2	Cibeureum	529	537	1.066	1.112	1.005	2.117	47,57	53,43	50,35
3	Cikole	1.175	1.117	2.292	1.545	1.503	3.048	76,05	74,32	75,20
4	Citamiang	668	675	1.343	1.360	1.236	2.596	49,12	54,61	51,73
5	Gn. Puyuh	694	597	1.291	1.256	1.112	2.368	55,25	53,69	54,52
6	Lembursitu	538	569	1.107	962	925	1.887	55,93	61,51	58,66
7	Warudoyong	850	828	1.678	1.473	1.344	2.817	57,71	61,61	59,57
	Jumlah	4.951	4.795	9.746	8.659	7.938	16.597	57,18	60,41	58,72

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi

Pada Tabel 4.5 tampak bahwa APK untuk jenjang pendidikan PAUD berkisar pada angka 59% (58,72%), secara real terdapat penurunan APK sebesar 4% dari tahun 2015 yang berkisar pada angka 63%.

Hal ini disebabkan terdapat siswa usia yang belum tujuh tahun sudah masuk jenjang Sekolah Dasar, yang seharusnya masih duduk dijenjang PAUD, dapat dibuktikan dengan siswa SD/ sederajat yang usia di bawah 7 tahun sebanyak 3.256 anak/siswa.

Tetapi bila data anak tersebut digabungkan atau anak tersebut masih duduk dijenjang PAUD, maka APK PAUD Kota Sukabumi akan mencapai 78% (78,34%).

b. Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SD/ sederajat

Tabel 4.6
Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SD per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Siswa			Jumlah Penduduk 7-12 Tahun			APK		
		L	P	L+P	L	P	L+P	Gender		L+P
								L	P	
1	Baros	1.829	1.740	3.569	1.772	1.784	3.556	103,22	97,53	100
2	Cibeureum	2.212	2.045	4.257	2.287	2.158	4.445	96,72	94,76	96
3	Cikole	4.073	3.904	7.977	3.203	3.013	6.216	127,16	129,57	128
4	Citamiang	3.779	3.437	7.216	2.867	2.673	5.540	131,81	128,58	130
5	Gn. Puyuh	2.561	2.315	4.876	2.591	2.372	4.963	98,84	97,60	98
6	Lembursitu	2.023	1.899	3.922	1.999	1.928	3.927	101,20	98,50	100
7	Warudoyong	2.930	2.764	5.694	3.129	2.918	6.047	93,64	94,72	94
	Jumlah	19.407	18.104	37.511	17.848	16.846	34.694	108,73	107,47	108

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi

Pada Tabel 4.6 tampak bahwa APK untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat berada diatas 100% (108%). Hal ini menunjukkan tingkat partisipasi penduduk Kota Sukabumi terhadap pendidikan jenjang SD/ sederajat pada umumnya tinggi, dan jika kita lihat per Kecamatan capaian APK tertinggi di atas 100%, serta terdapat 2 Kecamatan yaitu kecamatan Cikole (128%) dan Kecamatan Citamiang (130%), hal ini disebabkan bahwa di kecamatan tersebut memiliki lembaga pendidikan paling banyak dan diminati oleh siswa di luar kecamatan tersebut, termasuk siswa di luar Kota. Untuk capaian APK yang berada di bawah 100% yaitu berada di wilayah Cibeureum (96%), Gunungpuyuh (98%), dan warudoyong (94%). Hal ini disebabkan terdapat anak/ siswa yang bersekolah diluar wilayah kecamatan tersebut.

c. Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMP/Sederajat

Tabel 4.7
Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMP per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Siswa Seluruh			Jumlah Penduduk 13-15 Tahun			APK		
		L	P	L+P	L	P	L+P	Gender		L+P
								L	P	
1	Baros	600	509	1.109	918	945	1.863	65,36	53,86	59,53
2	Cibeureum	653	652	1.305	1.181	1.068	2.249	55,29	61,05	58,03
3	Cikole	3.135	3.431	6.566	1.728	1.600	3.328	181,42	214,44	197,30
4	Citamiang	1.901	1.973	3.874	1.462	1.367	2.829	130,03	144,33	136,94
5	Gunung Puyuh	942	910	1.852	1.373	1.174	2.547	68,61	77,51	72,71
6	Lembursitu	1.057	1.095	2.152	1.017	962	1.979	103,93	113,83	108,74
7	Warudoyong	1.743	1.718	3.461	1.675	1.560	3.235	104,06	110,13	106,99
	Jumlah	10.031	10.288	20.319	9.354	8.676	18.030	107,24	118,58	112,70

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi

Pada Tabel 4.7 tampak bahwa APK untuk jenjang pendidikan SMP/ sederajat berada di atas 100% (112,70%), hal ini menunjukkan tingkat partisipasi penduduk terhadap pendidikan jenjang SMP/ sederajat pada umumnya tinggi. Apabila dilihat per Kecamatan APK tertinggi terdapat di 2 (dua) kecamatan dengan capaian APK di atas 100% yaitu Kecamatan Cikole 197,30% dan Kecamatan Citamiang 136,94%. Hal ini menunjukkan bahwa di kecamatan tersebut memiliki lembaga pendidikan paling banyak dan diminati oleh siswa di luar kecamatan, termasuk siswa di luar kota. Untuk capaian APK di bawah 100% yaitu Kecamatan Baros (59,53%), Cibeureum (58,03), dan Gunung Puyuh (72,71). Hal ini disebabkan karena jumlah lembaga pendidikan jenjang SMP/ sederajat tidak seimbang dengan jumlah penduduk dan terdapat anak/ siswa yang bersekolah di luar wilayah kecamatan tersebut.

d. Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMA/Sederajat

Tabel 4.8
Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMA per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Siswa			Jumlah Penduduk 16-18 Tahun			APK		
		L	P	L+P	L	P	Jumlah	Gender		L+P
								L	P	
1	Baros	142	103	245	932	777	1.709	15,24	13,26	14,34
2	Cibeureum	458	381	839	1.032	954	1.986	44,38	39,94	42,25
3	Cikole	4.137	4.051	8.188	1.478	1.488	2.966	279,91	272,24	276,06
4	Citamiang	2.572	3.800	6.372	1.260	1.279	2.539	204,13	297,11	250,96
5	Gunung Puyuh	1.096	1.061	2.157	1.211	1.146	2.357	90,50	92,58	91,51
6	Lembursitu	1.468	682	2.150	931	912	1.843	157,68	74,78	116,66
7	Warudoyong	1.276	1.070	2.346	1.469	1.329	2.798	86,86	80,51	83,85
	Jumlah	11.007	11.045	22.052	8.313	7.885	16.198	132,41	140,08	136,14

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi

Pada Tabel 4.8 tampak bahwa APK untuk jenjang pendidikan SMA/ sederajat berada di atas 100% (136,14%). Hal ini menunjukkan tingkat perhatian penduduk terhadap pendidikan jenjang SMA/ sederajat pada umumnya tinggi. Apabila dilihat per kecamatan, APK tertinggi di Kecamatan Cikole (276,06) dan Citamiang (250,96). Hal ini menunjukkan bahwa di kecamatan tersebut memiliki lembaga pendidikan paling banyak dan diminati oleh siswa di luar kecamatan dan dari luar kota. Sedangkan APK terendah berada di Kecamatan Baros (14%), Cibeureum (42,25), dan Gunung Puyuh (91%). Hal ini karena keberadaan lembaga pendidikan jenjang SMA/ sederajat tidak seimbang dengan jumlah penduduk, bahkan untuk Kecamatan Baros lembaga pendidikan jenjang SMA/ sederajat sangat minim dan penyebaran siswa jenjang SMA/ sederajat tersebut banyak yang masuk ke wilayah perkotaan.

4.3 Indikator Keluarga Berencana

4.3.1 Pasangan Usia Subur (PUS)

Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami isteri yang isterinya berusia 15-49 tahun dan masih haid atau pasangan suami-isteri yang isterinya berusia kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau isteri sudah berumur lebih dari 50 tahun tetapi masih haid.

Jumlah PUS di Kota Sukabumi pada tahun 2015 mencapai 54.371 pasangan, dimana jumlah PUS terbanyak berada di Kecamatan Warudoyong yaitu 9.723 pasangan dan jumlah PUS paling sedikit berada di Kecamatan Baros yaitu 6.205 pasangan.

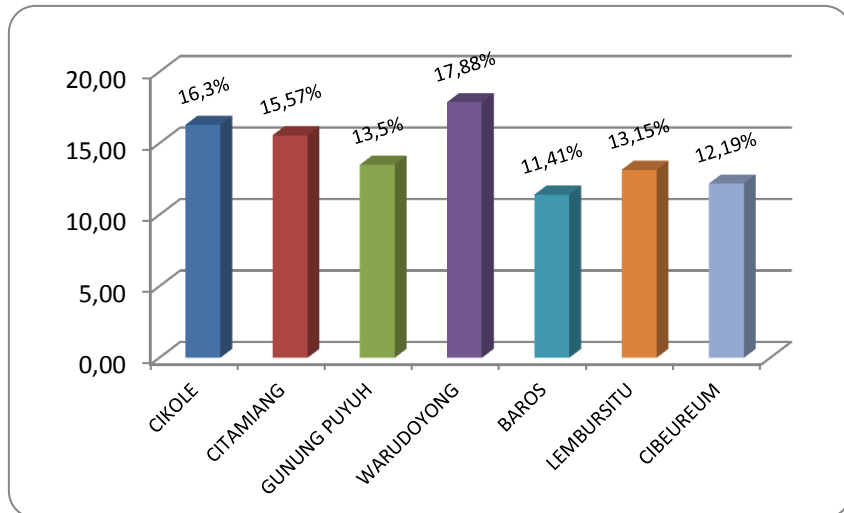
Gambaran rinci jumlah PUS di Kota Sukabumi terlihat pada Tabel 4.9 dan Grafik 4.1 berikut ini:

Tabel 4.9
Data Pasangan Usia Subur (PUS)

NO.	KECAMATAN	PUS	%
1.	CIKOLE	8.860	16,30
2.	CITAMIANG	8.463	15,57
3.	GUNUNG PUYUH	7.342	13,50
4.	WARUDOYONG	9.723	17,88
5.	BAROS	6.205	11,41
6.	LEMBURSITU	7.152	13,15
7.	CIBEUREUM	6.626	12,19
KOTA SUKABUMI		54.371	100

Sumber : Bidang KS BPMPKB Kota Sukabumi Tahun 2015

Grafik 4.1
Persentase PUS Per Kecamatan



4.3.2 Peserta KB Aktif

Peserta Keluarga Berencana (akseptor KB) adalah Pasangan Usia Subur (PUS) dimana salah seorang dari padanya menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan, baik melalui program maupun non program.

Yang dimaksud dengan Peserta KB Aktif (PA) atau lebih dikenal dengan *Current User (CU)* adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang sedang menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi modern. Dalam pengertian ini tidak termasuk cara-cara kontrasepsi tradisional, seperti pijat urat, jamu dan juga tidak termasuk cara-cara KB alamiah seperti pantang berkala, senggama terputus dan sebagainya. Kontrasepsi adalah cara atau alat yang dipergunakan untuk mencegah terjadinya konsepsi (kehamilan).

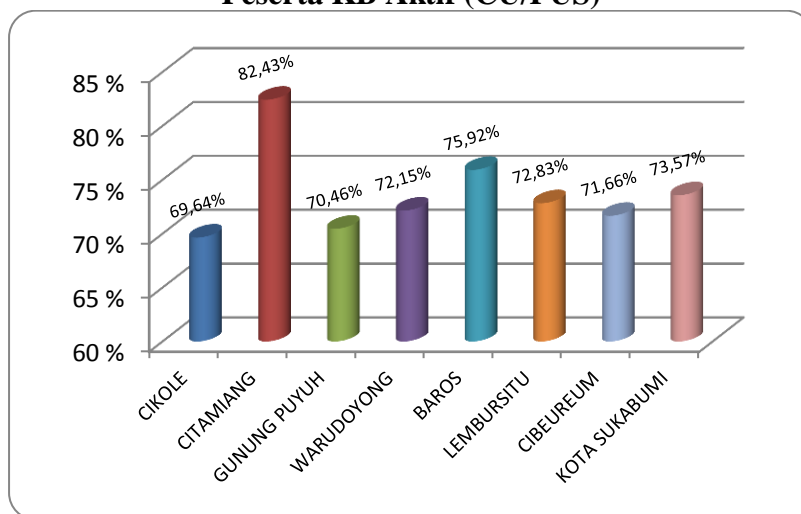
Untuk mengetahui kondisi prevalensi peserta KB Aktif Kota Sukabumi pada tahun 2015 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.10 dan Grafik 4.2 di bawah ini :

Tabel 4.10
Data Peserta KB Aktif (CU/PUS)

NO.	KECAMATAN	ALAT KONTRASEPSI							PUS	JUMLAH CU	CU/PUS (%)
		IUD	MOW	MOP	KDM	IMP	STK	PIL			
1.	CIKOLE	949	115	27	199	453	2.703	1.724	8.860	6.170	69,64
2.	CITAMIANG	521	171	25	105	417	3.643	2.094	8.463	6.976	82,43
3.	GUNUNG PUYUH	635	176	16	140	455	2.338	1.413	7.342	5.173	70,46
4.	WARUDOYONG	765	172	18	249	787	3.503	1.521	9.723	7.015	72,15
5.	BAROS	526	79	14	54	316	2.278	1.444	6.205	4.711	75,92
6.	LEMBURSITU	444	148	21	336	716	2.201	1.343	7.152	5.209	72,83
7.	CIBEUREUM	361	79	9	67	180	3.149	903	6.626	4.748	71,66
KOTA SUKABUMI		54.371	4.201	940	130	1.150	3.324	19.815	10.442	40.002	73,57

Sumber : Bidang KS BPMPKB Kota Sukabumi Tahun 2015

Grafik 4.2
Peserta KB Aktif (CU/PUS)



Pada Tabel 4.10 dan Grafik 4.2 di atas memperlihatkan prevalensi Peserta KB Aktif (CU/PUS) di Kota Sukabumi Tahun 2015 mencapai $40.002 / 54.371 \times 100\% = 73,57\%$.

Kondisi prevalensi peserta KB aktif pada tahun 2015 mencapai 73,57% lebih tinggi dari target RPJMD 2013-2018 Kota Sukabumi yaitu sebesar 67,45% menandakan bahwa cakupan sasaran PUS yang menjadi peserta KB aktif di Kota Sukabumi telah melampaui target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Kemudian apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2014 yang mencapai 72,60%, maka capaian tahun 2015 menunjukkan peningkatan prevalensi peserta KB aktif di Kota Sukabumi yang berarti bahwa pencapaian sasaran strategis terkendalanya laju pertumbuhan penduduk alamiah mulai membaik.

4.3.3 Peserta KB Aktif Menurut Jalur Pelayanan

Saat ini jalur pelayanan KB yang dilakukan di Kota Sukabumi terbagi dua, yaitu jalur pelayanan KB pemerintah dan jalur pelayanan KB swasta. Oleh karenanya Peserta KB Aktif pun dapat dibedakan menurut jalur pelayanannya, yaitu peserta KB pemerintah dan peserta KB swasta.

Peserta KB pemerintah adalah peserta KB yang memperoleh pelayanan KB melalui tempat-tempat pelayanan pemerintah, seperti misalnya: Puskesmas, Klinik KB/ Rumah Sakit Pemerintah. Sedangkan peserta KB swasta adalah peserta KB yang memperoleh pelayanan KB melalui tempat-tempat pelayanan

swasta, seperti misalnya: dokter/bidan praktek swasta, apotek, toko obat dan lain-lainnya.

Gambaran secara rinci kondisi Peserta KB Aktif menurut jalur pelayanan di Kota Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 4.11 dan Tabel 4.12 dan Grafik 4.3 di bawah ini :

Tabel 4.11
Data Peserta KB Aktif Pelayanan KB Pemerintah

NO.	KECAMATAN	ALAT KONTRASEPSI							JUMLAH KESELURUHAN
		IUD	MOW	MOP	KDM	IMP	STK	PIL	
1.	CIKOLE	463	65	15	113	392	751	788	2.587
2.	CITAMIANG	329	150	21	57	399	2.099	1.015	4.070
3.	GUNUNG PUYUH	389	154	16	97	268	940	702	2.566
4.	WARUDYOYONG	376	145	18	134	679	1.386	762	3.500
5.	BAROS	292	64	12	41	268	866	687	2.230
6.	LEMBURSITU	261	134	20	195	541	1.059	652	2.862
7.	CIBEUREUM	162	47	6	26	169	1.179	629	2.218
KOTA SUKABUMI		2.272	759	108	693	2.716	8.280	5.235	20.033

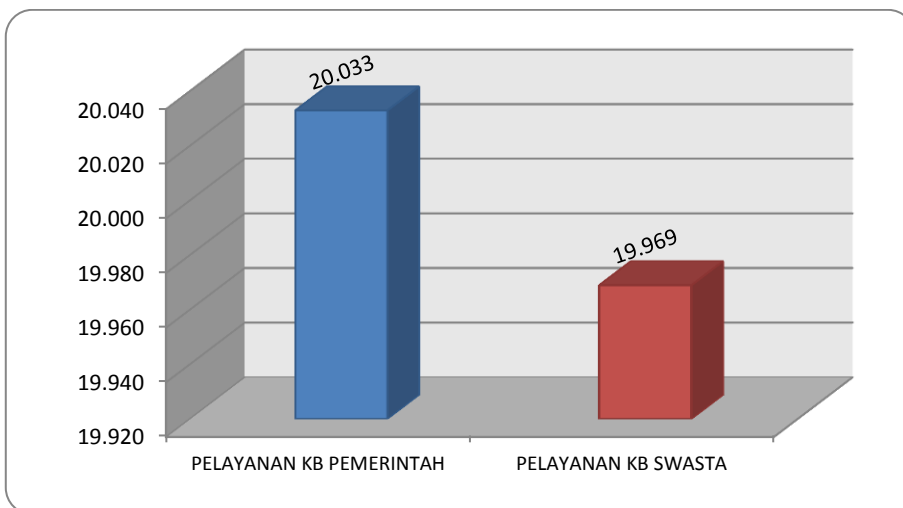
Sumber : Bidang KS BPMPKB Kota Sukabumi Tahun 2015

Tabel 4.12
Data Peserta KB Aktif Pelayanan KB Swasta

NO.	KECAMATAN	ALAT KONTRASEPSI							JUMLAH KESELURUHAN
		IUD	MOW	MOP	KDM	IMP	STK	PIL	
1.	CIKOLE	486	50	12	86	61	1.952	936	3.583
2.	CITAMIANG	192	21	4	48	18	1.544	1.079	2.906
3.	GUNUNG PUYUH	246	22	0	43	187	1.398	711	2.607
4.	WARUDYOYONG	389	27	0	115	108	2.117	759	3.515
5.	BAROS	234	15	2	13	48	1.412	757	2.481
6.	LEMBURSITU	183	14	1	141	175	1.142	691	2.347
7.	CIBEUREUM	199	32	3	41	11	1.970	274	2.530
KOTA SUKABUMI		1.929	181	22	487	608	11.535	5.207	19.969

Sumber : Bidang KS BPMPKB Kota Sukabumi Tahun 2015

Grafik 4.3
Peserta KB Aktif (CU/PUS) Menurut Jalur Pelayanan



Pada Tabel 4.11 dan Tabel 4.12 serta Grafik 4.3 di atas memperlihatkan bahwa jalur pelayanan KB di Kota Sukabumi di tahun 2015 secara umum di dominasi oleh jalur pelayanan KB pemerintah. Kondisi ini mengandung arti bahwa kemandirian masyarakat Kota Sukabumi untuk mengikuti program KB sedikit menurun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Semakin tinggi jumlah Peserta KB Aktif pelayanan pemerintah maka dapat dikatakan semakin rendah pula kemandirian ber-KB masyarakatnya atau dengan kata lain tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pelayanan KB pemerintah sangat tinggi.

4.3.4 Pasangan Usia Subur (PUS) Bukan Peserta KB

PUS bukan peserta KB terbagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu hamil (H), ingin anak segera (IAS), ingin anak ditunda (IAT), dan tidak ingin anak lagi (TIAL). Pengertian PUS bukan peserta KB “hamil” adalah PUS yang istrinya sedang hamil; “ingin anak segera” adalah PUS yang sedang tidak menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi dan masih menginginkan anak dengan batas waktu kurang dari dua tahun; “ingin anak tunda” adalah PUS yang sedang tidak menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi dan menginginkan kelahiran anak ditunda dengan batas waktu dua tahun lebih; “tidak ingin anak lagi” adalah PUS yang sedang tidak menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi dan tidak ingin anak.

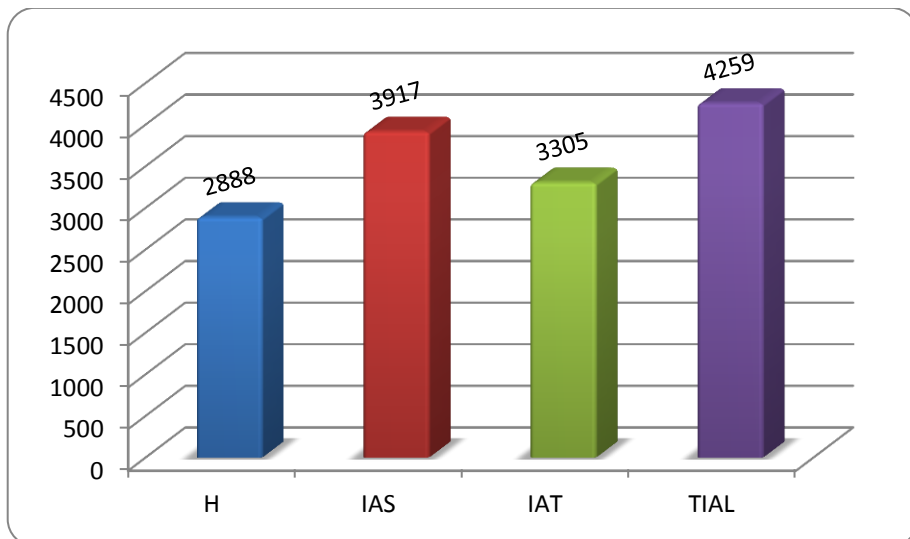
Salah satu dimensi dari PUS bukan peserta KB dikenal istilah *Unmet Need* yang khusus diperuntukkan untuk kategori “ingin anak tunda” dan “tidak ingin anak lagi”. Sesuai dengan pengertiannya, *Unmet Need* adalah proporsi wanita usia subur dalam status menikah yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan anak dan atau mereka yang *Unmet Need* karena resiko kesehatan dan pemakaian kontrasepsi yang buruk, tidak menginginkan tambahan anak (membatasi kelahiran).

Tabel 4.13
Data PUS Bukan Peserta KB

NO	KECAMATAN	H	IAS	IAT	TIAL	JUMLAH
1.	CIKOLE	387	675	809	819	2.690
2.	CITAMIANG	183	105	97	1.102	1.487
3.	GUNUNG PUYUH	462	684	588	435	2.169
4.	WARUDROYONG	865	809	527	507	2.708
5.	BAROS	291	462	313	428	1.494
6.	LEMBURSITU	399	577	595	372	1.943
7.	CIBEUREUM	301	605	376	596	1.878
KOTA SUKABUMI		2.888	3.917	3.305	4.259	14.369

Sumber : Bidang KS BPMPKB Kota Sukabumi Tahun 2015

Grafik 4.4
PUS Bukan Peserta KB



Pada Tabel 4.13 dan Grafik 4.4 di atas, memperlihatkan potret kondisi PUS bukan peserta KB di Kota Sukabumi. Jumlah PUS bukan peserta KB pada tahun 2015 mencapai angka 14.369 atau 26,43% dari total PUS yang ada di Kota Sukabumi dimana

jumlah kategori PUS bukan peserta KB “tidak ingin anak lagi” mendominasi wilayah ini dengan angka mencapai 4.259 atau 29,64% dari total jumlah PUS bukan peserta KB.

Di lain sisi, *Unmet Need* Kota Sukabumi pada tahun 2015 mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dari 15,55% di tahun 2014 menjadi 13,91% di tahun 2015. Walaupun capaian *unmet need* di tahun 2015 mengalami penurunan, namun tetap tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan antara lain karena selama ini fokus penggarapan sasaran program KB lebih ditekankan kepada akseptor KB aktif dalam konteks alih cara dari metode kontrasepsi jangka pendek ke metode kontrasepsi jangka panjang, Manajemen data sasaran yang belum memadai dari para PKB/PLKB dan TPD, serta minimnya wawasan dan pola pikir masyarakat tentang program KB khususnya penggunaan alat dan obat kontrasepsi.

Kondisi ini merupakan tantangan sekaligus pekerjaan rumah yang masih harus diupayakan tingkat penurunannya untuk semakin mendorong atau meningkatkan pencapaian target realisasi peserta KB aktif (CU/PUS) di Kota Sukabumi. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang intensif tentang program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) kepada masyarakat menjadi salah satu alternatif solusi yang dapat digunakan untuk menjawab tantangan ini.

4.3.5 Tahapan Keluarga

Tahapan keluarga sedianya digunakan sebagai cerminan kualitas keluarga. Semakin tinggi tahapannya maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga tersebut. Ada 5 tahapan keluarga menurut BKKBN yaitu :

1) Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.

2) Keluarga Sejahtera Tahap I

Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya (*socio psychological needs*), seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca tulis latin dan keluarga berencana.

3) Keluarga Sejahtera Tahap II

Yaitu keluarga-keluarga yang di samping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) juga telah dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya (*socio psychological needs*), akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan pengembangannya (*developmental needs*) seperti kebutuhan untuk peningkatan agama, menabung,

berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat dan mampu memperoleh informasi.

4) Keluarga Sejahtera Tahap III

Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya (*basic needs*), kebutuhan sosial psikologisnya (*socio psychological needs*), dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan (kontribusi) yang maksimal terhadap masyarakat, seperti secara teratur (waktu tertentu) memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan serta berperan serta secara aktif dengan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olah raga, pendidikan dan sebagainya.

5) Keluarga Sejahtera III Plus

Keluarga sejahtera III plus adalah keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, kebutuhan sosial psikologisnya (*socio psychological needs*), maupun yang bersifat kebutuhan pengembangannya, serta telah dapat memberikan sumbangan (kontribusi) yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Tabel 4.14
Data Tahapan Keluarga¹

NO	KECAMATAN	PENTAHAPAN					JML
		PRA KS	KS. I	KS. II	KS. III	KS. III PLUS	
1	CIKOLE	436	2.151	5.210	7.212	808	15.817
2	CITAMIANG	454	2.777	4.195	3.866	1.900	13.192
3	GUNUNGPUYUH	634	2.593	3.912	3.360	1.447	11.946
4	WARUDOYONG	279	2.975	6.246	3.968	1.400	14.868
5	BAROS	208	2.107	3.311	2.017	920	8.563
6	LEMBURSITU	696	1.400	4.566	3.423	616	10.701
7	CIBEUREUM	347	2.587	3.806	2.475	1.273	10.488
KOTA SUKABUMI		3.054	16.590	31.246	26.321	8.364	85.575

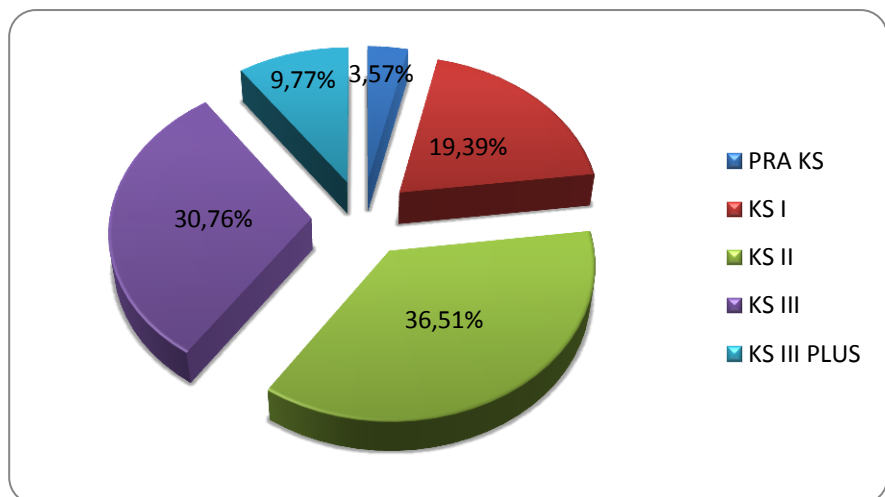
Sumber: Bidang KS BPMPKB Kota Sukabumi Tahun 2015

Pada Tabel 4.14 di atas, memberikan gambaran mengenai keadaan kesejahteraan keluarga di Kota Sukabumi. Keluarga Pra Sejahtera, sebagai cerminan tahapan keluarga terendah, di Kota Sukabumi mencapai angka 3.054 atau dengan kata lain mencapai $3.054/85.575 \times 100\% = 3,57\%$ dari total jumlah keluarga di Kota Sukabumi.

¹ Hasil penghitungan sementara

Kemudian apabila melihat kondisi per wilayah, maka Jumlah keluarga Pra Sejahtera terbanyak berada di Kecamatan Lembursitu sebanyak $696/3.054 \times 100\% = 22,79\%$ dari total jumlah keluarga Pra Sejahtera yang ada di Kota Sukabumi. Sedangkan jumlah keluarga Pra Sejahtera terendah berada di Kecamatan Baros sebanyak $208/3.054 \times 100\% = 6,81\%$ dari total jumlah keluarga Pra Sejahtera yang ada di Kota Sukabumi.

Grafik 4.5
Tahapan Keluarga Kota Sukabumi



Selanjutnya lebih jelas dalam Grafik 4.5 di atas, tergambar secara umum kondisi kesejahteraan keluarga di Kota Sukabumi. Persentase terendah dari tahapan keluarga sejahtera adalah keluarga Pra Sejahtera yang diwakili oleh bagian warna biru tua sebanyak 3,57% dari total Jumlah keluarga di Kota Sukabumi dan persentase tertinggi yaitu pada tahapan keluarga Sejahtera II sebanyak 36,51% dari total jumlah keluarga yang digambarkan dengan bagian warna hijau.

Sesuai dengan pengertian dari tahapan keluarga sejahtera II, maka kondisi ini mengandung makna bahwa sebagian besar keluarga di Kota Sukabumi merupakan keluarga-keluarga yang di samping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) juga telah dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya (socio psychological needs), akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan pengembangannya (developmental needs) seperti kebutuhan untuk peningkatan agama, menabung, berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat dan mampu memperoleh informasi.

4.4 Indikator Tenaga Kerja

4.4.1 Jumlah Pencari Kerja

Yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah penduduk pada usia kerja dan yang lazim dipakai adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas atau 15-64 tahun. Dapat dikatakan bahwa tenaga kerja adalah penduduk yang secara potensial dapat bekerja. Dengan perkataan lain, tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang-barang dan jasa-jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

Tenaga Kerja terdiri dari :

1. Angkatan Kerja (*Labor Force*)
2. Bukan Angkatan Kerja (*Not In The Labor Force*)

Angkatan Kerja (*Labor Force*) adalah penduduk yang bekerja dan mereka yang tidak bekerja tapi siap untuk bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Pencari Kerja atau yang termasuk kedalam kelompok penganggur adalah mereka yang tidak bekerja dan sedang mencari kerja menurut referensi waktu tertentu atau mereka yang pernah bekerja.

Tabel 4.15
Jumlah Pencari Kerja Menurut Golongan Usia Per Kecamatan
Berdasarkan AK I Tahun 2015

NO.	KECAMATAN	15-24		25-34		35-44		45-54		55+		JUMLAH		JML L + P
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	Gunung Puyuh	290	259	102	121	67	72	4	2	5	9	468	463	931
2.	Cikole	366	388	121	158	64	90	6	3	4	2	561	641	1202
3.	Citamiang	246	238	197	225	36	41	5	2	1	2	485	508	993
4.	Warudoyong	323	345	98	138	58	86	5	4	1	7	485	580	1065
5.	Baros	205	265	93	108	43	55	7	2	0	1	348	431	779
6.	Lembursitu	226	281	97	105	35	56	4	9	3	5	365	456	821
7.	Cibeureum	230	241	87	100	33	44	4	0	3	5	357	390	747
JUMLAH		1.886	2.017	795	955	336	444	35	22	17	31	3.069	3.469	6.538

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, Tahun 2015

Tabel 4.16
Jumlah Pencari Kerja Menurut Usia dan Tingkat Pendidikan
Berdasarkan AK I Tahun 2015

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	15-24		25-34		35-44		45-54		55+		JUMLAH		JML L + P
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	SD	19	54	22	52	22	59	8	14	-	-	71	179	250
2.	SMP	223	586	81	295	32	85	4	25	-	-	340	991	1.331
3.	SMA	1.693	1.228	421	447	110	165	21	20	1	9	2.246	1.869	4.115
4.	DI/DII	4	3	6	4	4	1	-	-	-	-	14	8	22
5.	DIII	67	116	46	58	5	8	3	-	1	-	122	182	304
6.	SARJANA	115	142	129	79	25	19	7	-	-	-	276	240	516
JUMLAH		2.121	2.129	705	935	198	337	43	59	2	9	3.069	3.469	6.538

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, Tahun 2015

Jika dilihat per kelompok umur, maka pencari kerja terbanyak pada kelompok umur 15 - 24 tahun, sedangkan paling sedikit pada kelompok umur 55 tahun ke atas. Namun demikian tiap-tiap kelompok umur pencari kerja perempuan lebih banyak dibandingkan pencari kerja laki-laki.

Apabila dibandingkan dengan jumlah pencari kerja Tahun 2014 (6.152) dan tahun 2013 (6.458), jumlah pencari kerja pada tahun 2015 terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar 6.538. Jika dianalisis lebih jauh, tentu saja lowongan kerja yang harus tersedia dapat memenuhi harapan dari pencari kerja.

Tabel 4.17
Ikhtisar AK.I Tahun 2015
Penempatan, Penghapusan, dan yang Belum Ditempatkan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENCARI KERJA	TAHUN 2014			TAHUN 2015		
		L	P	JML	L	P	JML
	TINGKAT PENDIDIKAN	4	5	6	7	8	9
1	Tidak Tamat SD						
2	SD/Sederajat	103	367	470	52	185	237
3	SMP/Sederajat	395	1.156	1.551	350	965	1.315
4	SMA/Sederajat	2.031	2.049	4.080	2.255	1.871	4.126
5	D.I/D.II/ AKTA. I dan II, D.III	162	240	402	154	199	353
6	Sarjana	290	295	585	258	249	507
Jumlah		2.981	4.107	7.088	3.069	3.469	6.538
I	Penempatan	2.513	3.276	5.789	2.824	2.473	5.297
II	Penghapusan 2012 s/d 2013	1.914	2.064	3.978	1.888	3.085	4.973
III	Pencari Kerja yang Belum ditempatkan Tahun 2015	468	831	1.299	245	996	1.241
REALISASI PENEMPATAN		5.789 / 116 %			5.297 / 106 %		
REALISASI TARGET PENEMPATAN = 5000/TAHUN							
PROSENTASE YANG BELUM DITEMPATKAN TAHUN 2015		18.33%			18.98%		

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, Tahun 2015

Apabila dilihat pada Tabel 4.17, pencari kerja yang sudah ditempatkan dalam arti sudah mendapatkan pekerjaan sebanyak 5.297 atau 81,02% dari jumlah pencari kerja sebanyak 6.538, sedangkan pencari kerja yang belum ditempatkan dalam arti belum mendapatkan pekerjaan sebanyak 1.241 atau 18,98% dari jumlah pencari kerja sebanyak 6.538.

Tabel 4.18
Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Berdasarkan AK I Tahun 2015

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH			
		L	P	JUMLAH	%
1	Sekolah Dasar	71	179	250	3,82
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	340	991	1.331	20,36
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	2.246	1.869	4.115	62,94
4	Diploma 1 / Diploma 2	14	8	22	0,34
5	Diploma 3	122	182	304	4,65
6	Strata 1	276	240	516	7,89
JUMLAH		3.069	3.469	6.538	

Tabel 4.19
Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan
Berdasarkan AK I Tahun 2015

NO	KECAMATAN	SD		SMP		SMA		D I / D II		D III		SARJANA		JUMLAH		JML L + P
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
1.	Gunung Puyuh	3	9	28	86	358	285	1	1	22	41	56	41	468	463	931
2.	Cikole	14	17	72	190	393	358	4	2	24	32	54	42	561	641	1.202
3.	Citamiang	17	22	45	132	363	284	1	2	18	22	41	46	485	508	993
4.	Warudoyong	5	29	54	170	360	321	3	2	18	29	45	29	485	580	1.065
5.	Baros	12	20	36	140	256	217	2	0	15	21	27	33	348	431	779
6.	Lembursitu	18	63	46	134	257	221	2	0	11	19	31	19	365	456	821
7.	Cibeureum	2	19	59	139	259	183	1	1	14	18	22	30	357	390	747
JUMLAH		71	179	340	991	2.246	1.869	14	8	122	182	276	240	3069	3.469	6.538

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, Tahun 2015

Dari Tabel 4.18 dan Tabel 4.19 di atas terlihat jumlah pencari kerja terbanyak berpendidikan SLTA/Sederajat sejumlah 4.115 orang (62,94%), disusul pendidikan SLTP/ Sederajat sebanyak 1.331 orang (20.36%).

Tabel 4.20

Rekapitulasi Registrasi PPTKIS Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Sukabumi

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	INFORMAL			FORMAL			TOTAL
		P	L	JML	P	L	JML	
1	Diploma	1	0	1	0	0	0	1
2	SD	29	0	29	0	0	0	29
3	SMP	19	0	19	4	3	7	26
4	SMU	19	0	19	0	1	1	20
	JUMLAH	68	0	68	4	4	8	76

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, Tahun 2015

4.5. Indikator Sosial

4.5.1 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Pembangunan di bidang kependudukan sangat terkait dengan permasalahan di bidang sosial. Apalagi Kota Sukabumi sebagai kota perdagangan dan jasa akan sangat berpengaruh terhadap tumbuhnya urbanisasi yang ujung-ujungnya membawa pengaruh signifikan terhadap tumbuhnya permasalahan-permasalahan sosial.

Tabel 4.21

Rekapitulasi Pendataan PMKS di Kota Sukabumi

No	PMKS	KECAMATAN							Jumlah
		Gunung Puyuh	Cikole	Citamiang	Waru doyong	Baros	Lembur situ	Cibeureum	
1	Anak Terlantar	23	82	39	72	19	57	53	345
2	Anak berhadapan dngn hukum	1	22	2	8	2	2	12	49
3	Balita Terlantar	3	30	1	2	1	11	36	84
4	Anak Jalanan	1	30	4	8	1	4	1	49
5	Lanjut Usia Terlantar	94	294	79	206	229	153	109	1.164
6	Pengemis	15	4	11	7	3	1	7	48
7	Gelandangan	1	1	0	4	0	3	4	13
8	Korban Narkoba	11	0	2	13	1	5	3	35
9	Tuna Susila	0	1	0	0	0	5	3	9
10	Eks Narapidana	18	16	4	10	1	15	6	70
11	Penyandang Cacat	69	93	104	97	82	165	97	707
12	C. Anak dengan Kedistabilitan	10	53	22	20	14	41	29	189
13	Keluarga Fakir Miskin	2.031	2.334	2.477	3.291	1.587	1.762	2.188	15.670
14	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	10	10	1	6	0	10	30	67
15	Anak Korban Tindak Kekerasan	2	25	20	7	26	0	4	84
16	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	392	210	255	420	250	448	186	2.161
17	Korban Bencana Alam	1	7	5	0	3	1	2	19
18	Korban Bencana Sosial	0	5	0	2	0	18	30	55
19	Kelompok Minoritas	0	8	0	0	0	2	69	79
20	Pemulung	23	32	53	27	13	88	22	258
21	Korban Kekerasan	0	1	0	11	1	0	0	13
22	ODHA	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Trafficking	4	2	11	26	2	0	1	46
24	Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus	3	29	3	19	1	15	8	78
25	Pekerja migrant bermasalah sosial	1	0	0	1	0	2	19	23
		2.713	3.289	3.093	4.257	2.236	2.808	2.919	21.315

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tahun 2015.

Tabel 4.22
Penanganan PMKS di Kota Sukabumi

NO	JENIS PMKS	JUMLAH	YANG SUDAH DITANGANI	YANG BELUM DITANGANI	KETERANGAN
1	Anak Jalanan	49	49	-	
2	Pengemis	48	48	-	
3	Anak Nakal	53	53	-	
4	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	2.161			
5	Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah	84	84	-	
6	Lanjut Usia Terlantar	1.164			
7	Tuna Susila	9	9	-	
8	Gelandangan	13	13	-	
9	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK)	70	-		
10	Korban Penyalahgunaan NAPZA	35	-		
11	Keluarga Fakir Miskin	15.670			
12	Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	-	-	-	
13	Korban Bencana	134	134	-	

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tahun 2015.

4.6 Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk yang permanen atau dikenal dengan migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administrasi (Migrasi Internal) atau batas politik/negara (Migrasi International) atau dengan cara lain migrasi diartikan perpindahan permanen dari suatu daerah ke daerah lain.

Migrasi dipengaruhi oleh daya dorong (*Push Factor*) suatu wilayah dan daya tarik (*Pull Factor*) wilayah lainnya.

Daya dorong menyebabkan orang pergi ke tempat lain, misalnya karena di daerah itu tidak tersedia sumber daya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan, yang biasanya tidak terlepas dari kemiskinan dan pengangguran.

Sedangkan daya tarik wilayah adalah jika suatu wilayah mampu atau dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber penghidupan penduduk, baik bagi penduduk wilayah itu sendiri maupun penduduk disekitarnya dan daerah-daerah lain.

Mobilitas penduduk yang dipengaruhi oleh daya dorong disebut migrasi keluar, sedangkan mobilitas penduduk yang dipengaruhi oleh daya tarik disebut migrasi masuk.

TABEL 4.23
MIGRASI PENDUDUK MASUK KOTA SUKABUMI TAHUN 2015
(JANUARI S.D DESEMBER 2015)

NO	KECAMATAN	MIGRASI MASUK																								JUMLAH MIGRASI MASUK		
		DALAM PROPINSI												ANTAR PROPINSI														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	JML	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	JML
1	GUNUNG PUYUH	129	135	132	186	139	229	151	228	125	160	153	165	1.932	22	34	42	34	25	35	34	41	34	33	42	31	407	2.339
2	CIKOLE	172	179	175	246	184	304	200	303	166	212	203	219	2.563	29	44	56	45	33	47	44	55	45	44	56	41	539	3.102
3	CITAMIANG	143	149	146	205	153	254	167	252	138	177	170	183	2.137	24	38	47	37	27	39	37	46	38	37	46	34	450	2.587
4	WARUDOYONG	155	161	158	222	166	275	181	273	150	192	184	198	2.315	26	41	50	41	29	42	40	50	41	40	50	37	487	2.802
5	BAROS	95	98	96	136	101	168	110	168	92	117	112	121	1.414	16	25	31	25	17	26	25	30	25	24	31	23	298	1.712
6	LEMBURSIITU	105	109	107	150	112	185	122	184	101	129	124	134	1.562	18	27	34	28	20	27	27	34	28	27	34	25	329	1.891
7	CIBEUREUM	109	114	111	157	117	193	127	192	105	135	130	139	1.629	19	29	35	29	21	30	28	35	28	28	35	26	343	1.972
KOTA SUKABUMI		908	945	925	1302	972	1608	1058	1600	877	1122	1076	1159	13.552	154	238	295	239	172	246	235	291	239	233	294	217	2.853	16.405

SUMBER : DATA PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DIDUKCAPIL KOTA SUKABUMI TAHUN 2015

TABEL 4.24
MIGRASI PENDUDUK KELUAR KOTA SUKABUMI TAHUN 2015
(JANUARI S.D DESEMBER 2015)

NO	KECAMATAN	MIGRASI KELUAR																								JUMLAH MIGRASI KELUAR		
		DALAM PROPINSI												ANTAR PROPINSI														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	JML	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	JML
1	GUNUNG PUYUH	106	97	117	124	128	145	118	148	119	121	108	1.450	31	22	26	27	23	35	26	33	25	32	28	23	331	1.781	
2	CIKOLE	140	129	155	165	169	193	156	196	158	158	161	143	1.923	41	31	35	36	31	46	35	43	33	42	36	30	439	2.362
3	CITAMIANG	117	107	129	137	141	161	130	164	132	132	134	119	1.603	34	25	29	30	26	39	29	36	27	35	30	26	366	1.969
4	WARUDOYONG	126	116	140	149	153	174	141	178	143	143	145	129	1.737	37	26	32	33	28	41	32	39	30	38	33	28	397	2.134
5	BAROS	77	71	86	91	93	106	86	108	87	87	89	79	1.060	23	16	19	20	17	26	19	24	18	23	20	17	242	1.302
6	LEMBURSIITU	85	78	94	100	103	118	95	120	96	96	98	87	1.170	25	18	21	22	19	28	21	27	20	26	22	19	268	1.438
7	CIBEUREUM	89	82	99	105	108	123	99	125	100	101	102	91	1.224	26	19	22	23	20	29	22	28	21	27	23	19	279	1.503
KOTA SUKABUMI		740	680	820	871	895	1020	825	1039	835	836	850	756	10.167	217	157	184	191	164	244	184	230	174	223	192	162	2.322	12.489

SUMBER : DATA PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DIDUKCAPIL KOTA SUKABUMI TAHUN 2015

Dari Tabel 4.23 di atas, dapat kita lihat per kecamatan Tahun 2015 migrasi penduduk masuk ke Kota Sukabumi paling banyak ke Kecamatan Cikole sebanyak 3.102 jiwa atau 18,91% dari total migrasi masuk, sedangkan migrasi masuk yang paling sedikit berada di Kecamatan Baros sejumlah 1.712 jiwa atau 10,44% dari total migrasi masuk.

Dari Tabel 4.24 di atas, dapat kita lihat per kecamatan Tahun 2015 migrasi keluar paling banyak dari Kecamatan Cikole sebanyak 2.362 jiwa atau 18,91% dari total migrasi keluar, sedangkan migrasi keluar yang paling sedikit dari Kecamatan Warudoyong sebanyak 1.302 jiwa atau 10,43% dari migrasi keluar.

4.6.1 Angka Migrasi Masuk

Angka Migrasi Masuk (*In Migration Rate*) yaitu angka yang menunjukkan banyaknya migran yang masuk per 1000 penduduk daerah tujuan dalam waktu satu tahun.

Rumus :

$$\begin{aligned} \text{AMM} &= \frac{\text{Banyaknya migran masuk}}{\text{jumlah penduduk}} \times 1000 \\ &= \frac{16.406}{321.328} \times 1000 = 51.05 \end{aligned}$$

Angka migrasi masuk Kota Sukabumi Tahun 2015 adalah 51.05, hal ini berarti dari 1000 penduduk terjadi migrasi masuk sebanyak 51 - 52 jiwa.

4.6.2 Angka Migrasi Keluar

Angka Migrasi Keluar (*Out Migration Rate*) yaitu angka yang menunjukkan banyaknya migran yang keluar per 1000 penduduk daerah asal dalam waktu satu tahun.

Rumus :

$$\begin{aligned} \text{AMK} &= \frac{\text{Banyaknya migran keluar}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000 \\ &= \frac{12.489}{321.328} \times 1000 = 38,87 \end{aligned}$$

Angka migrasi keluar Kota Sukabumi adalah 38,89 hal ini berarti dari 1000 penduduk terjadi migrasi keluar sebanyak 38 – 39 jiwa.

4.6.3 Angka Migrasi Netto

Angka Migrasi Netto (*Net Migration*) yaitu selisih antara migrasi masuk dan keluar. Apabila migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar maka disebut migrasi netto positif. Sedangkan jika migrasi keluar lebih besar daripada migrasi masuk disebut migrasi netto negatif.

Angka migrasi netto adalah selisih antara banyaknya migran masuk dengan migran keluar per 1000 penduduk daerah tersebut

Rumus :

$$\begin{aligned} MN &= \frac{\text{Banyaknya migran masuk} - \text{banyaknya migran keluar}}{\text{banyaknya penduduk}} \times 1000 \\ &= \frac{16.406 - 12.489}{321.328} \times 1000 = 16,37 \end{aligned}$$

Angka Migrasi Netto Kota Sukabumi adalah 16,37 hal ini berarti selisih migrasi masuk dengan migrasi keluar dari 1000 penduduk Tahun 2015 adalah sebanyak 16 - 17 jiwa.

Migrasi Netto Kota Sukabumi Tahun 2015 adalah Migrasi Netto Positif, karena jumlah migrasi masuk 51,05% lebih besar dibandingkan migrasi keluar 38,87%.

Jadi Migrasi Netto Kota Sukabumi Tahun 2015 adalah Migrasi Netto Positif sebanyak 16 - 17 jiwa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Kota Sukabumi dengan luas wilayah 48 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 321.328 jiwa berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan yaitu Gunung Puyuh, Cikole, Citamiang, Warudoyong, Baros, Lembursitu, dan Cibeureum.
2. Jumlah dan persebaran penduduk Kota Sukabumi Tahun 2015 dilihat per kecamatan terbanyak berada di wilayah Kecamatan Cikole (18,82%) dan yang terkecil berada di wilayah Kecamatan Baros (10,43%), sedangkan apabila dilihat per kelurahan terbanyak berada di wilayah Kelurahan Cisarua 18.215 (5,67%), disusul Kelurahan Karang Tengah sebanyak 17.925 (5,58%), sedangkan yang terkecil berada di wilayah Kelurahan Gunung Parang sebanyak 4.151 (1,29%), disusul Kelurahan Jayamekar sebanyak 4.976 (1,55%).
3. Kepadatan Penduduk Kota Sukabumi Tahun 2015 dengan jumlah sebanyak 321.328 jiwa dibandingkan Luas Wilayah 48 km² adalah 6.694 artinya tiap 1 km² dihuni oleh penduduk sebanyak 6.693 s.d 6.694 jiwa. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2014 dengan jumlah sebanyak 320.572 jiwa dibandingkan Luas Wilayah 48 km² adalah 6.679 artinya tiap 1 km² dihuni oleh penduduk sebanyak 6.679 s.d 6.680 jiwa, terjadi peningkatan jumlah penduduk sebanyak 15 jiwa.

4. Kepadatan wilayah per kecamatan, yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Citamiang yaitu 12.557, disusul Kecamatan Cikole yaitu 8.543, lalu Kecamatan Gunung Puyuh yaitu 8.299, dan Kecamatan Warudoyong yaitu 7.255. Sedangkan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Lembursitu yaitu 4.177, disusul dengan Kecamatan Cibeureum yaitu 4.411, dan Kecamatan Baros yaitu 5.475. Apabila dilihat per kelurahan yang paling padat adalah Kelurahan Tipar yaitu 20.409, kemudian Kelurahan Kebonjati yaitu 15.467, lalu Kelurahan Nyomplong yaitu 13.833, sedangkan yang paling jarang penduduknya adalah Kelurahan Jayamekar yaitu 3.130, dan Kelurahan Babakan yaitu 3.164.
5. Berdasarkan struktur umur, penduduk Kota Sukabumi tergolong Penduduk Produktif. Data Tahun 2015 menunjukkan sebesar 68,68% (Kota Maju bukan Kota Berkembang) karena kurang dari 30% penduduk Kota Sukabumi berumur <15 tahun (Penduduk Muda) yaitu 25,51% dan kurang dari 15% berumur 65 tahun atau lebih yaitu 5,81%.
6. *Sex Rasio* Kota Sukabumi Tahun 2015 sebesar 102,07 artinya bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 s.d 103 penduduk laki-laki.
7. Angka ketergantungan penduduk Kota Sukabumi sebesar 45,61 artinya bahwa tiap 100 orang produktif harus menanggung 45 s.d 46 orang yang tidak produktif.

8. Jumlah penduduk Kota Sukabumi sebesar 321.328, dengan mayoritas beragama Islam sebanyak 308.638 atau 96,05%, selanjutnya Agama Kristen sebesar 2%, Agama Katholik sebesar 1%, Agama Budha 0,01%, disusul Agama Hindu sebesar 0,93%, Khonghucu dan Kepercayaan sebesar 0%.
9. Jumlah penduduk Kota Sukabumi yang tidak/belum sekolah sebesar 57.373 jiwa (17.85%) dari 321.328 jiwa penduduk Kota Sukabumi. Angka yang tidak/belum sekolah ini termasuk di dalamnya anak-anak yang belum berusia sekolah maupun penduduk yang memang benar-benar tidak pernah sekolah.
10. Penduduk Kota Sukabumi yang tidak tamat SD/ sederajat sejumlah 34.518 jiwa (10,74%) dari 321.328 jiwa penduduk Kota Sukabumi, jumlah tersebut termasuk di dalamnya orang-orang/anak-anak yang putus sekolah/drop out SD maupun anak-anak yang berusia SD tapi belum lulus/tamat.
11. Proporsi penduduk menurut tingkat pendidikan terbesar berada pada tingkat pendidikan Tamat SD/ sederajat yaitu 79.212 jiwa (24,65%), lalu tingkat pendidikan SLTA/ sederajat yaitu 78.168 jiwa (24,33%), kemudian tingkat pendidikan SLTP/ sederajat yaitu 48.502 jiwa (15,09%). Selanjutnya proporsi terkecil pada jenjang Strata III sebanyak 48 jiwa (0,01%).
12. Kepemilikan KK di Kota Sukabumi sebanyak 88.055 (94,55%). Ratio atau perbandingan KK dengan jumlah penduduk sebesar 3,45. Hal ini berarti rata-rata KK berisi 3-4 jiwa. Secara kasar data ini bisa menggambarkan kondisi kepemilikan KK di Kota Sukabumi pada umumnya setiap Kepala Keluarga sudah mempunyai KK.

13. Prosentasi kepemilikan KTP-el Tahun 2015 sebesar 93,11% dari wajib KTP sebanyak 228.205 orang, sedangkan prosentasi kepemilikan KTP-el pada tahun 2014 sebesar 89,93%, berarti terjadi kenaikan sebesar 4,08%.
14. Kepemilikan Akta Kelahiran Kota Sukabumi Tahun 2015 sebanyak 92,26% dari jumlah penduduk sebanyak 321.328 jiwa. Kepemilikan Akta Kelahiran tertinggi berada di Kecamatan Cikole sebesar 55.910 jiwa (92,44%), sedangkan kepemilikan Akta Kelahiran terendah berada di Kecamatan Cibeuruem sebesar 35.549 jiwa (91,90%).
15. Angka Melek Huruf (AMH) Kota Sukabumi sebesar 99,99% dari jumlah penduduk yang ada, berdasarkan indikator penelitian angka ini sudah tinggi sedangkan yang belum melek huruf sebesar 0,001%. Berdasarkan data bahwa penduduk tersebut yang sudah berusia lanjut namun mereka melek huruf arab dan dapat membaca angka, serta sudah tidak memungkinkan melaksanakan kegiatan belajar baik di lembaga formal maupun informal dikarenakan usia yang sudah lanjut.
16. APK Kota Sukabumi secara keseluruhan untuk jenjang pendidikan PAUD berkisar pada angka 59% (58,72%), secara real terdapat penurunan APK sebesar 4% dari tahun 2015 yang berkisar pada angka 63%.
17. APK Kota Sukabumi secara keseluruhan untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat berada di atas 100% (108%). Hal ini menunjukkan tingkat partisipasi penduduk Kota Sukabumi terhadap pendidikan jenjang SD/ sederajat pada umumnya tinggi.

18. APK Kota Sukabumi secara keseluruhan untuk jenjang pendidikan SMP/ sederajat berada di atas 100% (112,70%). Hal ini menunjukkan tingkat partisipasi penduduk Kota Sukabumi terhadap pendidikan jenjang SMP/ sederajat pada umumnya tinggi.
19. APK Kota Sukabumi secara keseluruhan untuk jenjang pendidikan SMA/ sederajat berada di atas 100% (136,14%). Hal ini menunjukkan tingkat perhatian penduduk terhadap pendidikan jenjang SMA/ sederajat pada umumnya tinggi.
20. Jumlah PUS di Kota Sukabumi pada tahun 2015 mencapai 54.371 pasangan, dimana jumlah PUS terbanyak berada di Kecamatan Warudoyong yaitu 9.723 pasangan dan jumlah PUS paling sedikit berada di Kecamatan Baros yaitu 6.205 pasangan.
21. Prevalensi Peserta KB Aktif (CU/PUS) di Kota Sukabumi Tahun 2015 mencapai $40.002 / 54.371 \times 100\% = 73,57\%$. Kondisi prevalensi peserta KB aktif pada tahun 2015 mencapai 73,57% lebih tinggi dari target RPJMD 2013-2018 Kota Sukabumi yaitu sebesar 67,45% menandakan bahwa cakupan sasaran PUS yang menjadi peserta KB aktif di Kota Sukabumi telah melampaui target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.
22. Jumlah PUS bukan peserta KB pada tahun 2015 mencapai angka 14.369 atau 26,43% dari total PUS yang ada di Kota Sukabumi dimana jumlah kategori PUS bukan peserta KB “tidak ingin anak lagi” mendominasi wilayah ini dengan angka mencapai 4.259 atau 29,64% dari total jumlah PUS bukan peserta KB.

-
23. Jumlah pencari kerja Tahun 2014 (6.152) dan tahun 2013 (6.458), jumlah pencari kerja pada tahun 2015 terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar 6.538. Jika dianalisis lebih jauh, tentu saja lowongan kerja yang harus tersedia dapat memenuhi harapan dari pencari kerja.
 24. Keluarga Pra Sejahtera, sebagai cerminan tahapan keluarga terendah, di Kota Sukabumi mencapai angka 3.054 atau dengan kata lain mencapai $3.054/85.575 \times 100\% = 3,57\%$ dari total jumlah keluarga di Kota Sukabumi.
 25. Jumlah pencari kerja Tahun 2014 (6.152) dan tahun 2013 (6.458), jumlah pencari kerja pada tahun 2015 terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar 6.538. Jika dianalisis lebih jauh, tentu saja lowongan kerja yang harus tersedia dapat memenuhi harapan dari pencari kerja.
 26. Pencari kerja yang sudah ditempatkan dalam arti sudah mendapatkan pekerjaan sebanyak 5.297 atau 81,02% dari jumlah pencari kerja sebanyak 6.538, sedangkan pencari kerja yang belum ditempatkan dalam arti belum mendapatkan pekerjaan sebanyak 1.241 atau 18,98% dari jumlah pencari kerja sebanyak 6.538.
 27. Migrasi penduduk masuk ke Kota Sukabumi Tahun 2015 paling banyak ke Kecamatan Cikole sebanyak 3.102 jiwa atau 18,91% dari total migrasi masuk, sedangkan migrasi masuk yang paling sedikit berada di Kecamatan Baros sejumlah 1.712 jiwa atau 10,44% dari total migrasi masuk. Angka migrasi masuk Kota Sukabumi Tahun 2015 adalah 51.05, hal ini berarti dari 1000 penduduk terjadi migrasi masuk sebanyak 51 - 52 jiwa.

28. Migrasi penduduk keluar Kota Sukabumi Tahun 2015 paling banyak dari Kecamatan Cikole sebanyak 2.362 jiwa atau 18,91% dari total migrasi keluar, sedangkan migrasi keluar yang paling sedikit dari Kecamatan Warudoyong sebanyak 1.302 jiwa atau 10,43% dari migrasi keluar.
29. Angka migrasi keluar Kota Sukabumi adalah 38,89 hal ini berarti dari 1000 penduduk terjadi migrasi keluar sebanyak 38 – 39 jiwa.
30. Angka Migrasi Netto Kota Sukabumi adalah 16,37 hal ini berarti selisih migrasi masuk dengan migrasi keluar dari 1000 penduduk Tahun 2015 adalah sebanyak 16 - 17 jiwa. Migrasi Netto Kota Sukabumi Tahun 2015 adalah Migrasi Netto Positif, karena jumlah migrasi masuk 51,05% lebih besar dibandingkan migrasi keluar 38,87%. Jadi Migrasi Netto Kota Sukabumi Tahun 2015 adalah Migrasi Netto Positif sebanyak 16 - 17 jiwa.

5.2 Saran

1. Sumber daya manusia aparatur baik di tingkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun tingkat kecamatan dan kelurahan perlu diberikan pendidikan dan pelatihan terkait dengan kebijakan administrasi kependudukan.
2. Terkait dengan kesadaran masyarakat yang masih rendah, terutama dalam kepemilikan dokumen kependudukan dan updating biodata penduduk yang masih dianggap kurang begitu penting, perlu diadakan sosialisasi secara inten kepada seluruh lapisan masyarakat.

3. Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terkait dengan stelsel aktif dari pemerintah dalam pelayanan administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan dinamis, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah untuk mendukung kebijakan tersebut dengan sekurang-kurangnya tersedianya sarana prasarana yang memadai (seperti: perangkat komputer, jaringan komunikasi data, perekaman data biometrik, dan bahan material pendukungnya) dan sumber daya manusia (operator dan petugas lapangan) yang mumpuni.